

BUKU REFERENSI

madza
media

STRATEGI PERANG SEMIESTA INDONESIA



Arief Rachman

STRATEGI PERANG SEMESTA INDONESIA

Penulis
Arief Rachman

Editor
Adi Bandono

madza
media

STRATEGI PERANG SEMESTA INDONESIA

Edisi Pertama
Copyright @ 2023

ISBN 978-623-130-064-5

15,5 x 23 cm
178h.
cetakan ke-1, 9 Februari 2023

Penulis
Arief Rachman

Editor
Adi Bandono

Penerbit
Madza Media
Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021
Kantor 1: Jl. Pahlawan, Simbatan, Kanor, Bojonegoro
Kantor 2: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang
redaksi@madzamedia.co.id
www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah
dari penerbit.

KATA PENGANTAR



**Dr. Ir. Arief Rachman, M.M., M.B.A.
Mayor Jenderal TNI (Purn)**

Assalamuallaikum warohmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan rasa syukur *Alhamdulillah*, kehadiran Allah SWT, Tuhan yang maha Esa, pada akhirnya kami telah berhasil menyusun sebuah buku yang berjudul “Strategi Perang Semesta Indonesia”, dimana buku ini bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa yang menempuh program studi Magister Strategi Perang Semesta Fakultas Strategi Pertahanan di Universitas Pertahanan atau pun mahasiswa yang menempuh program studi serumpun di perguruan tinggi mana pun, dosen maupun para akademisi dan peneliti sebagai referensi terkait dengan strategi perang semesta sebagai bagian dari strategi pertahanan negara yang pernah diterapkan di Indonesia.

Perang semesta sering disebut juga sebagai perang total. Definisi perang total (*total war*) itu sendiri kini masih menjadi istilah kontroversial yang diperdebatkan oleh para politisi, akademisi, pengamat bahkan perwira militer sampai dengan sekarang. Sejak dikonsepsikan oleh politisi Perancis selama Perang Dunia I saat krisis parah (1916-1917), perang total telah menjadi

istilah yang digunakan oleh sejarawan dan akademisi untuk melihat beragam elemen saat melihat perang di masa lalu.

Perang total adalah perang yang mencakup seluruh dan semua sumber daya dan infrastruktur yang terkait dengan sipil sebagai target militer, dan menerima korban sipil yang signifikan sebagai kerusakan kolateral (*collateral damage*). Kata “total” hanya mengacu pada kisaran target dan sarana yang dapat diterima, tidak sampai tingkat kerusakan. Kamus *American-English* mendefinisikan perang total sebagai perang yang tidak dibatasi dalam hal senjata yang digunakan, wilayah atau kombatant yang terlibat, atau tujuan yang dikejar, terutama yang didalamnya hukum perang diabaikan. Para sarjana mengidentifikasi perang total sebagai kelas peperangan yang tersendiri.

Dalam konteks kekinian mengacu pada pengalaman sejarah bangsa Indonesia pada masa lalu yang pernah dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun, dan Jepang selama beberapa tahun, ternyata penerapan strategi perang semesta ini sangat efektif diterapkan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setiap ancaman yang muncul baik dari luar maupun dari dalam negeri, dapat dicegah melalui mobilisasi semua komponen bangsa yang turut serta dalam usaha bela negara.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara dan bangsanya yang tercinta sampai titik darah penghabisan. Hal ini berarti nilai-nilai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah menjadi harga mati dan terpatrikan dalam setiap dada dan jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus dipertahankan dan dilestarikan pada setiap generasi yang dilahirkan.

Demikian sedikit kata pengantar yang dapat penulis sampaikan, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua orang tidak hanya para akademisi maupun praktisi yang membidangi tentang strategi perang semesta sebagai bagian dari strategi pertahanan semesta yang memiliki keunikan dan karakteristik khusus, namun juga bermanfaat

bagi siapa saja yang ingin meningkatkan wawasan pengetahuannya tentang dunia kemiliteran dan pertahanan negara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengundang para pengamat, akademisi, dan praktisi yang tertarik mendalaminya, sudi kiranya dapat memberikan masukan, kritik dan saran demi kesempurnaan isi buku ini. Akhir kata, semoga Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT senantiasa melindungi kita dalam mengabdikan diri kepada negara dan bangsa.

Waasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 9 Pebruari 2023

Penulis,

Dr. Ir. Arief Rachman, M.M., M.B.A.

Mayjen TNI (Purn)

DAFTAR ISI

Cover

Halaman identitas

Kata Pengantar - 1

Daftar Isi - 4

BAGIAN 1 Pendahuluan - 7

- 1.1 Umum - 8
- 1.2 Urgensi Memahami Strategi Perang Semesta Indonesia - 11
- 1.3 Kedudukan Strategi Perang Semesta Pada Ketahanan Nasional - 12

BAGIAN 2 Pendekatan Perang Semesta - 15

- 2.1 Konsepsi Total War - 16
- 2.2 *Analytical Dimensions Of Total War* - 23
- 2.3 Nuclear War Vs Total War - 26
- 2.4 Kepemimpinan Dalam Perang Total - 27
- 2.5 Perang Total dan Bela Diri - 28
- 2.6 Perang Total Vs Perang Modern - 29

BAGIAN 3 Sejarah Perang Semesta di Indonesia - 33

- 3.1 Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Perang Kemerdekaan RI - 34
- 3.2 Beberapa Peristiwa Penting Pasca Kemerdekaan - 38
- 3.3 Kepemimpinan Jenderal Besar Sudirman - 40

BAGIAN 4 Perang Semesta dan Hukum Internasional - 45

- 4.1 Sejarah Hukum Perang - 46
- 4.2 Jus Ad Bellum dan Jus In Bello - 48
- 4.3 Daftar Deklarasi, Konvensi, dan Perjanjian Tentang Hukum Perang - 52
- 4.4 Cara dan Metode Peperangan - 53
- 4.5 Perlindungan Terhadap Warga Sipil Selama Konflik Bersenjata-55
- 4.6 Kejahatan Perang dan Tanggung Jawab Komando - 57

BAGIAN 5 Diplomasi Perang Semesta - 61

- 5.1 Pengertian Diplomasi – 62
- 5.2 Diplomasi dan Hubungan Internasional – 63
- 5.3 Teori Dalam Hubungan Internasional – 64
- 5.4 Pola Hubungan Internasional – 65
- 5.5 Tujuan Nasional – 66
- 5.6 Diplomasi – 67
- 5.7 Tujuan Diplomasi – 69
- 5.8 Peranan Diplomasi – 70
- 5.9 Perang Dingin dan Diplomasi – 71
- 5.10 Perang Dingin Lebih Berbahaya Dari Pada Perang Panas – 72
- 5.11 Detente – 73
- 5.12 Berbagai Tipe Diplomasi – 73
- 5.13 Perang – 78
- 5.14 Diplomasi Sebagai Pencegah Perang (Kasus Di Indonesia) – 80

BAGIAN 6 Strategi Perang Semesta - 99

- 6.1 Definisi Strategi – 100
- 6.2 Perang Semesta – 103
- 6.3 Perang Gerilya – 104
- 6.4 Strategi Militer – 104
- 6.5 Doktrin Pertahanan – 105
- 6.6 Implikasi Strategis Perubahan Teknologi Militer – 106
- 6.7 Pelajaran Yang Bisa Dipetik – 107
- 6.8 Dean Cheng “Peperangan Tak Terbatas” – 108
- 6.9 Bentuk-Bentuk Perang – 110
- 6.10 Terminologi Perang Semesta atau Pertahanan Semesta – 114
- 6.11 Penyelenggaraan Perang Semesta – 115
- 6.12 Penyiapan Perang Semesta – 116

BAGIAN 7 Mobilisasi Kekuatan Nasional Dalam Perang - 119

- 7.1 Definisi Mobilisasi – 120
- 7.2 Mobilisasi dan Darurat Militer – 122

BAGIAN 8 Integrasi Tujuan Politik Dengan Militer - 129

- 8.1 Integrasi Nasional – 130
- 8.2 Aspek Politik dan Sosial – 135
- 8.3 Kekuatan Politik Sebagai Unsur Kekuatan Nasional – 137
- 8.4 Elemen Politik Kekuatan Nasional – 139
- 8.5 Kebijakan Luar Negeri – 140

**Bagian 9 Perang Sipil dan Intervensi Masalah
Kemanusiaan - 143**

9.1 Intervensi Kemanusiaan - 144

Bagian 10 Kemenangan Dalam Perang Semesta - 149

10.1 Ciri Perang Semesta - 150

10.2 Merunut Sejarah Perang Semesta - 152

10.3 Indonesian Total War - 158

Indeks - 170

Daftar Pustaka - 174

Riwayat Hidup - 177

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

PENDAHULUAN

Bagian pertama Pendahuluan ini menguraikan tentang keefektifan penerapan Strategi Perang Semesta di Indonesia, urgensi memahami Strategi Perang Semesta. Kedudukan Strategi Perang Semesta Dalam Ketahanan Nasional tampil sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri, sehingga teori perang semesta ini sering mendapatkan porsi tersendiri pembahasannya disamping teori perang lainnya. Strategi perang semesta merupakan pilihan terbaik dalam mempertahankan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman dan tantangan yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri.

1.1 Umum

Perang total (*total war*) menjadi istilah kontroversial yang digunakan di masa lalu oleh para politisi, birokrasi, dan perwira militer bahkan oleh pakar komputer dan akademisi di masa sekarang. Sejak dikonsepsikan oleh para politisi Perancis selama Perang Dunia I saat krisis parah (1916-1917), perang total telah menjadi istilah yang digunakan oleh para sejarawan dan akademisi untuk melihat beragam elemen yang terlibat secara langsung pada peristiwa perang di masa lalu. Unsur-unsur perang total, yang meliputi: tujuan perang (*total war aims*), metode peperangan (*total methods of warfare*), mobilisasi total (*total mobilization*), dan kontrol menyeluruh (*total control*) dapat diidentifikasi dan dapat dijadikan sebagai alat yang berguna untuk penelitian lebih lanjut mengenai perang.

Perang total adalah perang yang mencakup pengerahan terhadap seluruh dan semua sumber daya termasuk infrastruktur yang terkait dengan sipil sebagai target militer, serta menerima korban sipil yang signifikan sebagai dampak dari kerusakan kolateral (*collateral damage*) yang ditinggalkan. Kata “total” itu sendiri hanya mengacu pada kisaran target dan sasaran yang dapat diterima, serta tidak sampai pada memikirkan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh perang. Dalam kamus *American-English* mendefinisikan perang total sebagai perang yang tidak dibatasi dalam hal senjata yang digunakan, wilayah atau kombatan yang terlibat, atau tujuan yang dikejar, terutama yang didalamnya hukum perang atau hukum humaniter cenderung diabaikan. Oleh karenanya para sarjana mengidentifikasi dan mengklasifikasi perang total sebagai jenis atau kelas peperangan yang tersendiri.

Dalam perang total, sampai batas tertentu yang tidak dapat diterapkan menjadi konflik total. Perbedaan antara kombatan dan nonkombatan berkurang dan bahkan kadang-kadang hilang sama sekali karena pihak lawan dapat mempertimbangkan penggunaan hampir semua sumber daya manusia (bahkan hak non kombatan), yang bagaimanapun juga merupakan bagian dari upaya perang.

Persoalan perang yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah kondisi dimana rakyatnya memiliki corak dan bentuk khusus sehubungan dengan keadaan negara, perilaku masyarakat, dan budaya bangsa, serta terkait dengan kondisi geografis. Sejarah membuktikan bahwa posisi dan kondisi geografis suatu negara menjadi faktor penting dalam menentukan strategi pertahanan dan juga strategi untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Perang yang bersifat semesta menjangkau seluruh bidang kehidupan sebagai daerah perang dengan segala strateginya.

Deskripsi perang semesta mengarahkan untuk mempertimbangkan sejarah perjuangan politik bangsa Indonesia, dimana kondisi demografis yang berciri pluralistis, budaya yang Bhinneka Tunggal Ika, yang dijajah selama 3,5 abad oleh bangsa Belanda, mampu merebut kemerdekaan dari para penjajahnya melalui perang yang melibatkan milisi dari kekuatan rakyat yang

bermacam-macam, pemuda nasionalis dan kaum agamis, Kesultanan, Kerajaan, Datu, Penglingsir, Kepala Suku, dan Kepala Marga, yang menggunakan dukungan sumber daya alam yang tersedia dari rakyat, maka perang semesta dipahami sebagai kondisi yang diilustrasikan “Perang semua melawan semua” dan “Menang semua tanpa kenal kalah semua”.

Ditinjau dari aspek militer, strategi aliansi yang diterapkan oleh Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada era perang dunia II, ternyata tidak berhasil mengalahkan strategi perang semesta yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bahkan telah mampu memformulasikan antara strategi militer dengan tujuan politik dalam perang semesta sehingga bisa mengantarkan bangsa Indonesia pada Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 silam. Kini perang semesta pada kenyataannya telah menjadi sebuah doktrin peperangan yang menarik untuk dikaji. Doktrin perang semesta meskipun telah menjadi sebuah doktrin pertahanan semesta yang telah diterapkan selama bertahun-tahun tetap harus terus dikaji keandalannya, mengingat kondisi dan situasi selalu berkembang dinamis.

Pada dasarnya strategi menyediakan jembatan antara cara militer dengan tujuan politik. Isu-isu menyangkut strategi tentunya melibatkan berbagai aspek, maka dari itu strategi paling tepat dikaji dari perspektif interdisipliner. Dari pemahaman mengenai strategi ini, dapat dilihat bahwa setiap penggunaan strategi selalu diikuti dengan tujuan tertentu. Tujuan sebagai akhir dari perjuangan, menjadikan sebuah strategi dapat dikatakan sebagai proses yang rasional, karena sejatinya manusia tidak akan melakukan suatu hal tanpa mengetahui tujuan tertentu yang ingin diraih.

Bagi bangsa Indonesia strategi perang semesta merupakan bagian dari strategi pertahanan semesta, dan strategi pertahanan semesta tersebut merupakan bagian dari strategi pertahanan negara. Kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana negara mampu mengelola strategi pertahanan negaranya dari segala ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

1.2 Urgensi Memahami Strategi Perang Semesta Indonesia

Bangsa dan negara Indonesia terlahir dari keunikan sosial budaya yang melingkupi penduduknya. Beragam kehidupan sosial budaya dari berbagai suku bangsa yang jumlahnya ribuan ternyata mampu disatukan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda dan upaya perjuangan seluruh rakyat Indonesia sampai dengan diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ternyata mampu membuktikan bahwa bangsa Indonesia dapat mengalahkan segala bentuk penjajahan dari negara mana pun, Belanda, Jepang maupun Sekutu. Upaya-upaya perjuangan yang telah dilakukan melalui strategi perang semesta telah membuahkan hasil yang nyata yakni runtuhnya pengembalian kekuasaan para penjajah yang ingin bercokol kembali di bumi Indonesia.

Urgensi mempelajari strategi perang semesta di Indonesia, akan membawa pada pemahaman yang mendalam, bahwa:

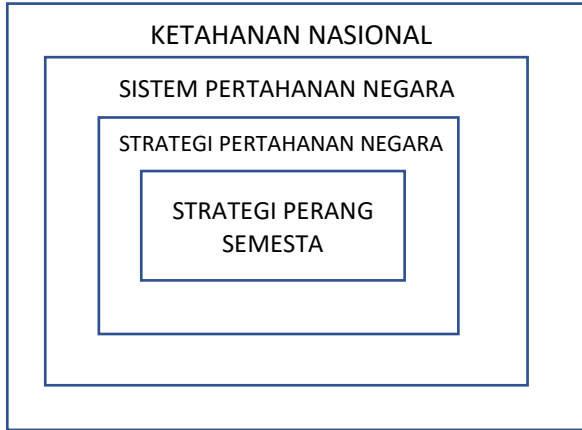
1. Menangnya suatu peperangan ternyata sangat ditentukan oleh kekuatan rakyat yang mampu bersatu padu dalam menghadapi segala macam ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Meskipun rakyat Indonesia memiliki ribuan suku bangsa, jika disatukan akan mampu membangun kekuatan yang tidak terkalahkan. Para pemuda, kaum agama, kaum perempuan, kesultanan, kerajaan, Datu, Panglinsir, Kepala Suku, Kepala Marga, dan lain-lain apapun sebutannya itu jika disatukan akan menjadi sebuah kekuatan yang kokoh dan tidak terpisahkan satu sama lainnya.
2. Dalam perspektif sejarah perang membuktikan bahwa strategi perang semesta yang melibatkan segenap komponen bangsa dengan dukungan potensi alamiahnya secara optimal sangat efektif dalam menentukan kemenangan. Dalam berbagai peristiwa peperangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia memperlihatkan bukti nyata bahwa pelibatan segenap komponen bangsa secara totalitas mampu memenangkan peperangan. Sumber daya alam di Indonesia pun secara geografis telah menyediakan senjata yang sangat kuat, senjata yang sangat tajam,

untuk melakukan pertempuran dalam bentuk apa pun, baik dalam medan peperangan pada skala kecil maupun skala besar.

3. Keterlibatan segenap komponen bangsa pada peperangan semesta, merupakan salah satu bentuk keberhasilan para pemimpin bangsa dalam menggalang kesetiakawanan bagi setiap orang. Para pemimpin, termasuk pemimpin tentara telah mampu membangun kemampuan integratif, membangun konsolidasi, penegakan kultural, dan menyatukan simbol dengan penuh integritas dan kejujuran.

1.3 Kedudukan Strategi Perang Semesta Pada Ketahanan Nasional

Sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri yang memiliki keunikan dan karakteristik sendiri, strategi perang semesta merupakan bagian dari strategi pertahanan negara. Strategi pertahanan negara itu sendiri merupakan bagian dari Sistem Pertahanan Negara. Sedangkan Sistem Pertahanan Negara merupakan salah satu dari lima gatra Ketahanan Nasional, yang terdiri dari Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (ipoleksosbudhankam). Gatra pertahanan negara identik dengan wilayah tugas yang diemban oleh TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Kedudukan dan hubungan antara Strategi Perang Semesta, Strategi Pertahanan Negara, Sistem Pertahanan Negara, Ketahanan Nasional dapat digambarkan sebagai berikut,



Gambar 1. Kedudukan Strategi Perang Semesta Dalam Ketahanan Nasional

Pada Gambar 1 tersebut di atas menunjukkan kedudukan dan hubungan Strategi Perang Semesta sebagai salah satu strategi pertahanan negara dalam rangka menjaga ketahanan nasional. Strategi perang semesta ketika didisain dengan tepat maka pada saat tataran aplikasi maka akan semakin memperkuat sistem pertahanan negara, yang pada gilirannya dapat memperkokoh ketahanan nasional.

RANGKUMAN

1. Perang semesta atau perang total merupakan peperangan yang melibatkan pengerahan terhadap seluruh kekuatan atau potensi sumberdaya termasuk sumber daya manusia beserta infrastruktur dan komponen lainnya secara total.
2. Urgensi mempelajari strategi perang semesta di Indonesia, akan membawa pada pemahaman yang jelas tentang:
 - a. Kemenangan dalam peperangan sangat ditentukan oleh kekuatan rakyat yang besatu padu.
 - b. Sejarah membuktikan bahwa strategi perang semesta yang melibatkan segenap komponen bangsa dengan dukungan potensi alamiahnya secara optimal sangat efektif dalam menentukan kemenangan.
 - c. Keterlibatan segenap komponen bangsa pada peperangan semesta, merupakan salah satu bentuk keberhasilan para pemimpin bangsa dalam menggalang kesetiakawanan bagi setiap orang.
3. Strategi Perang Semesta merupakan sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan memiliki keunikan-karakteristik sendiri. Strategi Perang Semesta kedudukannya sebagai bagian dari strategi pertahanan negara. Strategi pertahanan negara itu sendiri merupakan bagian dari Sistem Pertahanan Negara. Sedangkan Sistem Pertahanan Negara merupakan salah satu dari lima gatra Ketahanan Nasional, yang terdiri dari Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (ipoleksosbudhankam).



BAGIAN 2
PENDEKATAN
PERANG SEMESTA

Pada bagian 2 yang membahas tentang Pendekatan Perang Semesta ini, disajikan sub pembahasan materi tentang konsepsi perang total atau perang semesta, analisis dimensi perang total, perbedaan antara perang nuklir dengan perang total, perang total sebagai upaya dalam membela diri, kepemimpinan dalam perang total, perang total dan perang modern. Dalam mendefinisikan perang semesta banyak perspektif pemikiran dari para ahli atau tokoh-tokoh yang terkait atau terlibat peperangan secara langsung yang memiliki pengalaman berbeda-beda. Hal ini memungkinkan bagi mereka tiap tiap ilmuwan yang ahli di bidang penelitian perang membuat definisi perang semesta dari sudut pandangan yang berbeda bergantung pada situasi dan kondisi yang pernah dialaminya.

2.1 Konsepsi Total War

Perang semesta sering pula disebut dengan istilah perang total. Perang total adalah istilah yang telah digunakan di masa lalu kebanyakan oleh orang-orang yang jauh dari spektrum politik. Istilah ini digunakan sebagai sebuah konsep akademis oleh para periset: David Avrom Bell, Roger Chickering, Stig Forster, Jean Yves Guiomar, dan Mark E. Neely. Dalam serangkaian konferensi 1992-2001, Chickering dan Forster menawarkan diskusi berkelanjutan tidak hanya tentang perkembangan peperangan antara tahun 1861 dan 1945, namun juga pemahaman tentang perang total dan cara-cara di mana konsep tersebut dapat menjadi alat yang berguna bagi penelitian akademis. Dalam konferensi muncul pertanyaan terkait bagaimana menggunakan konsep tersebut sebagai sarana akademis dan sejauh mana dapat digunakan dalam periode waktu yang selalu menjadi bahan pertanyaan. Hingga akhirnya rangkaian pertemuan tersebut menghasilkan penelitian ekstensif mengenai “perang total”.

Hasil konferensi telah memicu perdebatan dan membuat peneliti lain bertanya-tanya apakah konsep tersebut juga dapat berfungsi sebagai alat analisis yang berguna untuk studi perang lainnya. Contoh pendekatan semacam dilakukan oleh McPherson, Neely, dan Trudeau tentang Perang Sipil Amerika, serta Bell dan Guiomar mengenai Perang Perancis dan Napoleon. Jawaban mengenai apakah konsep tersebut dapat diterapkan dalam berbagai situasi peperangan yang beragam; dan tidak terbantahkan lagi bahwa definisi “perang total” sejauh ini telah tercapai. Definisi seperti itu seharusnya tidak diharapkan untuk beberapa waktu ke depan dan bukan tujuan akhir kontribusi hasil pertemuan.

Sebaliknya, objeknya adalah untuk menyajikan gambaran umum tentang penggunaan perang total dalam sejarah dan untuk memberi gambaran tentang beberapa sudut pandang yang diambil dalam konteks kontroversi historiografi. Istilah “perang total” dari terjemahan bahasa Jerman “totaler Krieg” dikaitkan dengan periode antarperang atau PD II; penerbitan *Der Totale Krieg* karya Erich Ludendorff (1865-1927) dan pidato menteri propaganda Nazi Joseph Goebbels (1897-1945) pada tahun 1943. Namun demikian, terminologinya tidak didefinisikan dengan baik dan tidak ada satupun penulis yg mengklaim penggunaan istilah ini lebih awal atau untuk mengatakan dari mana ide mereka. Konsekuensi dari kata “total” yang dalam maknanya mengandung segala sesuatu yg tampaknya belum dapat dijelaskan pada masanya. Penggunaan pertama istilah “total war” oleh matematikawan Jerman, George Christoph Lichtenberg (1742-1799) menunjukkan ke pemahaman perang karena digunakan dalam surat yang dikirim dari Inggris kepada Heinrich Christian Boie (1744-1806) sekitar tahun 1775-1778, dalam kaitannya dengan frasa lain seperti “*total battle*” atau “*total campaign*”.

Dalam bahasa Inggris, perang total digunakan untuk merujuk “*guerre intégrale*” ala Perancis yang digunakan oleh Clemen-ceau, lebih daripada “*guerre totale*”. Meskipun kedua istilah tersebut hanya sedikit berbeda, namun penting terutama bila membandingkan penggunaan “*guerre totale*” oleh Daudet dalam serangkaian artikelnya. Sementara “*intégrale*” menekankan fakta tidak ada

batasan atau bahwa tidak ada penyusutan makna, “total” dalam bahasa Perancis menekankan dimasukkannya semua elemen atau orang ke dalam sebuah proses, seperti halnya kata dalam bahasa Inggris “total”. Tujuan Clemenceau adalah untuk menekankan fakta bahwa tidak akan ada batasan dalam caranya melakukan perang. Ia bertekad untuk memenangkan perang dengan biaya berapa pun. Ia menunjuk Ferdinand Foch (1851-1929) yang lebih agresif sebagai panglima baru Entente dan tidak mentolerir gagasan tentang perdamaian sebagai kompromi.

Di sisi lain, Daudet memiliki penekanan yang sedikit berbeda dan yakin bhw perlu bagi Perancis untuk memobilisasi semua sumber daya masyarakat industri untuk memenangkan perang: “Perang total adalah perpanjangan dari perjuangan (*struggle*) termasuk didalamnya segala sesuatu yg berkaitan seperti fase kronis dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, industri, kemampuan intelektual, yurisprudensi, dan dunia keuangan. Tidak hanya tentara yang bertarung dalam peperangan, tetapi juga tradisi (*traditions*), institusi (*institutions*), adat istiadat (*customs*), codes, pikiran (*minds*), dan perbankan.”

Definisi total war mungkin sebanyak tokoh yang terlibat dalam tiap tiap peperangan besar antar bangsa di dunia. Hal ini juga mungkin terjadi pada tiap tiap ilmuwan ahli di bidang penelitian perang akan membuat definisi perang total yang berbeda. Untuk mempersempit jumlah definisi perang total, berikut ini ditampilkan definisi dari tokoh tokoh terpilih.

1. Menurut *Montesquieu*

- a. Pria berperang bukan sebagai individu yang cenderung melakukan kekerasan tetapi karena mereka adalah makhluk sosial.
- b. Membunuh dalam perang adalah absolut dalam konsekuensinya seperti halnya membunuh, tetapi itu bukan hal yang sama.
- c. Manusia bisa lebih bermoral daripada komunitas di mana ia menjadi bagiannya.
- d. Manusia juga bisa kurang bermoral daripada komunitas;

bahkan pada masa perang beberapa tentara, meskipun diakui tidak semua, menghukum pembunuhan dan perkosaan yang dilakukan oleh pasukan mereka terhadap penduduk sipil musuh.

2. John Keegan

- a. Pertempuran dalam masyarakat primitif dan suku dalam beberapa kasus mungkin telah menjadi ritual.
- b. Tetapi ia juga memiliki potensi untuk totalitas - pengusiran (pengusiran) seluruh rakyat, penggabungan (penggabungan) wilayah mereka dan pembantaian atau perbudakan para penyintas.

3. James Turner Johnson

- a. Negara kebajikan, berdasarkan kebajikan dari kekuasaan organisasinya, membawa prinsip kontrol bahkan ke dalam pelaksanaan perang total.
- b. Total perang harus dipahami sebagai aktivitas politik yang rasional.
- c. Pertarungan total tidak dapat dipahami dalam pengertian 'kecenderungan sadis untuk membuat yang lemah menderita' atau 'hiruk-pikuk) yang akan mengalahkan akal'.
- d. Alih-alih itu mewujudkan gagasan bahwa ada nilai-nilai tertentu, yang dianggap sebagai nilai tertinggi, dalam membela yang individu dan negara harus dipersiapkan untuk bertarung tanpa pengawasan (pengamatan) pembatasan.

4. General Erich Ludendorff

“Apa yang membuat perang ini [WW I] berbeda dari yang lain adalah cara di mana penduduk setempat mendukung dan memperkuat angkatan bersenjata mereka dengan semua sumber daya yang mereka miliki. Dalam perang ini tidak mungkin untuk membedakan di mana lingkup (wilayah) Angkatan Darat dan Angkatan Laut dimulai dan bahwa orang-orang berakhir. Tentara dan rakyat adalah satu. Dunia menyaksikan Perang Bangsa-Bangsa dalam arti kata yang paling harfiah (harpa).”

5. Clausewitz

- a. 'Teori murni' - konsep serta konsep 'perang absolut' pada dasarnya merujuk pada tujuan peperangan.
 - b. Perang total memberi kesan bahwa ini adalah situasi di mana tujuan militer telah merdeka dan diubah menjadi tujuan yang lebih tinggi. Pembalikan (pembalikan) tujuan militer dan tujuan perang tampaknya menjadi kriteria yang menentukan untuk 'perang total'.
 - c. Perang: "tindakan memaksa untuk memaksa musuh kita melakukan kehendak kita,"
 - d. Tidak ada batasan logis untuk penerapan kekuatan itu.
 - e. Untuk memperkenalkan prinsip moderasi (tidak berlebihan) ke dalam teori perang itu sendiri akan selalu mengarah pada kemustahilan logis (kemustahilan).
6. Richard Preston dan Sydney Wise.
- a. "inti" pengajaran Clausewitz adalah bahwa perang modern cenderung menjadi "absolut" dan melibatkan "pemanfaatan penuh sumber daya moral dan material suatu bangsa untuk mewujudkan, dengan kekerasan, kehancuran total. sarana dan kemauan musuh untuk melawan ".
 - b. Berenice Carroll: perang 'absolut' adalah penggulingan total, atau bahkan kehancuran, dari seluruh negara musuh adalah objeknya, dan upaya tanpa batas serta kekerasan berarti ".
 - c. Jenderal Erich Ludendorff: Sejumlah asumsi tentang perang modern mencerminkan pengaruh Clausewitz. Mereka termasuk perlunya memperluas pertempuran ke seluruh wilayah musuh, daripada mengurungnya di medan perang; kebutuhan untuk melibatkan seluruh populasi dalam upaya perang; nilai propaganda; dan pentingnya otoritas pusat yang kuat.
7. Seché
- a. Era perang total telah dimulai pada Agustus 1793, dengan pembentukan wajib militer massal dan pembentukan pasukan nasional besar oleh pemerintah Prancis.
 - b. Size Ukuran tentara yang diperluas meningkatkan sejauh mana seluruh bangsa terlibat langsung dalam perang, dan

peningkatan skala peperangan memerlukan mobilisasi sumber daya ekonomi yang luas dari negara yang berperang (berperang).

- c. "Pembagian pasukan menjadi kombatan dan non-perang" menjadi "kuno" (kuno).
- d. Peran sains dan industri dalam membuat perang modern semakin destruktif.

8. Gil Elliot

Total perang adalah "berdasarkan dedikasi penuh dari energi suatu negara untuk memproduksi alat perang, dan kesiapan pasukan di lapangan untuk menghancurkan orang-orang dan bahan-bahan musuh sampai ke tingkat yang paling lengkap".

9. Arthur Marwick

- a. Nation Bangsa dalam persenjataan, perang ideologis, korban perang yang mengerikan, dan pemusnahan populasi sipil, di antara karakteristik utama dari total perang.
- b. Gagasan "bangsa dalam persenjataan" mengacu pada fakta bahwa banyak sumber daya ekonomi bangsa harus didedikasikan untuk upaya perang.
- c. Dampak perang akan terasa di seluruh masyarakat, daripada terbatas pada tentara atau sektor ekonomi yang relatif terbatas yang merancang dan membangun material perang.
- d. Nature Sifat ideologis dari perang total menyebabkan penggunaan propaganda yang meluas untuk mempertahankan moral prajurit dan
- e. dukungan warga sipil dengan cara menjelekkkan (setan) dan atau tidak memanusiaikan (bukan manusia) musuh.
- f. Pemfitnahan (pelecehan) musuh semacam itu membantu membenarkan fitur lain dari perang total - penghancuran psikologis dan etis terhadap pembantaian yang disengaja terhadap tentara musuh dan warga sipil musuh.
- g. Dengan memerlukan sentralisasi dan konsentrasi otoritas dan kekuasaan pemerintah yang tinggi yang berlawanan (berlawanan) dengan ciri-ciri esensial demokrasi, terlibat dalam perang total cenderung mengaburkan perbedaan

politik, militer, dan moral antara negara-negara demokratis dan totaliter.

- h. Perang total menyiratkan gangguan dan kehancuran dalam skala luas dan belum pernah terjadi sebelumnya; pengujian struktur sosial dan politik yang ada dari negara dan masyarakat; partisipasi, dalam konteks total mobilisasi sumber daya negara, dari kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang beruntung dalam upaya perang; dan, terakhir, pengalaman psikologis 'raksasa (raksasa)'.
 - i. Efek kumulatifnya adalah perubahan sosial yang nyata dan bertahan lama.

10. Markusen and Kopf

- a. Tidak ada perang baru-baru ini, bahkan Perang Dunia I dan II, telah sepenuhnya "total" dalam arti bahwa semua sumber daya yang tersedia dari negara-negara pejuang telah dikhususkan untuk konflik atau bahwa kehancuran bangsa musuh telah lengkap.
- b. WW II: Jerman menginvestasikan "hanya" 55 persen sumber daya ekonominya dalam upaya perang, dan Amerika Serikat tidak pernah mengikat lebih dari 45 persen produk nasional brutonya untuk perang.
- c. Feature Ciri pembeda utama perang total adalah serangan (penyerangan) terhadap warga sipil, baik sebagai hasil sampingan yang tidak disengaja dari pertempuran antara tentara atau sebagai kebijakan yang disengaja.
- d. Proportion Proporsi warga sipil yang terluka dan terbunuh dalam perang abad ke-20 terus meningkat dari waktu ke waktu: dalam Perang Dunia I, hanya 5 persen dari kematian adalah warga sipil; oleh Perang Dunia II warga sipil merupakan 66 persen dari kematian; dan dalam perang sejak tahun 1970-an, warga sipil telah menyumbang 80 persen atau lebih dari jumlah kematian.

11. J. F. C. Fuller

- a. 'Perang totaliter', bukan 'perang total'.
- b. Total 'Totaliterisme dalam perang berarti bahwa ketika

perang dimulai semua kehidupan pribadi berakhir, dan bangsa hanya memiliki satu keprihatinan - perang'.

2.2 Analytical Dimensions Of Total War

1. *Aims of war The American Civil War:*
 - a. Konfederasi diakui berjuang untuk tujuan yang terbatas, sejauh yang diinginkannya hanya untuk mendapatkan kemerdekaan.
 - b. Davis Jefferson Davis: "Yang kami minta adalah dibiarkan sendiri."
 - c. Lincoln: "Karakter perang akan diubah. Itu akan menjadi penaklukan (penaklukan) ... Selatan akan dihancurkan dan digantikan oleh proposisi dan gagasan baru."
 - d. Term Istilah "penyerahan tanpa syarat" sekarang menggambarkan dengan baik upaya perang Uni.
2. World War II:
 - a. Tujuan tanpa batas adalah fitur yang lebih menonjol.
 - b. Jerman berencana menghancurkan Uni Soviet dan memperbudak atau memberantas populasi wilayah yang ditaklukkan.
 - c. Churchill dan Roosevelt: penyerahan tanpa syarat sebagai tujuan perang mereka melawan Axis.
 - d. Perang Perancis-Jerman: Moltke menuntut pendudukan dan penaklukan penuh atas Perancis.
 - e. Kedua kasus menyatakan bahwa radikalisasi tujuan perang menjadi fitur perang di era industri.
 - f. Radikalisasi perang bertujuan mencerminkan perubahan sikap negara-negara yang berperang satu sama lain. Para pemimpin politik dan militer, serta sebagian besar masyarakat mereka, cenderung menganggap musuh mereka sebagai ancaman terhadap keberadaan mereka.
3. Japan's World War II
 - a. Tempat sentral Cina dalam upaya perang berarti bahwa bagi Jepang, Perang Dunia II sebagian besar adalah perang kolonial.

- b. Upaya perang didominasi oleh kekhawatiran kolonial menaklukkan populasi asing, melembagakan rezim pengambilalihan ekonomi (perampasan) dan mekanisme kontrol sosial.
 - c. Sifat perang kolonial mempengaruhi mekanisme mobilisasi digaris depan dan dampak perang metropolitan.
 - d. Sumber daya budaya, demografis, dan ekonomi ditargetkan untuk mobilisasi.
 - e. Tujuan perang diartikulasikan dalam hal tujuan kekaisaran dan ideologi kekaisaran yang dikerahkan sebagai seruan untuk memobilisasi badan sosial di balik upaya perang.
 - f. Perang Dunia II di Asia pada dasarnya adalah perang kerajaan; apa yang akan menjadi mobilisasi massa dan multidimensional dari front rumah mengisyaratkan pembangunan kerajaan total seperti halnya perang total.
4. *Methods of War*
- a. Orang-orang yang berperang di dunia perang abad ke-20 mengabaikan konvensi perang.
 - b. Peperangan kapal selam Jerman merupakan pelanggaran hukum internasional yang menyolok.
 - c. Begitu pula taktik pengeboman udara, bumi hangus, dan penggunaan (oleh Jepang) senjata kimia dan biologi dalam Perang Dunia II.
 - d. Beberapa pelanggaran terburuk menimpa tawanan perang.
5. *The Creation of Mass Armies*
- a. Dalam Perang Sipil Amerika dan Perang Perancis-Jerman, kekuatan-kekuatan yang berperang menempatkan ratusan ribu tentara ke medan perang.
 - b. Dalam dua perang dunia, pasukan yang bertanding diperhitungkan dalam puluhan juta.
 - c. Semua kekuatan ini dapat dipindahkan, diperlengkapi, dan disediakan hanya dengan sarana industri.
 - d. Menjaga tentara massa di bawah kendali dan dalam semangat juang juga merupakan prestasi organisasi.
 - e. Besarnya kekuatan ini membuat sulit untuk mengalahkan

mereka. Selain itu, jutaan tentara itu menikmati dukungan. Penuh semangat dari masyarakat mereka, jika saja karena keluarga memiliki ayah, anak laki-laki, suami, dan kerabat laki-laki lainnya di ladang.

- f. Mengalahkan tentara dengan demikian semakin menyiratkan mengalahkan masyarakat yang mendukung mereka.
 - g. Namun, selama Perang Revolusi Prancis, perbedaan antara kombatan dan non-kombatan pecah.
 - h. Clausewitz: "Tiba-tiba perang kembali menjadi urusan orang-orang — tiga puluh juta orang, yang semuanya menganggap diri mereka sebagai warga negara."
 - i. Tetapi antusiasme massa tampaknya tidak cukup; itu harus diatur. Karenanya rezim Jacobin memperkenalkan wajib militer untuk laki-laki antara 18 dan 25.
 - j. Semua warga negara lain juga dipanggil untuk bergabung dalam upaya perang. Laki-laki yang sudah menikah harus menghasilkan senjata, perempuan untuk menghasilkan pakaian dan tenda, anak-anak harus membuat perban, dan orang tua berkumpul di tempat-tempat umum untuk menggalang semangat.
 - k. Ide mobilisasi total negara dan masyarakat untuk perang lahir.
6. *Total Control*
- a. Mobilisasi total dalam masyarakat maju menyiratkan perlunya organisasi total. Perlawanan harus dihancurkan. Antusiasme sipil harus dipertahankan oleh propaganda.
 - b. Pasokan tenaga militer harus diatur dalam wajib militer.
 - c. Perang total menyiratkan kontrol pemerintah terpusat atas hampir setiap fase kehidupan.
 - d. Kontrol semacam itu mustahil dicapai. Orang-orang Jacobin mencoba melakukannya dengan cara teror, dan mereka gagal.
 - e. Selama Perang Saudara Amerika kedua belah pihak menggunakan paksaan serta propaganda untuk menggalang

- warga mereka.
- f. Sensor, penangkapan sewenang-wenang, dan wajib militer adalah bagian penting dari upaya ini, tetapi hasilnya beragam.
 - g. Kontrol kelembagaan masyarakat lebih menonjol dan efektif dalam perang dunia.
 - h. Wajib militer menjadi peraturan, bahkan di Inggris setelah 1916.
 - i. Sensor dan propaganda adalah kebutuhan pokok dari perang ini.
 - j. Selama Perang Dunia II, teror menjadi praktik standar di Jerman Nazi dan Uni Soviet. Upaya untuk mengendalikan ekonomi juga menjadi bagian dari kisah ini.
 - k. Uni Soviet membentuk ekonomi komando pada 1930-an, dan hasilnya tampak seperti upaya untuk melembagakan ekonomi perang total pada masa damai. Setidaknya dalam hal ini, transisi ke perang relatif lancar di Uni Soviet.

2.3 Nuclear War vs Total War

1. Nuclear Strategy

- a. Apakah revolusi termonuklir tidak terhindarkan (tak terhindarkan)? Jika teknik perang baru dapat masuk akal membatasi penghancuran perang atom, mengapa teknik serupa tidak dapat melakukan hal yang sama untuk perang termonuklir?
- b. Pada 1950-an dan awal 1960-an, lusinan akademisi paling cemerlang di Amerika Serikat mendedikasikan diri mereka untuk menemukan cara melarikan diri dari dilema: strategi untuk memenangkan perang nuklir.

2. Robert Jervis

- a. Strategi nuklir tidak dapat bekerja.
- b. Begitu kedua belah pihak memperoleh gudang persenjataan rudal balas dendam yang kebal - persenjataan yang tidak bisa dihancurkan dengan serangan preemptive - menjadi sangat sulit untuk melihat bagaimana perang antara kedua

kekuatan dapat dicegah agar tidak meningkat menjadi perang nuklir total.

2 Nuclear War Between Superpowers

- a. Sekalipun kedua adikuasa itu entah bagaimana dapat menghindari mengobarkan (total) perang nuklir sejak awal, dengan memulai perang mereka secara terbatas, pertanyaan tentang bagaimana perang akan berakhir sebelum naik menjadi perang total adalah sulit untuk menjawab.
- b. Menurut definisi, agar salah satu pihak memenangkan perang dalam arti yang berarti, pihak lain harus menyerah tanpa meluncurkan persenjataan yang kebal.
- c. Dengan kata lain, agar perang nuklir tetap terbatas - dapat dimenangkan - satu pihak harus menerima kekalahan sementara itu masih memiliki kemampuan militer untuk menghancurkan lawannya dengan mudah.
- d. Dalam dunia suram dari perang nuklir besar konvensional atau terbatas antara negara-negara adikuasa, satu pihak harus dapat melihat bahwa ia kehilangan perang, memerintahkan pasukannya, dan / atau komandan pangkalan misilnya, untuk berhenti menembak, dan terima kekalahan di tangan saingannya: sambil mampu menghancurkan musuh sepenuhnya dengan pergantian beberapa kunci.
- e. Ini menentang imajinasi untuk melihat ini terjadi di tengah-tengah Perang Dunia Ketiga - dan juga tampaknya tidak mungkin pihak yang menang, dalam bisnis tegang untuk menegosiasikan penyerahan musuh yang masih mampu menghancurkan Anda sepenuhnya, akan merasa mudah untuk berhenti berkelahi juga.

2.4 Kepemimpinan dalam Perang Total

1. Ludendorff

- a. Dalam menyelesaikan sekali dan untuk semua polaritas (hubungan) antara militer dan otoritas politik, perang total menuntut "panglima perang di puncak," prajurit hebat yang

tanggung jawab dan kekuasaannya meluas ke setiap fase penuntutan perang.

- b. Otoritas Penuh
 - 1) Untuk itu diperlukan supervisi pemimpin militer atas "menteri perang, kepala administrasi militer, dan kanselir" Leiter der Politik".
 - 2) Pemimpin ini adalah sosok yang kesepian, lahir dari peran seorang jenius kreatif, yang bisa "membaca jiwa" dari semua yang dipercayakan kepada kepemimpinannya. Miliknya adalah kekuatan komando atas semua prajurit dan warga sipil.
- c. Tanggung Jawab Pemimpin. Di atasnya terbentang beban berat untuk berolahraga, "dalam rasa tanggung jawab tertinggi, kekuatan formatif (kemauan) dan kehendak atas tentara dan rakyat dan setiap orang Jerman dalam komitmen tertinggi dari semangat, jiwa, dan hati mereka." Oleh karena itu, setiap segi dari upaya perang membutuhkan eksekusi mahakuasa, kehendak serba bisa, yang diwujudkan dalam prajurit terkemuka bangsa.

2.5 Perang Total dan Bela Diri

1. Sumber Daya

- a. Prinsip-prinsip penentuan nasib sendiri dan pertahanan diri dapat memberi mereka ideologi dan hak hukum untuk berperang total, tetapi mereka tidak memiliki sumber daya untuk melakukannya.
- b. Baik Irak pada tahun 1991 maupun Serbia pada tahun 1999 tidak dapat menyerang Amerika Serikat; juga pada tahun 1982 Argentina tidak berperang atas Falklands ke daratan Inggris.
- c. Angkatan bersenjata negara Skotlandia mungkin berjumlah paling banyak 20.000 orang. Jumlah yang diabaikan seperti itu, bahkan jika dilengkapi dengan senjata pintar, mungkin tidak akan cukup untuk mempertahankan pertahanan diri nasional.

2. Mempromosikan Total Pertahanan

- a. Dalam menempa identitas mereka sendiri, mereka mengandalkan kombatan yang bukan anggota angkatan bersenjata yang berseragam, dan karenanya melanggar prinsip kekebalan non-kombatan. Fakta bahwa lebih dari 90 persen korban di dunia dalam konflik antara 1995 dan 1999 dapat digolongkan sebagai warga sipil dapat mengatakan sebanyak mungkin tentang penggunaan kombatan yang tidak berseragam seperti tentang pembunuhan yang disengaja terhadap orang tak berdosa yang tidak berperang.
- b. Negara yang baru dibentuk dapat menghadapi kesulitan dalam mensubordinasikan angkatan bersenjata mereka sendiri, yang mungkin cenderung untuk mencari konflik internasional, paling tidak untuk melegitimasi status politik domestik mereka sendiri. Jika kita mengikuti Clausewitz (dan Ludendorff), perang seperti itu tidak mungkin tunduk pada pembatasan yang dilakukan oleh tujuan politik yang jelas.
- c. Negara yang secara ekonomi lemah, jika berperang, harus meradikalisasi tujuannya untuk memobilisasi semua sumber dayanya. Pada tahun 1995 satu dari dua negara di dunia memiliki populasi kurang dari 7 juta dan PNB (produk nasional bruto) kurang dari \$ 10 miliar, setara dengan ekonomi Luxemburg.

2.6 Perang Total vs Perang Modern

1. Perang total tidak harus modern, dan perang modern tidak perlu total. Mobilisasi ekonomi menunjukkan perbedaan itu.
2. Pejuang yang lebih terbelakang secara ekonomi harus melakukan upaya yang lebih besar untuk memobilisasi masyarakatnya untuk melibatkan lawan yang lebih maju dan lebih maju dalam industri yang setara.
3. Dengan kata lain, perang total adalah pilihan yang lebih mungkin dilakukan oleh negara yang kurang modern. Dengan cara yang sama, negara yang lebih maju akan terlibat dalam perang yang

tentu saja modern tetapi mungkin tidak total.

4. Perang Sipil Amerika menyatakan hal ini dengan tepat. Uni menghabiskan 74,4 persen dari output 1859 selama empat tahun perang, sementara Konfederasi menghabiskan lebih dari seluruh nilai output 1859.

RANGKUMAN

1. Perang total adalah perpanjangan dari perjuangan (*struggle*) termasuk didalamnya segala sesuatu yg berkaitan seperti fase kronis dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, industri, kemampuan intelektual, yurisprudensi, dan dunia keuangan. Tidak hanya tentara yang bertarung dalam peperangan, tetapi juga tradisi (*traditions*), institusi (*institutions*), adat istiadat (*customs*), codes, pikiran (*minds*), dan perbankan.”
2. Dimensi perang total dapat dianalisis melalui perspektif: *Aims of war The American Civil War, World War II, Japan's World War II, Methods of War, The Creation of Mass Armies, dan Total Control.*
3. *Antara Nuclear War* dengan *Total War* memiliki dimensi yang berbeda dan bertolak belakang.
4. *Perang total merupakan salah satu strategi dalam rangka upaya membela diri guna mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara.*
5. Kepemimpinan dalam perang total sangat menentukan kemenangan dalam peperangan.
6. Perang total tidak harus modern, dan perang modern tidak perlu total. Mobilisasi ekonomi menunjukkan perbedaan itu.

BAGIAN 3
SEJARAH PERANG
SEMESTA DI INDONESIA



SEJARAH PERANG SEMESTA DI INDONESIA

Pada Bagian 3 yang membahas tentang Sejarah Perang Semesta di Indonesia, didalamnya diuraikan sub pembahasan tentang: keterlibatan Amerika Serikat dalam perang kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa peristiwa penting yang terjadi pada pasca perang kemerdekaan, kepemimpinan Panglima Besar Jenderal Soedirman, kumpulan prinsip-prinsip hidup Panglima Besar Jenderal Soedirman yang sarat dengan nilai-nilai penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

3.1 Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Perang Kemerdekaan RI

Perang kemerdekaan Republik Indonesia merupakan gelaran ajang nyata dari perang semesta. Sejarah perang kemerdekaan tidak lepas dari pengaruh Amerika Serikat (AS) dengan sekutunya yang mendukung Belanda untuk bisa bercokol menjajah Indonesia kembali. Pandangan pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1941 menegaskan:

1. Kepulauan Philipina, Hindia Belanda dan Malaya memiliki sumber-sumber utama bahan-bahan baku (*natural Resources*) yang penting bagi AS, baik pada masa damai maupun masa perang. Karena itu penguasaan atas daerah-daerah ini (geographic setting) oleh kekuatan potensial yang bermusuhan akan sangat membatasi kemerdekaan gerak kita.
2. Menlu AS mengingatkan; Intervensi dalam urusan dalam negeri Hindia Belanda atau setiap perubahan terhadap status quo dengan cara-cara tidak damai akan merugikan upaya stabilitas, perdamaian dan keamanan, tidak saja di kawasan Hindia Belanda tetapi juga seluruh wilayah Asia Pasifik
3. Perjanjian Douglas Mc Arthur dengan Van Mook. Sebelum perang

Asia Pasifik meletus (7 desember 1941). Pada tahun 1940, seperti ekspor Hindia Belanda mengalir ke USA. Pada bulan Januari 1941 sampai bulan Juni 1941, ekspor USA ke Hindia Belanda bernilai US\$ 49.724.000 sedangkan impor US\$ 96.896.000. Nilai ini 10% lebih tinggi dari nilai seluruh perdagangan tahun 1939, bahkan 50% lebih tinggi dibanding tahun 1938. Jadi pihak AS merasa ikut bertanggungjawab atas segala perjanjian maupun perencanaan di Hindia Belanda. USA tetap mengakui kedaulatan Belanda atas Hindia Belanda. Dengan demikian seluruh strategi dan taktik mereka rundingkan bersama. Hal tersebut tercermin dengan ditandatanganinya perjanjian antara Jenderal Douglas Mc Arthur panglima SWPAC dengan Letnan Gubernur Jenderal Van Mook pada tanggal 10 Desember 1944. Pada perjanjian tersebut ditetapkan bahwa: Para pejabat Belanda dapat berkuasa kembali di Irian Barat dan pulau-pulau disekitarnya setelah daerah tersebut berhasil direbut oleh pasukan sekutu. Untuk maksud tersebut Mc Arthur membelah geografi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian yaitu:

- a. Wilayah Sulawesi, Maluku dan Irian digabungkan dengan Philipina yang di kontrol oleh USA
 - b. Wilayah Kalimantan dan Sumatera digabung dengan Malaya, Singapura dan Kalimantan Utara yang dikontrol oleh Inggris
 - c. Wilayah Jawa yang tetap dibiarkan berdiri sendiri.
4. Perjanjian tersebut batal karena dalam konferensi Malta, bulan Februari 1945 disepakati bahwa USA akan memusatkan perhatian untuk ofensif langsung ke Philipina, terus ke utara melalui China. Karena itu rencana semula Mc. Arthur memimpin serangan pasukan AS ke pulau Jawa dan Irian melalui Kalimantan pada bulan Juni 1945 dibatalkan.
 5. Dalam konferensi Postdam di Berlin pada bulan Juli 1945 ditetapkan bahwa Hindia Belanda menjadi tanggungjawab penuh militer Inggris BSEAC dpp Laksamana Lord Mount Batten, yang bermarkas di Colombo, Srilanka. Pembatalan tersebut dilakukan oleh Presiden Harry S. Truman yang menggantikan Presiden Franklin Delano Rosevelt. Sementara itu Mc Arthur juga

menyatakan kekecewaannya ketika ia tahu hal tersebut “sekutu-sekutu AS mengerahkan pasukan Jepang untuk menguasai kembali Indonesia yang telah kita janjikan untuk diberi kebebasan”.

Berdasarkan laporan intelijen menjelang Proklamasi Kemerdekaan bahwa menjelang akhir bulan Agustus 1945. OSS yang merupakan cikal bakal CIA mencek instruksi yang diberikan pimpinan Belanda yang ditujukan kepada para Komandan pasukan pendudukan Jepang untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia, mereka dilucuti dan dikembalikan ke Jepang.

Menurut pejabat OSS secara resmi Jepang adalah musuh Sekutu yang telah menyerah kalah tanpa syarat, mengapa tetap diberi kesempatan untuk memelihara “satus quo”. Kondisi tersebut sebenarnya merupakan suatu Paradox. Sekutu merencanakan untuk mengadili para penjahat perang Jepang dan para kolaborator Indonesia, termasuk Soekarno. Namun penilaian OSS berbeda dengan mensitir pidato pembelaan Soekarno disidang pengadilan atas dirinya di Bandung tahun 1931. Menurut OSS akan terjadi kekisruhan politik jika perkara Soekarno tidak disidangkan secara tertutup. OSS menyarankan penguasa kolonial perlu memilih sejumlah orang Indonesia terpercaya dan beberapa kolaborator dan memberikan kekuasaan interim. Nampak USA tidak menduga bahwa kaum nasionalis Indonesia akan mengangkat senjata untuk menentang setiap bentuk penjajahan. Mereka melaporkan semangat nasionalisme yang menyala-nyala sejak Belanda menyerah kepada Jepang. Tuntutan bangsa Indonesia sudah bulat, merdeka 100%, tidak bisa kurang apalagi ditawar.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta. Melihat kenyataan tersebut terdapat beberapa sikap AS, Paska Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diperlihatkan, antara lain:

1. Mr. Hugh S Cumming, kepala urusan Eropa Utara Deplu AS, menggambarkan bahwa AS tidak menduga bahwa pejuang kemerdekaan Indonesia akan berjuang samapai titik darah penghabisan. Rupanya pejabat AS kaget akan lemahnya data

intelijen dari pejabat Belanda yang tidak aktual, bahkan Ratu Wilhelmina tidak pernah sama sekali hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Indonesia.

2. Dengan takluknya Jepang kepada Sekutu tanggal 15 Agustus 1945, maka kawasan Asia Tenggara yang semula dibawah South West Pacific Area Command (SWPAC) yang dipimpin Jenderal Doughlas Mc. Arthur digeser dibawah komando British South East Asia Command (BSEAC) app Lord Mountbatten, guna mengamankan kepentingan Inggris di daerah jajahannya di Malaysia dan Singapura.
3. Perubahan ini tidak pernah diberitahukan kepada pemerintah Belanda seperti terlihat dalam penyesalan oleh Dubes Belanda di Washington DC ketika bertemu dengan wakil Menlu AS Dean Acheson tanggal 10 Oktober 1945. Penyesalan juga dilakukan Letnan Gubernur Hindia Belanda Van Mook kepada Lord Mountbatten yang menolak permintaan Van Mook yang melarang pengakuan terhadap lahirnya negara dan Pemri.
4. Sesuai dengan mandat BSEAC, Lord Mouthbatten berpendapat, ia hanya bertanggungjawab dalam soal militer saja. Maka setelah tanggal 25 September 1945, para komandannya berhubungan langsung dengan para pejabat RI. Pada awalnya semua berjalan dengan baik, tetapi kemudian muncul prasangka bahwa kedatangan Inggris membantu Belanda kembali ke Indonesia dan muncullah pertempuran hebat di Surabaya tanggal 10 November 1945 karena tindakan tentara Inggris yang tidak peka.
5. Setelah proklamasi kemerdekaan pihak AS berusaha menghilangkan kesan terlibat mendukung Belanda a.d nampak dalam memorandum rahasia Menlu AS James Boyne yang memerintahkan menghilangkan tanda-tanda militer AS yang digunakan Belanda. Karena tidak efektif Menlu AS mengirim memorandum pelarangan pemberian senjata kepada Belanda untuk dipakai di Indonesia.
6. Kebijakan AS di Indonesia tidak muncul begitu saja, tetapi didesak perubahan paska PD II, yaitu munculnya perang dingin yaitu Uni Sovyet yang semula sekutu AS berubah menjadi musuh

nomor satu dengan Fakta Warsawanya. Menlu AS merubah sikap terhadap Jerman yang semula musuhnya menjadi sekutu utama karena Jerman Timur sudah diduduki Uni Sovyet. Demikian pula Jepang yang semula musuh yang takluk berubah menjadi sekutu.

7. Untuk memberikan pemahaman tentang Perang Dingin, penulis the international Relations Dictionary (Jack C Plano dan Roy Otton) memberikan pengertian sbb: "Perang Dingin (Cold War) adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai manifestasi dari konflik-konflik kepentingan, supremasi kekuasaan pengendalian sumber-sumber alam dan lain-lain, antara Blok Barat dan Blok Timur sesudah Perang Dunia II. Ciri-ciri perang dingin antara lain berbentuk; Manufer politik, diplomatic Wrangking, psychological warfare periferi, perang propaganda, hingga pertarungan spionase dan intelijen. Bagaimanapun sengit dan gencarnya permusuhan 2 kubu, namun masing-masing pihak berusaha menghindari kemungkinan terjadinya konfrontasi fisik yang dapat menyulut terjadinya perang terbuka dan dikhawatirkan menimbulkan kehancuran global. Karena itu perkembangan senjata pamungkas hanyalah digunakan sebagai untuk deterrence. Muncul berbagai istilah a.l *Balance of power*, *Containment policy*, *Bipolarity System*, dan lain lain.

3.2 Beberapa Peristiwa Penting Pasca Kemerdekaan

Beberapa peristiwa penting yang menandai hasil diplomasi pasca kemerdekaan RI terkait dengan pengembalian kekuasaan Belanda oleh Sekutu, antara lain:

1. Perjanjian Linggar Jati dan Agresi Militer Belanda I
 - a. Masalah penafsiran perjanjian: Gendar merie.
 - b. Kabinet parlementer ke 4: Blokade ekonomi dan tekanan militer.
 - c. Agresi militer Belanda I.
 - d. Containment policy dan perjanjian Linggarjati.
 - e. Containment policy dan agresi militer I.
 - f. Keterlibatan Australia dalam perjanjian Hoge Veluwe dan perjanjian Linggarjati.

- g. Perkembangan politik akibat dilancarkan agresi militer I.
 - h. Masalah Indonesia di PBB: perdebatan di DK PBB.
 - i. Jenderal Spoor menggunakan peran intelijen.
 - j. Doktrin Truman: Produk hasil operasi intelijen (teori Domino).
2. Pemberontakan PKI Madiun 1948 dan Tampilnya Gerakan DI/TII 1949-1962.
- a. Konstelasi politik nasional dan internasional: jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin.
 - b. Profokasi dan Agitasi kaum kiri.
 - c. Konstelasi politik internasional Uni Sovyet dan kepentingan global.
 - d. Strategi komunisme internasional.
 - e. Tumbuh dan berkembangnya komunisme di Indonesia.
 - f. Situasi sebelum terjadinya pemberontakan komunis.
 - g. Antisipasi serangan Belanda dan ancaman radikalisme politik PKI.
 - h. Peran Muso dalam pemberontakan PKI-Madiun.
 - i. Operasi penumpasan pemberontakan PKI-Madiun.
 - j. Siapa Muso sebenarnya.
 - k. Tanggapan dan sikap Amerika Serikat.
 - l. Menjala di Air Keruh: Belanda siap melancarkan Agresi Militer II, segera setelah pemberontakan PKI – Madiun.
 - m. CIA dan penghancuran komunisme PKI.
 - n. Analisa tentang kegagalan pemberontakan PKI-Madiun.
 - o. Kontropersi dan Persepsi.
 - p. Gerakan separatis DI/TII.
 - q. Keterlibatan unsur asing dalam gerakan DI/TII.
 - r. Penumpasan gerakan DI/TII.
 - s. Siapakah SM Kartosuwiryo.
 - t. Mengapa harus memberontak.
3. Perjanjian Renville dan Agresi Militer Belanda II Doorstoot Naar Jogyakarta (1948).
- a. Kepentingan dan kebijakan Amerika Serikat.
 - b. Rencana Du Bois – Chritchley.

- c. Petunjuk dan persiapan akan dilakukannya agresi militer II.
 - d. Saat-saat menjelang agresi militer II.
 - e. Soorstoot Naar Jogjakarta.
 - f. Pemerintah darurat.
 - g. Fluistercampagne.
 - h. Raja yang progresif, demokrat dan kharismatik.
 - i. Yogyakarta: Ibukota Republik perjuangan.
 - j. Penjaga gawang republik : Serangan Umum 1 Maret 1949.
 - k. Antisipasi militer menghadapi agresi militer II.
 - l. Politisi : Diplomasi, TNI, Gerilya.
 - m. “Ermattungskrieg: Jenderal Soedirman versus “Vermattungskrieg” : Jenderal Spoor.
 - n. TNI dan rakyat, bersatu padu menyerang Belanda.
4. Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Terbentuknya Negara RIS yang Kemudian Menjadi RI (1949-1950).
- a. Ide dasar Serangan Umum : 1 Maret 1949.
 - b. Persiapan dan pelaksanaan serangan umum.
 - c. Dampak serangan umum (internasional dan nasional).
 - d. Persetujuan Roem-Royen.
 - e. Yogya kembali.
 - f. Konferensi Meja Bundar (KMB).
 - g. Penyerahan dan pengakuan kedaulatan.
 - h. Kabinet “Republik Indonesia Jogya” (1949-1950).
 - i. Kabinet Negara Kesatuan Republik Indonesia (1950-1956).

3.3 Kepemimpinan Jenderal Besar Soedirman

3.3.1 Pandangan Hidup Jenderal Soedirman

Herbert Feith memandang Jenderal Soedirman sebagai seorang pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk menggalang kesetiakawanan bagi setiap orang agar memiliki jiwa integratif, Beliau mampu menegakkan kultur, manipulasi simbol dan mengelola organisasi. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang mampu menggalang persatuan di kalangan tentara dan yang paling mengesankan adalah integritas dan kejujuran yang tinggi.

Piere Heijboer memandang sosok Jenderal Soedirman sebagai anggota sukarela PETA yang juga berprofesi sebagai seorang guru sekolah agama Islam, dengan sosok pribadi yang teguh dalam pengabdian. Ia menganggap pengangkatannya sebagai Panglima itu sebagai tugas suci dan beliau bertindak sesuai dengan anggapannya. Selain itu rupanya pikiran yang selama ini menghantuinya ialah kenyataannya bahwa ia memimpin suatu tentara dan akibat perlengkapannya serta persenjataan yang seadanya, maka banyak jiwa para pemuda yang melayang yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Dengan kesungguhan yang sangat berhati-hati Jenderal Soedirman berhasil membina hubungannya dengan pemerintahan dengan baik, disisi lain juga berhasil membuat dirinya sebagai unsur pemersatu yang sangat dibutuhkan oleh prajurit TNI pada waktu itu dan berguna untuk masa-masa yang akan datang.

Jenderal Soedirman memiliki Pandangan Jawa Laku Hidup Sejati, sebagai berikut:

1. Ngluruk tanpa bala, Menang tanpa ngasorake, Sekti tanpa aji-aji, Sugih tanpa banda.
2. Datan serik lamun ketaman, Datan susah lamun kelangan.
3. Sepi ing pamrih, Rame ing gawe, Banter tan mbancangi, Duwur tan ngungkuli.
4. Aja gumunan aja getunan, aja kagetan aja aleman.
5. Aja ketangkal marang kalungguhan kadoyan lan kamareman.
6. Aja kuminter mendak keblinger, Aja cidra mundak cilaka, Sing was- was tiwas.
7. Aja milik barang kan melok, Aja mangro mundak kendo.
8. Aja Adigang, Adigung, Adiguna.
9. Sing sabar lan ngalah dadi kekasih Allah.
10. Sing prihatin bakal mimpin.
11. Sing resik uripe bakal mulya.
12. Urip iku urup.
13. Sura dira Jayadiningrat, lebur dining Pangastuti.

3.3.2 Kumpulan Prinsip-Prinsip Yang Paling Penting dari Filsafat Panglima Besar Jenderal Sudirman

Dalam buku yang diterbitkan oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI 1970, pada Bab I tentang Kami Tidak Akan Menerima Imperialisme Belanda Lagi, Jenderal Sudirman, Panglima Tentara Rakyat Indonesia (TRI) telah mempersiapkan semua lapisan masyarakat Indonesia untuk menghadapi setiap kemungkinan.

Kutipan:

Kami mengakui secara terbuka bahwa kami tidak memiliki kekuatan pada senjata yang kami miliki. Namun, situasi ini tidak menghalangi kami atau mengurangi tekad kami untuk membela negara. Justru karena keadaan kita berbeda, metode yang akan kita gunakan untuk mempertahankan negara kita akan menggunakan taktik dan strategi yang berbeda berdasarkan apa yang kita miliki saat ini (halaman 8) Jogjakarta, 17 Desember 1946.

Pada Bab VII tentang Bukan Kemungkinan Lagi, menampilkan fakta bahwa Belanda ternyata menerapkan Rencana B. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kembali apa yang sudah ada di tangan musuh.

Kutipan:

1. *Percaya pada dirimu sendiri. Jangan menunggu bantuan dan bantuan dari luar negeri.*
2. *Melanjutkan perjuangan ini. Kami berharap tidak menemukan seorang pun di antara kami yang mengalami kesulitan.*
3. *Mempertahankan pekarangan dan rumah kita dengan sekuat tenaga. Dapatkan kembali apa yang dipegang oleh musuh.*
4. *Kami tidak ingin orang di antara kami yang merasa ingin menyerah. Menyerah berarti mengkhianati saudara-saudari kita dan orang-orang yang dengan sepenuh hati mengorbankan diri mereka untuk Tanah Air.*
5. *Jaga disiplin Angkatan Darat secara fisik dan spiritual*

(halaman 16).

Ya Tuhan, alam di Indonesia secara geografis menyediakan senjata yang sangat kuat, senjata yang sangat tajam, untuk melakukan pertempuran dalam bentuk apa pun. Percayalah dan pastikan bahwa kita semua cukup kuat dan mampu melakukan pertempuran apa pun dan dalam skala besar dengan peralatan yang kita miliki (halaman 17). Jogjakarta, 11 June 1946.

Pada Bab VIII tentang Jangan Khawatir Menghadapi Tentara Belanda, Lakukan yang Terbaik di Medan Perang, menampilkan pidato yang berapi-api dari Panglima Tertinggi, guna menanggapi kejajaman pasukan Belanda di Bogor dan tempat-tempat lain.

Kutipan:

Kebenaran tentang kekuatan pasukan Belanda, yang cukup merusak, adalah sesuatu yang tidak dapat kita terima sama sekali. Tidaklah cukup hanya berurusan dengan itu dengan memutuskan itu adalah keuntungan atau kerugian. Juga tidak cukup untuk menghadapinya dengan bernegosiasi atau dengan protes langsung. Kebenaran harus diatasi, dan kita juga harus menghadapinya dengan kebenaran (halaman 25).

*Quoted by the AL-DJIHAD newspaper, No 227 1st year, 27 December 1946.

Pada Bab X tentang Masing-Masing dan Setiap Orang dari Anda Kembali ke Tempat Tugas Anda, menegaskan perintah dari Panglima Besar Sudirman kepada semua anggota Angkatan Bersenjata, pejuang kemerdekaan dan penjaga belakang.

Kutipan:

Berpegang teguh pada persatuan. Jangan ragu-ragu. Tetap berhati-hati, waspada dan berhati-hati. Ayahmu selalu bersama kalian semua (halaman 27). Yogyakarta, 25 May 1947.

RANGKUMAN

1. Amerika Serikat memiliki keterlibatan yang erat dalam upaya mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Belanda pada akhirnya membonceng Pasukan Sekutu dibawah kepemimpinan AS.
2. Terdapat beberapa peristiwa penting yang mewarnai sejarah pasca kemerdekaan RI, antara lain: Perjanjian Linggarjati, Agresi Belanda I, Agresi Belanda II, Pemberontakan PKI di Madiun, Pemberontakan DI/TII, dan Perjanjian Renville.
3. Panglima Besar Jenderal Soedirman penuh dedikasi dan pengorbanan dalam menjalankan tugas mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Perilaku Panglima Jenderal Soedirman penuh dengan nilai-nilai luhur yang patut menjadi tauladan bagi seluruh rakyat Indonesia.

BAB 4
PERANG SEMESTA DAN
HUKUM INTERNASIONAL



PERANG SEMESTA DAN HUKUM INTERNASIONAL

Pada Bagian 4 membahas tentang Perang Semesta dan Hukum International, yang menyajikan secara jelas tentang sejarah hukum perang, makna jus ad bellum dan jus in bello, kumpulan deklarasi konvensi dan perjanjian tentang hukum perang, cara dan metode peperangan, perlindungan terhadap warga sipil selama konflik bersenjata, kejahatan perang dan tanggungjawab komando.

4.1 Sejarah Hukum Perang

Hukum perang (Inggris: *Laws of war*) terbagi dua: (1) hukum mengenai tindakan yang dapat diterima dalam peperangan, seperti Konvensi Jenewa, yang disebut "*Jus in bello*"; dan (2) hukum mengenai penggunaan kekuatan senjata yang diizinkan, yang disebut "*Jus ad bellum*". Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter.

Istilah Hukum humaniter sendiri dalam kepustakaan hukum internasional merupakan istilah yang relatif baru. Istilah ini lahir sekitar tahun 1970-an dengan diadakannya *Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* pada tahun 1971. Sebagai bidang baru dalam hukum internasional, maka terdapat rumusan atau definisi mengenai hukum humaniter :

- **Jean Pictet** : "*International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being.*"
- **Mochtar Kusumaatmadja**: "Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban

perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri.”

- **Esbjorn Rosenbland** : *“The law of armed conflict* berhubungan dengan permulaan dan berakhirnya pertikaian; pendudukan wilayah lawan; hubungan pihak yang bertikai dengan negara netral. Sedangkan *Law of Warfare* ini antara lain mencakup:
- metoda dan sarana berperang, status kombatan, perlindungan yang sakit, tawanan perang dan orang sipil.”
- **S.R Sianturi** :*“Hukum yang mengatur mengenai suatu sengketa bersenjata yang timbul antara dua atau lebih pihak-pihak yang bersengketa, walaupun keadaan sengketa tersebut tidak diakui oleh salah satu pihak.”*

Panitia tetap hukum humaniter, departemen hukum dan perundang-undangan merumuskan sebagai berikut: *“Hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaedah dan ketentuan internasional, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang.”*

Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).

Instrumen pertama Hukum Humaniter lahir dari inisiatif Hendry Dunant, setelah menyaksikan penderitaan korban pertempuran di Solferino (Italy), dalam perkembangannya H u k u m Humaniter dikembangkan berdasarkan pengalaman yang tragis seperti di Solferino dimana penderitaan yang dialami manusia menjadi semakin parah.

Dari pernyataan tersebut sebenarnya pengembangan Hukum Humaniter selalu terlambat dikembangkan dibandingkan dengan

kebutuhan yang ada termasuk didalamnya Protokol tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 dan baru diberlakukan setelah dasawarsa terakhir ini setelah melihat korban akibat konflik semakin besar dan perlindungan yang diberikan masih sangat minim.

4.2 *Jus Ad Bellum dan Jus In Bello*

Hukum konflik bersenjata secara umum dibagi menjadi dua kategori besar, *Jus ad Bellum* dan *Jus in Bello*. *Jus ad Bellum* adalah hukum yang mengatur tentang manajemen konflik, tentang bagaimana negara memulai konflik bersenjata; dalam keadaan apa penggunaan kekuatan militer dibenarkan secara hukum dan moral. *Jus in Bello* adalah hukum yang mengatur tindakan negara setelah konflik dimulai; batasan hukum dan moral apa yang berlaku untuk melakukan perang.

Kedua kategori hukum konflik bersenjata telah berkembang dari waktu ke waktu, mengambil sebagian besar prinsip panduannya dari sejarah. Konsep *Jus ad Bellum* dan *Jus in Bello* berkembang secara tidak merata dan bersamaan. Misalnya, selama mayoritas periode *Jus ad Bellum*, sebagian besar masyarakat hanya berurusan dengan aturan tentang keabsahan penggunaan kekerasan. Begitu ada kondisi yang membenarkan perang, seringkali tidak ada batasan pada metode yang digunakan untuk berperang. Pada titik tertentu, kedua teori tersebut mulai berkembang bersama.

4. *Jus Ad Bellum*

Persyaratan prosedural dari Konvensi Den Haag tidak mencegah Perang Dunia I; sebagaimana persyaratan prosedural Liga Bangsa-Bangsa dan Pakta Kellogg-Briand tidak mencegah Perang Dunia II. Kekuatan dunia menyadari kebutuhan akan badan dunia dengan kekuatan yang lebih besar untuk mencegah perang, dan hukum internasional yang memberikan perlindungan yang lebih spesifik bagi para korban perang. Pengadilan Kejahatan Perang Pasca-PD II (Pengadilan Nuremberg, Tokyo, dan Manila). Pengadilan terhadap mereka yang melanggar hukum internasional selama PD II menunjukkan bahwa lompatan besar telah terjadi sejak PD I.

Memperkuat keberadaan *Jus ad Bellum* dan *Jus di Bello*, dan mengantar era "universalitas", yang menetapkan prinsip bahwa semua negara terikat oleh hukum perang berdasarkan teori bahwa konvensi hukum perang sebagian besar mencerminkan hukum kebiasaan internasional.

Dunia fokus pada masalah *ex post facto* selama penuntutan kejahatan perang. Sifat universal dari hukum larangan perang, dan pengakuan bahwa mereka adalah inti dari nilai-nilai hukum internasional (*jus cogens*), menghasilkan penerapan yang sah dari hukum-hukum tersebut kepada mereka yang diadili karena pelanggaran. Piagam PBB. Terus bergerak ke larangan perang. Larangan diperluas tidak hanya untuk perang, tetapi melalui Pasal 2 (4), juga "ancaman atau penggunaan kekuatan." Periode Awal Piagam PBB. Segera setelah negosiasi Piagam pada tahun 1945, banyak negara dan komentator berasumsi bahwa bahasa absolut dalam ketentuan Piagam mengizinkan penggunaan kekuatan hanya jika suatu negara telah mengalami serangan bersenjata.

Periode Kontemporer. Sebagian besar negara sekarang setuju bahwa kemampuan suatu negara untuk mempertahankan dirinya jauh lebih luas daripada yang diizinkan oleh ketentuan Piagam berdasarkan pembacaan literal.

Pandangan ini didasarkan pada kesimpulan bahwa hak pertahanan diri yang melekat di bawah hukum kebiasaan internasional dimasukkan, dan tidak dikeluarkan oleh Piagam. Ini tetap menjadi masalah kontroversial. *Jus ad Bellum* terus berkembang. Ajaran saat ini seperti pertahanan diri antisipatif dan preventif diadaptasi untuk memenuhi keadaan saat ini.

2. Jus in Bello

- a. **Konvensi Jenewa (1949).** "Perang" vs. "Konflik Bersenjata". Pasal 2 yang umum untuk keempat Konvensi Jenewa mengakhiri perdebatan ini. Pasal 2 menegaskan bahwa hukum perang berlaku dalam setiap kasus konflik bersenjata internasional. Empat Konvensi. Upaya komprehensif untuk melindungi korban perang. Kelahiran Konvensi Sipil. Pengakuan pasca perang akan kebutuhan untuk secara khusus menangani golongan sipil ini. Keempat konvensi tersebut dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional. Artinya, walaupun suatu negara belum meratifikasi perjanjian tersebut, negara tersebut masih terikat oleh prinsip-prinsip dalam keempat perjanjian tersebut karena itu cerminan dari hukum kebiasaan yang sudah mengikat oleh semua negara. Peduli dengan kekuatan nasional dan bukan internasional? Dalam praktiknya, pasukan yang beroperasi di bawah kendali PBB mematuhi Konvensi tersebut. Pergeseran yang jelas menuju motivasi kemanusiaan yang sejati: "Konvensi semakin dianggap tidak seperti kontrak atas dasar timbal balik yang dibuat untuk kepentingan nasional masing-masing pihak, dan lebih sebagai penegasan yang serius atas prinsip-prinsip yang dihormati untuk kepentingan mereka sendiri.
- b. Protokol 1977. Secara umum, kedua protokol ini untuk melengkapi empat Konvensi Jenewa sebelumnya. Protokol I: melengkapi aturan yang mengatur konflik bersenjata internasional. Protokol II: memperluas perlindungan untuk konflik internal.

- c. Konvensi Jenewa I - Luka dan Sakit di Lapangan. Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat. Konvensi ini pertama kali ditanda tangani pada tahun 1864 oleh 12 negara yang saat itu memiliki posisi penting di bidang politik internasional, terdiri dari 10 pasal yang mengatur tentang perbaikan kondisi prajurit yang cedera dan sakit di medan perang, menetapkan bahwa :
- 1) Prajurit yang cedera dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat tanpa memperdulikan kebangsaannya.
 - 2) Petugas kesehatan dan sarana serta prasarana yang dipergunakan untuk merawat prajurit yang cedera dan sakit di medan perang harus diberikan status netral.
 - 3) Lambang palang merah diatas dasar putih disetujui sebagai tanda pelindung.
- d. Konvensi Jenewa III - Tahanan Perang. Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang. Dalam konferensi di Den Haag tahun 1899 dan 1907 menyinggung pula soal tawanan perang, karena yang mengatur persyaratan penahan dan 66 perlakuan tawanan perang masih kurang, amaka tahun 1929 disusun KonvensiJenewa III tentang perlakuan tawanan perang yang menegaskan bahwa:
- 1) Tawanan perang bukanlah seorang kriminal tetapi pihak musuh yang tidak dapat lagi turut serta dalam pertempuran.
 - 2) Tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi selama ditahan.
 - 3) Tawanan perang harus dibebaskan pada waktu permusuhan sudah berakhir.

- e. Konvensi Jenewa IV - Warga Sipil. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Sipil di Waktu Perang. Sebelum tahun 1949 Hukum Humaniter belum dapat diterapkan untuk melindungi masyarakat sipil, sehingga pada tahun 1949 disetujui Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan kepada para penduduk sipil dalam peperangan, dalam konvensi tersebut menegaskan bahwa : Setiap orang mempunyai hak dan jaminan asasi yang harus dihormati tanpa diskriminasi.

4.3 Daftar Deklarasi, Konvensi, dan Perjanjian tentang Hukum Perang

1. 1856 Deklarasi Paris yang Menghormati Hukum Maritim menghapuskan privateering.
2. Konvensi Jenewa 1864 untuk Perbaikan Kondisi Orang yang Terluka dan Sakit di Angkatan Bersenjata di Lapangan.
3. Deklarasi St. Petersburg 1868 Menolak Penggunaan proyektil Peledak Di Bawah berat 400 gram.
4. Konvensi Den Haag 1899 terdiri dari tiga bagian utama dan tiga deklarasi tambahan.
5. Konvensi Den Haag 1907 memiliki tiga belas bagian, dua belas di antaranya diratifikasi dan diberlakukan, dan dua deklarasi.
6. 1922 Perjanjian Angkatan Laut Washington, juga dikenal sebagai Perjanjian Lima Kekuatan (6 Februari)
7. Protokol Jenewa 1925 untuk Larangan Penggunaan dalam Perang Asfiksia, Gas Beracun atau lainnya, dan Metode Bakteriologis Perang.
8. Konvensi Jenewa 1929, tentang perlakuan terhadap tawanan perang.
9. Konvensi Jenewa 1929 tentang perbaikan kondisi orang yang terluka dan sakit.
10. Perjanjian 1930 untuk Pembatasan dan Pengurangan Persenjataan Angkatan Laut.
11. Deklarasi LBB tahun 1938 untuk "Perlindungan Penduduk Sipil Terhadap Pemboman dari Udara dalam Perang".
12. Piagam PBB 1945 (mulai berlaku pada 24 Oktober 1945).

13. Konvensi PBB 1948 tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida
14. Konvensi Jenewa I tahun 1949 tentang Perbaikan Kondisi Orang yang Terluka dan Sakit pada AB di Lapangan.
15. Konvensi Jenewa II 1949 tentang Perbaikan Kondisi Anggota AB yang Terluka, Sakit dan Karam di Laut.
16. Konvensi Jenewa III 1949 Terkait Perlakuan terhadap TWP.
17. Konvensi Jenewa IV 1949 Berkaitan dengan Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang.
18. Konvensi Den Haag 1954 untuk Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Kejadian Konflik Bersenjata
19. Konvensi PBB tahun 1994 tentang Keselamatan personel PBB.
20. Perjanjian Ottawa 1997 - Konvensi tentang Larangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi dan Pemindahan Ranjau Anti-Personil dan Penghancurannya.
21. Statuta Roma 1998 dari Pengadilan Kriminal Internasional (mulai berlaku 1 Juli 2002)
22. Protokol Opsional tahun 2000 tentang Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (mulai berlaku 12 Februari 2002).
23. Protokol Jenewa III Tambahan tahun 2005 untuk Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan Berkaitan dengan Adopsi Lambang Pembeda Tambahan.
24. Konvensi 2008 tentang Munisi Tandan (mulai berlaku 1 Agustus 2010).

4.4 Cara dan Metode Peperangan

1. Lieber Code (1863)

- a. Mengatur aspek hukum dan kebiasaan perang di darat;
 - 1) Bagaimana perang seharusnya dilaksanakan
 - 2) Bagaimana perlakuan yang harus diberikan kepada penduduk sipil
- b. Mengatur mengenai hakikat prinsip kepentingan militer;
- c. Melarang penggunaan senjata beracun
- d. Menentukan klasifikasi kombatan dan non-kombatan

2. Deklarasi St. Petersburg (1868)

- a. Mengatur mengenai persenjataan khususnya perkembangan proyektil-proyektil yang dapat meledak;
- b. Membatasi penggunaan terhadap perkembangan persenjataan bersifat mudah menyala dan meledak;
- c. Satu-satunya objek yang sah diserang dalam peperangan adalah angkatan militer pihak lawan;
- d. Penggunaan senjata yang bersifat mudah meledak bertentangan dengan hukum kemanusiaan.

3. Konvensi Den Haag IV (1907)

- a. Mengenai sarana berperang:
 - 1) Adanya prinsip pembatasan dalam pemilihan dan penggunaan sarana atau alat berperang;
 - 2) Pelarangan penggunaan ranjau dan torpedo;
 - 3) Larangan penggunaan racun dan senjata beracun;
 - 4) Larangan penggunaan senjata atau proyektil yang menyebabkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu;
 - 5) Larangan penggunaan proyektil yang diledakkan dengan bantuan balon atau dengan cara lain yang hampir serupa dengan balon;
 - 6) Larangan penggunaan proyektil yang berisi gas racun atau gas cekik;
 - 7) Larangan penggunaan jenis peluru tertentu (peluru dum- dum) karena sifatnya yang mengakibatkan penderitaan yang tidak perlu;
- b. Mengenai metode berperang:
 - 1) Melarang membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara curang atau khianat;
 - 2) Memperbolehkan tipu muslihat atau tindakan yang dianggap perlu untuk mendapatkan informasi mengenai musuh;
 - 3) Melarang penggunaan bendera perdamaian tidak pada tempatnya;
 - 4) Melarang suatu perbuatan yang sifatnya kejam terhadap

hors de combat atau musuh yang telah menyerah;

- 5) Larangan pemboman terhadap kota, pedesaan, daerah-daerah berpenduduk;
- 6) Larangan perampasan suatu kota atau suatu tempat;

3 Protokol Tambahan I

- a. Adanya lambang-lambang internasional yang harus dihormati selama masa peperangan;
- b. Perluasan kategori orang-orang yang dapat terlibat dalam sengketa bersenjata;
- c. Larangan penggunaan lingkungan sebagai sarana dan metode berperang;
- d. Perluasan konsep khianat (perfidy). Dalam Konvensi Den Haag larangan khianat hanya diterapkan dalam kaitannya dengan pembunuhan, melukai atau
- e. menangkap musuh saja; sedangkan dalam Protokol larangan diperluas juga pada penghormatan terhadap bendera gencatan senjata, tanda kebangsaan, penduduk sipil dan lambang- lambang internasional.

4.5 Perlindungan Terhadap Warga Sipil Selama Konflik Bersenjata

1. Definisi Warga Sipil

- a. Siapapun yang tidak memenuhi syarat sebagai kombatan, dalam arti berhak atas status PW pada saat ditangkap, harus dianggap sebagai warga sipil.
- b. Kekebalan yang diberikan warga sipil tidak mutlak. Menurut komentar resmi: "Kekebalan yang diberikan kepada warga sipil tunduk pada kondisi yang tertentu, yaitu, mereka tidak melakukan semua tindakan bermusuhan."
- c. Tindakan bermusuhan harus dipahami sebagai tindakan yang menurut sifat dan tujuannya dimaksudkan untuk menyebabkan kerugian nyata thdp personel dan peralatan AB.
- d. Jadi seorang warga sipil yang mengambil bagian dalam pertempuran bersenjata, baik secara individu atau sebagai

bagian dari suatu kelompok, dengan demikian menjadi sasaran yang sah.

- e. Menurut Protokol I, Pasal 51 (3), warga sipil akan menikmati perlindungan bagian ini (memberikan perlindungan umum terhadap bahaya yang timbul dari operasi militer) kecuali dan untuk waktu tertentu ketika mereka mengambil bagian "langsung" dalam permusuhan.
- 2. Perlindungan.** Pasal Umum 3 mengamanatkan perlindungan minimum berikut selama konflik bersenjata internal:
- a. Tidak ada perbedaan berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dll;
 - b. Tidak ada kekerasan terhadap hidup atau orang;
 - c. Tidak ada penyanderaan;
 - d. Tidak ada perawatan yang merendahkan;
 - e. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan tanpa pengadilan yang adil, dan;
 - f. Yang luka dan sakit harus dirawat.
- 3. Larangan.** Protokol II, Pasal 4: Menegaskan kembali dan memperluas prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal Umum 3. Pasal 4 melarang tindakan berikut dalam konflik bersenjata internal:
- a. Kekerasan terhadap kehidupan, kesehatan dan fisik atau mental;
 - b. Pembunuhan, perlakuan kejam, penyiksaan, mutilasi dan hukuman mati;
 - c. Hukuman kolektif, penyanderaan, pelaku terorisme;
 - d. Perlakuan yang merendahkan /mempermalukan, pemerkosaan, prostitusi paksa dan penyerangan tidak senonoh;
 - e. Perbudakan/perdagangan budak, penjarahan, dan ancaman untuk melakukan hal-hal tersebut di atas.

4.6 Kejahatan Perang dan Tanggung Jawab Komando

1. Kejahatan Perang

Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antar bangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara, belum tentu bisa dianggap kejahatan perang.

Saddam Husein, mantan Presiden Irak, diadili karena kejahatan perang. Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang.

Perlakuan semena-mena terhadap tawanan perang atau penduduk sipil juga bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Pembunuhan massal dan genosida kadang dianggap juga sebagai suatu kejahatan perang, walaupun dalam hukum kemanusiaan internasional, kejahatan-kejahatan ini secara luas dideskripsikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan perang merupakan bagian penting dalam hukum kemanusiaan internasional karena biasanya pada kasus kejahatan ini dibutuhkan suatu pengadilan internasional, seperti pada Pengadilan Nuremberg. Contoh pengadilan ini pada awal abad ke-21 adalah Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Bekas Yugoslavia dan Pengadilan Kejahatan Internasional untuk Rwanda, yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB berdasarkan pasal VII Piagam PBB.

2. Tanggung Jawab Komando.

Berbicara tentang konsep pertanggungjawaban komando berlaku bagi seorang atasan dalam pengertian yang luas, termasuk kepala negara, kepala pemerintahan, menteri dan pimpinan perusahaan. Dalam doktrin hukum Internasional mengenai

pertanggungjawaban komando adalah doktrin yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana secara individual yang dikembangkan melalui kebiasaan dan praktek-praktek pengadilan kejahatan perang, terutama sesuai perang dunia ke-II. Hugo Grotius menggunakan analogi “tanggung jawab orang tua” (Parental Responsibility) untuk menggambarkan pertanggungjawaban komando: *“Orang tua bertanggung jawab terhadap kesalahan anaknya sepanjang anaknya masih ada dalam kekuasaan mereka. di sisi lain, walaupun orang tua memiliki anak yang berada di bawah kekuasaannya namun orang tua tersebut tidak mampu lagi untuk mengendalikan mereka, maka orang tua tersebut tidak lagi harus bertanggung jawab kecuali jika ia memiliki pengetahuan. Jadi dalam hal ini seorang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain apabila memenuhi dua elemen, yaitu: Pengetahuan; dan gagal untuk mencegah”.*

3. Tempat Yurisdiksi Internasional Saat Ini

- a. Pengadilan Pidana Internasional.
- b. Pengadilan ad hoc di bawah otoritas Piagam PBB (ICTY atau ICTR) atau perjanjian terpisah (Sierra Leone).
- c. Beberapa negara mengklaim yurisdiksi universal atas semua kejahatan perang meskipun tidak ada kaitan dengan kejahatan yang dituduhkan.

RANGKUMAN

1. Hukum perang yang pada akhirnya dikenal dengan hukum humaniter lahir sekitar tahun 1970an seiring dengan diselenggarakannya *conference of government expert on the reaffirmation and development in armed conflict*.
2. Jus ad Bellum adalah hukum yang mengatur tentang manajemen konflik, tentang bagaimana negara memulai konflik bersenjata; dalam keadaan apa penggunaan kekuatan militer dibenarkan secara hukum dan moral. Jus in Bello adalah hukum yang mengatur tindakan negara setelah konflik dimulai; batasan hukum dan moral apa yang berlaku untuk melakukan perang.
3. Daftar beberapa deklarasi, konvensi, dan perjanjian tentang hukum perang, diantaranya: Deklarasi Paris, Konvensi Jenewa, Deklarasi St.Petersburg, Konvensi Denhaag, Perjanjian Lima Kekuatan, Protokol Jenewa, Deklarasi LBB, Piagam PBB, Perjanjian Ottawa, Statuta Roma, Protokol Opsional, dll.
4. Berperang harus mengacu pada aturan peperangan. Cara dan metode berperang dapat mengacu pada ketentuan Lieber Code (1863), Deklarasi St.Petersburg (1868), dan Konvensi Denhaag IV (1907), dan Protokol Tambahan I.
5. Warga sipil selama konflik bersenjata berlangsung wajib mendapatkan perlindungan.
6. Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Tanggungjawab komando adalah doktrin yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana secara individual yang dikembangkan melalui kebiasaan dan praktek-praktek pengadilan kejahatan perang, terutama sesuai perang dunia ke-II.

BAGIAN 5

DIPLOMASI PERANG

SEMESTA

DIPLOMASI PERANG SEMESTA

Pada bagian 5 tentang Diplomasi Perang Semesta, menyajikan sub pembahasan tentang pengertian diplomasi, diplomasi dan hubungan internasional, teori dalam hubungan internasional, pola hubungan internasional, tujuan nasional, diplomasi menurut para ahli, tujuan diplomasi, peranan diplomasi, perang dingin dan diplomasi, perang dingin lebih berbahaya dari perang panas, détente, berbagai tipe diplomasi, perang, diplomasi sebagai pencegah perang.

5.1 Pengertian Diplomasi

Diplomasi artinya perundingan atau perjanjian yang dibuat untuk disepakati. Diplomasi merupakan salah satu bentuk perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Hakikat diplomasi adalah seni atau praktik bernegosiasi oleh seseorang yang biasa disebut sebagai diplomat yang mewakili sebuah negara atau organisasi, biasanya orang menganggap diplomasi sebagai cara mendapatkan keuntungan dengan kata-kata yang halus. Diplomasi merupakan sebuah proses atau cara untuk mencapai tujuan suatu negara satu dengan negara yang lain dengan menggunakan instrumen-instrumen yang mendukung proses diplomasi tersebut. Diplomasi terbagi dalam dua era yaitu era diplomasi tradisional dan era diplomasi baru yang muncul setelah Perang Dunia I. selain instrumen-instrumen yang mendukung kegiatan diplomasi, faktor terpenting yang mempengaruhi proses diplomasi adalah harus memiliki komunikasi yang baik akan memungkinkan kegiatan diplomasi berjalan dengan lancar.

Diplomasi adalah bagian dari kegiatan politik negara untuk mencapai kekuatan (*power*). Politik merupakan bagian dari perjuangan kekuatan. Tujuan utama suatu negara selalu menitik

beratkan pada pencapaian Kepentingan Nasional (*National Interest*) yakni usaha yang dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan, menguasai, mengendalikan dan memanfaatkan *power*, mengingat *power* itu sendiri merupakan standar yang menentukan kemampuan suatu negara guna mengadakan hubungan dengan negara lain. *Power* (kekuatan) tersebut dapat mencakup; *Geography, Quality of Population, natural Resources, Stability of Government, The Ability of Diplomacy, National Morale, Military Preparedness, Industrial Capacity and National Cohesiveness*.

5.2 Diplomasi dan Hubungan Internasional

Diplomasi dan perang diibaratkan sebagai suatu benda dengan Dua Sisi Dari Satu Keping Mata Uang". Diplomasi dan Perang adalah dua istilah yang merupakan pasangan yang tak terpisahkan, ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Sisi yang satu bicara diplomasi dan dibalik sisi lain bicara perang. Aktifitas diplomasi dan perang membutuhkan komunikasi yang berupa hubungan internasional. Pengertian Hubungan Intemasional secara sederhana adalah segala hubungan yang melampaui batas nasional atau yurisdiksi suatu bangsa.

1. Hubungan Internasional menurut Norman D, Palmers dan Perkins (1997), "*Totality of the relations among peoples and groups in the world society and the forces, pressures, processes, which determine the way men live and act and think*". (Totalitas hubungan antar bangsa-bangsa dan golongan-golongan dalam masyarakat di dunia dalam bidang-bidang kekuatan, tekanan, proses, yang menentukan bagaimana cara mereka hidup, bertindak dan berpikir);
2. Harold dan Margaret Sprout (1965) menyatakan "*International Relations is all human behavior that originated on one side of a national political boundary and affect on human behavior on the other side of national political boundary*". (Hubungan Intemasional adalah semua tingkah laku manusia yang berasal atau terjadi di dalam suatu batas politik nasional dan yang mempengaruhi tingkah laku manusia di dalam batas politik

nasional yang lain).

Pengertian hubungan internasional tersebut diatas merupakan pengertian dalam arti yang luas. Dalam arti sempit yaitu hubungan internasional dalam aspek tertentu misalnya hubungan dalam aspek sosial atau aspek ekonomi atau aspek kultural atau aspek politik atau aspek pertahanan saja. Hubungan Internasional juga dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu: "bentuk resmi" dan "bentuk tak resmi". (*International Relations is of two types, official and unofficial*). Adapun yang dimaksud sebagai hubungan Resmi (Official Relations), adalah: hubungan internasional dalam bentuk resmi (official) dilakukan antar pemerintah dari suatu negara dengan pemerintah dari negara lainnya. Hubungan antar negara ini dilakukan oleh pemerintah masing- masing negara melalui politik luar negeri. Politik luar negeri suatu negara dimaksudkan untuk melaksanakan kepentingan nasional, dalam mencapai tujuan nasional. Hal ini dilakukan melalui cara: Diplomasi, Ekonomi, Psikologis, Militer(Perang), dan kombinasi.

5.3 Teori Dalam Hubungan Internasional

1. **Realism.** Aktor prinsip adalah negara, yang dipersonifikasikan sebagai aktor rasional kesatuan yang perilakunya ditentukan oleh struktur anarki internasional. Negara adalah aktor rasional yang berusaha memaksimalkan kepentingannya sendiri atau tujuan nasional dalam kebijakan luar negeri. Masalah keamanan nasional adalah yang paling penting.
2. **Liberalism.** Di sini negara hanyalah satu aktor dalam politik dunia, dan bahkan negara dapat bekerja sama bersama melalui mekanisme kelembagaan dan perundingan yang melemahkan kecenderungan untuk mendasarkan kepentingan hanya dalam hal militer. Negara- negara adalah saling bergantung dan aktor-aktor lain seperti perusahaan-perusahaan Transnasional, IMF, negara-negara PBB berperan.
3. **Constructivism.** Salah satu asumsi utama dari pendekatan konstruktivis adalah bahwa identitas, norma, dan budaya memainkan peran penting dalam politik dunia. Identitas dan

kepentingan negara tidak hanya ditentukan secara struktural, tetapi lebih dihasilkan oleh interaksi, institusi, norma, budaya. Ini adalah proses, bukan struktur, yang menentukan cara negara berinteraksi.

4. **Feminism.** Ada sejumlah pendekatan feminis terhadap Politik Dunia, tetapi semuanya berbagi asumsi bahwa gender itu penting dan itu membuat perbedaan bahwa laki-laki, bukan perempuan telah menulis teori-teori utama dan telah mengendalikan pembuatan kebijakan. Sebagian besar teori feminis tentang politik dunia memiliki asumsi bahwa dunia akan menjadi tempat yang kurang kompetitif dan tidak terlalu kejam jika perempuan memperoleh dominasi dalam posisi kekuasaan (kekuasaan negara dan berkaitan dengan pengetahuan).

5.4 Pola Hubungan Internasional. Bicara soal Diplomasi dan Perang, tidak terlepas dari persoalan hubungan antar negara atau hubungan internasional yang dapat memiliki pola hubungan, sebagai berikut:

1. **Pola Kerjasama** yaitu suatu bentuk penyatuan usaha usaha antara beberapa negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang sesuai; Contoh: kerjasama ASEAN, NATO, FPD, dsb;
2. **Pola Konflik** yaitu suatu bentuk interaksi dimana satu pihak memakai kekuatan terhadap pihak lain, meskipun tak perlu berbentuk fisik. Contoh: Perang Iran-Irak, Perang Vietnam-AS; Perang Korea, dan sebagainya. Contoh lainnya: Hubungan konflik yang pernah ada antara RI-RRC, hubungan RI-Australia, RI-Portugal, dan sebagainya.
3. **Pola Kompetisi** suatu bentuk hubungan dimana pihak yang satu berusaha mendahului pihak lain dalam mencapai satu tujuan. Contoh: Dalam hubungan internasional misalnya adanya perlombaan senjata antara Barat (AS) dengan Timur (ex Uni Soviet) semasa perang dingin.
4. **Pola Akomodasi** pola ini adalah bentuk hubungan antara konflik dan kooperatif atau bentuk penyesuaian, artinya perbedaan- perbedaan yang ada tak akan menyebabkan

konflik. Dalam hubungan internasional, pola ini sering disebut "toleransi" atau "kompromi". Contoh klasik bentuk kompromi: yaitu Persoalan Lembah Chaimizal (Chaimizal case) yaitu masalah Sungai Rio Grande.

5.5 Tujuan Nasional (*National Goal*)

Tujuan Nasional (National Goal) suatu negara sangat umum terdiri dan dua kategori yaitu:

1. **Tujuan Vital.** Vital berasal dari kata Latin "vitae" (hidup), maksudnya tujuan yang menentukan hidup matinya suatu bangsa. Berarti tujuan ini mutlak atau absolut bagi suatu bangsa yang terdiri dari:
 - a. National Integrity (Integritas Nasional) yaitu keutuhan nasional dalam bentuk:
 - 1) **Integritas Politik (Political Integrity)** dalam wujud political independence (kebebasan atau kemerdekaan politik), artinya negara itu harus memiliki kemerdekaan;
 - 2) **Integritas Wilayah (Territorial Integrity)** yaitu keutuhan wilayah artinya wilayah suatu negara harus utuh secara bulat.
 - b. *National Security* (Keamanan Nasional). Cara-cara mencapai keamanan nasional suatu negara:
 - 1) **Secara unilateral**, dengan mengadakan kesiapsiagaan militer, perlengkapan persenjataan, penyempurnaan sistim, SDM, dll;
 - 2) **Secara diplomasi**, dengan melakukan pendekatan kepada negara-negara sekitar dan negara-negara lain melalui negosiasi;
 - 3) **Perjanjian Keamanan**, dengan negara lain yang bersifat non agresi, mutual defence treaty (NATO), dll;
 - 4) **Collective Security (Keamanan Bersama)**, ini lebih bersifat idealisme daripada realisme.
 - c. *Economic Wellbeing/Welfare* (Kesejahteraan Ekonomi) Tujuan ini dilakukan dalam bentuk:

- 1) **Perlindungan Ekonomi** (proteksi ekonomi) antara lain dengan cara pembatasan impor, pajak impor yang tinggi; dll.
 - 2) **Membantu subsidi ekspor**, bantuan kredit, perjanjian ekonomi perdagangan dengan negara lain, dsb.
 Catatan: Tiga tujuan vital di atas bagi setiap negara bersifat "**mutlak**" dan karenanya dimiliki oleh semua negara; Untuk negara-negara tertentu yang memiliki kapabilitas nasional yang besar (super powers), tujuan vital lainnya disamping tiga tujuan vital di atas yaitu: Power (kekuasaan); Prestige; dan Ideologi.
2. **Tujuan Variabel.** Tujuan variabel dapat berubah-ubah bergantung kepada kepentingan suatu negara. Tujuan variabel tidak menentukan hidup matinya suatu bangsa/negara. Misalnya: Pengiriman Misi olahraga, Misi Kesenian, Pertukaran Mahasiswa, dsb.

5.6 Diplomasi

1. Sir Ernest Satow (1957) dalam *A Guide to Diplomatic Practice: "Diplomacy is the application of intelligence and tact to conduct of official relations between the government of independent states"*. (Diplomasi adalah aplikasi dari kemampuan dan kebijaksanaan dalam melaksanakan hubungan resmi antara pemerintah dari negara-negara").
2. Harold Nicholson (1935) dalam *On Diplomacy*: Kata diplomasi secara umum menyangkut 5 (lima) hal yaitu: Politik luar negeri; negosiasi; mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut; suatu cabang Dinas Luar Negeri; keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional, termasuk tindakan yang lebih licik. Catatan: Pengertian negosiasi atau perundingan disini bisa bersifat dari membujuk (persuasive) hingga mengancam (threat) kepada lawan perundingan.
3. K. M. Panikkar (1956) dalam "*The Principle and Practice of Diplomacy*": "Diplomasi dalam hubungannya dengan politik internasional adalah seni mengedepankan kepentingan suatu

- negara dalam hubungannya dengan negara lain".
4. Svarlien (1984). Diplomasi adalah seni dan ilmu perwakilan negara dan perundingan;
 5. Ivo D. Duchacek (1990). Diplomasi biasanya didefinisikan sebagai praktik pelaksanaan politik luar negeri suatu negara dengan cara negosiasi dengan negara lain.
 6. Karl von Clausewitz. Perang merupakan kelanjutan diplomasi melalui sarana lain.
 7. Hans J. Morgenthau (1948) dalam *"Politics Among Nations: Struggle for Power and Peace"* Diplomasi dapat dalam "arti luas" dan "arti sempit". **Arti luas** *Diplomacy is formation and execution of foreign politic on all levels, the highest as well as the subordinate.* (Diplomasi adalah pembentukan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam segala tingkatnya, dari yang tertinggi hingga yang terendah). Jadi dalam hal ini diplomasi menyangkut perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri dalam segala tingkatnya. Arti sempit Diplomasi adalah suatu medium, channel (saluran), atau cara dimana hubungan resmi antara pemerintah itu terjadi. Catatan: Morgenthau membedakan pengertian diplomasi dan politik luar negeri. Diplomasi sebagai proses, sedangkan politik luar negeri sebagai pelaksanaan.
 8. S.L. Roy (1984) dalam bukunya "Diplomacy" menjelaskan tentang definisi diplomasi sbb:
 - a. Unsur pokok diplomasi adalah negosiasi;
 - b. Negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara;
 - c. Tindakan-tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin bisa dilaksanakan dengan sarana damai. (Karenanya pemeliharaan perdamaian tanpa merusak kepentingan nasional adalah tujuan utama diplomasi).
 - d. Teknik-2 diplomasi sering dipakai untuk menyiapkan perang dan bukan untuk menghasilkan perdamaian.
 - e. Diplomasi dihubungkan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara.

- f. Diplomasi modern dihubungkan erat dengan sistem negara;
 - g. Diplomasi juga tak bisa dipisahkan dari perwakilan negara.
- Catatan:** Apabila cara damai gagal untuk menjaga kepentingan nasional, kekuatan biasanya digunakan, sehingga terdapat keterkaitan antara diplomasi dan perang.
9. Karl von Clausewitz, ahli strategi perang, jenderal dan guru besar sosiologi dari Prussia (Jerman) dalam bukunya *Vom Kriege* (Tentang Perang), menggambarkan hubungan perang dan diplomasi sebagai berikut:
 - a. *War is only apart of political interpost, therefore by means in independence there in itself.* (Perang hanya merupakan bagian dari hubungan politik, karena itu tidaklah berdiri sendiri).
 - b. *War is nothing but a continuation of political with force admixture of other means.* (Perang tak lain adalah suatu kelanjutan hubungan politik dengan cara lain).

5.7 Tujuan Diplomasi

1. Kautilya, diplomat India Kuno (Abad ke-4 SM) dalam buku "Arthashastra" menyatakan ada empat tujuan utama diplomasi yaitu:
 - a. **Acquisition** (membuat hubungan dengan negara lain/perolehan);
 - b. **Preservation** (pemeliharaan/menjaga hubungan dengan negara lain);
 - c. **Augmentation** (penambahan/memperluas hubungan diplomatik);
 - d. **Proper distribution** (harmoni, perdamaian, pembagian yang adil).

Kautilya menyimpulkan tujuan utama diplomasi untuk "pengamanan kepentingan negara sendiri" yaitu untuk menjamin keuntungan maksimum negara sendiri dan kepentingan utamanya adalah pemeliharaan keamanan.
2. **Menurut S.L. Roy (1984)**, tujuan diplomasi setiap negara adalah pengamanan kebebasan politik dan integritas teritorialnya dan

dicapai dengan cara:

- a. Memperkuat hubungan dengan negara sahabat;
- b. Memelihara hubungan erat dengan negara-2 sehaluan;
- c. Menetralisir negara yang memusuhi.
- d. Kesemuanya dapat dilakukan melalui negosiasi. Contoh hal ini:
 - 1) Nazi Jerman menerima perjanjian dengan Soviet dengan harapan Jerman akan bisa terlebih dahulu melakukan agresi terhadap Polandia dan kemudian Eropa Barat tanpa khawatir akan Front Timurnya (Menjelang PD-II);
 - 2) Soviet menggunakan perjanjian itu sebagai usaha memperoleh pengunduran waktu dari serangan Jerman yang tak terelakkan nantinya. Dalam waktu penundaan ini, Soviet bisa memperkuat kekuatan militernya sebaik mungkin yang pada akhirnya membantunya mengalahkan Nazi Jerman.

5.8 Peranan Diplomasi

Diplomasi pada era pasca perang Dunia II mengalami perubahan tatanan dunia baru. Setelah PD-I terjadi perubahan di bidang diplomasi yaitu dari metode "Diplomasi Tradisional (Diplomasi Rahasia) ke "Diplomasi Terbuka". Praktik-pratik diplomasi juga mengalami perubahan. Setelah PD-II, sebuah tatanan dunia baru yang berbeda dari tatanan periode pra PD-II muncul dan mempunyai pengaruh yang sangat besar pada diplomasi. Era Pasca PD-II, dua negara AS (Amerika Serikat) dan Uni Soviet (US), keduanya menjadi superpowers dan lebih kuat dari negara-negara lain di dunia. Kedua negara superpowers berdiri sebagai saingan satu sama lain dan masing-masing berusaha memperluas pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia. Tetapi tak satupun dan mereka cukup kuat untuk memaksakan kehendaknya kepada superpower lain; Pergulatan ini memunculkan kondisi dan posisi konflik yang disebut "*cold war*" (Perang Dingin).

5.9 Perang Dingin dan Diplomasi

1. **Charles O'lerche** mendefinisikan Perang Dingin sebagai "Kontroversi diplomatik di mana nagara negara berperang satu sama lain, dengan segala senjata yang dipunyai kecuali kekerasan bersenjata".
2. Perang Dingin yang muncul setelah PD-II berakhir yaitu sejak 1947 dalam konteks hubungan internasional terjadi "*struggle for power*" besar-besaran melalui konflik-konflik diplomatik, ideologi, antara dua blok yang berlawanan yaitu blok Kapitalis pimpinan AS dan blok Sosialis pimpinan Uni Soviet;
3. Diplomasi Deteren. Dalam periode Perang Dingin dan sesudahnya, persenjataan nuklir bertindak sebagai "deteren" (*deterent*) atau "pencegah". Dalam politik deteren, senjata nuklir telah berfungsi sebagai background umum bagi diplomasi, walaupun hingga kini blm pernah benar-benar digunakan. Instrumen militer benar-benar memberikan dukungan dan jaminan stabilitas diplomasi antara lain melalui parade militer.
4. Diplomasi Perang Dingin tidak didasarkan atas teori "*balance of power*", tetapi pada "*balance of terror*" (keseimbangan ancaman). Kemungkinan suatu perang nuklir dan kehancuran total bertindak sebagai "deteren". Deteren tidak hanya merupakan "teknik militer" tetapi juga sebuah "konsep diplomasi". Jadi deteren adalah "konsep psikologis" yang digunakan oleh pembuat keputusan sipil. Manipulasi ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pihak sipil ini, yang disebut diplomasi deteren, merupakan sarana utama diplomasi sejak permulaan Perang Dingin. Diplomasi deteren pada zaman nuklir didasarkan pada anggapan:
 - a. Bahwa risiko bunuh diri akan menghentikan agresor karena harga yang harus dia bayar akan terlalu tinggi bila ia melakukan serangan nuklir;
 - b. Strategi diplomasi deteren untuk sistem ini cocok untuk memisahkan '*sphere of influence*' kedua superpower untuk perdamaian umum dunia;
 - c. Kedua superpower menjaga dengan hati-hati terhadap

setiap penyeberangan, dan masing-masing menjaga agar sekutunya akan selalu tetap berada dalam orbit sendiri.

5.10 Perang Dingin Lebih Berbahaya Daripada Perang Panas

1. Perang Dingin menunjukkan "situasi tidak damai tidak perang".
2. Meskipun perdamaian umum ada, perang terbatas sering pecah di beberapa bagian dunia yang berbeda, karena superpowers menahan diri mereka untuk terlibat dalam pertempuran langsung, tetapi dilakukan oleh wakil-wakil mereka yaitu oleh sekutu-sekutunya.
3. Hubungan bermusuhan ditonjolkan, tetapi tidak sampai pada pengabaian negosiasi dan penggunaan kekerasan tetap terbatas.
4. Perang Dingin mengkombinasikan dua elemen yaitu:
 - a. Bentrokan dua ideologi yang bermusuhan.
 - b. Dua superpowers yang mewakili dua kubu yang bermusuhan.
5. Sikap yang keras dilanjutkan untuk membuat tindakan-tindakan diplomatik yang berhati-hati, sehingga sambil berusaha mempertahankan dan meningkatkan pengaruh mereka, mereka bisa menghindari risiko konflik bersenjata secara langsung.
6. Percekcokan yang terus berlanjut antara kedua kubu, membawa jutaan penduduk percaya bahwa Perang Dunia III tak dapat dihindarkan.
7. Jawaharlal Nehru (Perdana Menteri India Tahun 1960-an), menyebut Perang Dingin sebagai semacam "hukuman mati yang ditunda", sehingga Perang Dingin lebih berbahaya daripada Perang Panas sebab ia melahirkan pemikiran, perasaan, emosi, kecemasan, menurunkan martabat manusia dan biadab.
8. Perang Dingin juga menciptakan hambatan komunikasi mental, sehingga merusakkan tindakan tradisional, hubungan intemasional dalam segala aspek termasuk diplomasi.
9. "Diplomasi diam-diam" dan "diplomasi preventive" dilakukan dengan melibatkan peranan aktif PBB,
10. Dalam dunia bipolar, diplomasi tradisional yang didasarkan atas teori "*balance of power*" menjadi tidak efektif dan diganti dengan

- "balance of terror"* yang menguasai hubungan internasional;
11. Negara-negara superpowers menerapkan pepatah: "Negara yang tidak bersama kita adalah lawan kita,
 12. Negara-2 Asia-Afrika membentuk Gerakan Non Blok dan diakui sebagai Dunia Ketiga, sehingga sistem internasional menjadi *"polycentris"* dengan tiga blok.
 13. Blok Dunia Ketiga melalui PBB berusaha meredam dominasi super-powers dan bisa mempunyai pengaruh atas politik internasional.

5.11 Detente

1. Negara-negara superpowers menerapkan *"detente"* yaitu "pengurangan hubungan tegang/permusuhan antara dua *super powers*".
2. Dalam detente kadang-kadang timbul ketegangan dalam hubungan kedua superpowers, tetapi sering dapat diselesaikan melalui negosiasi bilateral;
3. Tujuan diplomasi selama detente adalah: untuk mengurangi ketegangan di bidang lain dari kepentingan yang sama dan untuk mencapai suatu pengertian sehubungan dengan pembatasan persenjataan dan mengganti konfrontasi dengan kerjasama.
4. Detente berjalan hingga tahun 1989, ketika secara resmi detente dan kompetisi AS dan Uni Soviet dihentikan dan berakhir ketika tahun 1991 Uni Soviet bubar. Sistem internasional sejak itu mengalami perubahan.

5.12 Berbagai Tipe Diplomasi

Dalam pelaksanaan diplomasi di dunia internasional, terdapat beberapa tipe diplomasi yang lazim dipraktikkan oleh berbagai negara.

1. **Diplomasi Komersial** (*Commercial Diplomacy*) atau Shop Keeper Diplomacy atau diplomasi perdagangan adalah diplomasi borjuis atau diplomasi sipil didasarkan pada anggapan. Penyelesaian kompromis antar mereka yang berselisih via negosiasi lebih menguntungkan dari pada penghancuran total

musuh; Aspek uang atau ekonomi merupakan kekuatan nasional yang penting. Perdagangan internasional dan bantuan internasional digunakan sebagai alat diplomasi. Cth. VOC.

2. Diplomasi Demokratis. (*Democratic diplomacy*). Diplomasi Demokratis mendapatkan jalan lancar setelah "era diplomasi terbuka" yaitu tuntutan bahwa diplomasi harus dilaksanakan terbuka dan mendapat pengawasan publik; Logikanya (menurut Harold Nicholson) bahwa:

- a. Diplomat abdi negara, bertanggungjawab kepada Menteri Luar Negeri (Menlu), Menlu bertanggungjawab kepada Parlemen dan Parlemen bertanggungjawab kepada rakyat berdaulat (Demokrasi Parlementer Inggris).
- b. Diplomasi lebih aman berada di tangan publik dari pada di tangan kelompok elit. Contoh kasus: Senat AS menolak *Treaty of Versailles* yang diajukan Presiden Woodrow Wilson, karena perjanjiannya tidak dilakukan secara terbuka (demokratis); Diplomasi Totaliter (*Totalitarian diplomacy*) Muncul setelah PD-I, karena:
 - 1) Adanya nasionalisme ekstrim yaitu Fuhrer (Jerman), Il Duce (Italia);
 - 2) Adanya nasionalisme ekonomi yaitu munculnya birokrasi yang kuat;
 - 3) Tumbuhnya kesadaran ideologi suatu bangsa dan kecenderungan totaliter yaitu Fasisme Italia, Nazisme Jerman, Fasisme Franco Spanyol;
 - 4) Dalam politik luar negerinya, agresif dalam menghadapi rival dengan sikap kaku dan dalam berunding dengan melaksanakan propaganda; Negara-negara fasis mengagungkan "perang" sehingga mempengaruhi tujuan diplomasi, karena perang merupakan kebijakan yang diinginkan. Dalam forum perundingan sering mereka melemparkan propaganda.

3. Diplomasi Melalui Konferensi. (*Diplomacy by Conference*). Diplomasi Melalui Konferensi mulai muncul dan jadi model pada abad ke 18 yaitu mulai Konferensi Den Haag 1899 dan 1907.

(Diplomasi ini diprakarsai oleh Tsar Nicholas dari Rusia tentang pengawasan senjata untuk pemeliharaan perdamaian dan pelaksanaan perang secara lebih manusiawi). Sejak PD-I *diplomacy by conference* pegang peranan penting karena cepat untuk mengambil keputusan bersama dalam kondisi perang (antara lain Konferensi Cannes, Genoa, Lausanne, Stresa, dll.) Tipe diplomasi ini pernah mengalami kemunduran dengan "**Munich Blunder**" yaitu: Ketika pertemuan Chamberlain (PM Inggris), Hitler, Mussolini, Daladier tahun 1938 di Munich, Chamberlain menyetujui Hitler menganeksasi Sudetenland dari Cekoslowakia untuk mencegah perang, ternyata ini tindakan yang keliru. Diplomasi melalui konferensi diperlukan pra-kondisi sebagai landasan yang dibutuhkan yaitu: Beberapa program pembicaraan harus disetujui lebih dahulu. Perhitungan awal yang matang dan Persiapan pembicaraan awal harus matang antara lain kepentingan yang saling menguntungkan/ bertentangan dan berusaha memecahkannya melalui perundingan. Semasa LBB banyak yang gagal karena negara-negara besar tidak menjadi peserta dan negara-negara besar yang jadi anggota tidak patuh pada prinsip-prinsip LBB. Hal ini berbeda dengan PBB, karena hampir semua negara di dunia ingin menjadi anggota PBB, karena semua negara ingin diakui kedaulatannya dan diakui sebagai anggota masyarakat dunia. Diplomasi berjalan secara multilateral, diplomasi publik sehingga publik mengetahui proses perundingan secara transparan; Diplomasi dilakukan secara tetap dan berkala. Diplomasi dengan debat umum secara parlementer, dengan voting, dsb. Diplomasi melibatkan blok-blok yang ada di dunia; Diplomasi mayoritas dan keputusannya melalui voting mayoritas. Diplomasi konferensi ini merupakan diplomasi multilateral, dengan debat umum, voting, dsb. Diplomasi konferensi paling tidak, dapat mengurangi ketegangan internasional, karena dapat memfokuskan pendapat umum dunia dan mencegah konflik.

a. Kelebihan:

1) Masalah internasional penting dapat didiskusikan

- secara terbuka untuk mengatasi masalah konflik;
- 2) Pertemuan dilakukan secara periodik oleh PBB untuk menghentikan agresi.
- b. Kekurangan:
- 1) Suatu negara sulit mengubah posisinya apabila telah mengambil sikap tegas;
 - 2) Para delegasi lebih sering memainkan peran berdasar suara publik daripada konsentrasi kepada masalah yang akan dipecahkan;
 - 3) Pandangan umum menyebabkan para wakil mengambil pendirian atas masalah-masalah yang tidak vital bagi kepentingan nasionalnya;
 - 4) Voting sering tidak memecahkan masalah yang sesungguhnya.
4. **Diplomasi Diam-diam.** Istilah "Diplomasi Diam-diam" sangat erat kaitannya dengan diplomasi PBB. Diplomasi diam-diam berbeda dengan "diplomasi rahasia" dan tidak begitu berlawanan dengan "diplomasi publik", tetapi saling melengkapi karena sering dipraktikkan di PBB. Diplomasi diam-diam dipraktikkan di PBB terutama antara para diplomat yang masing-masing negaranya tak punya hubungan diplomatik tapi punya perwakilan tetap di PBB. Faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya diplomasi diam-diam di PBB antara lain:
- a. Meningkatnya pengaruh Sekjen PBB dalam penyelesaian perselisihan; adanya perwakilan tetap di PBB; perkembangan kelompok -kelompok dan blok - blok pertemuan.
 - b. Banyak masalah yang tak bisa diselesaikan melalui diplomasi publik tetapi dapat diselesaikan melalui diplomasi diam-diam;
5. **Diplomasi Preventif.** Diplomasi Preventif muncul dari negara-negara baru Dunia Ketiga dalam suasana Perang Dingin. Mereka khawatir terseret dalam konflik dua blok dan mereka berlindung lewat PBB. Diplomasi ini dilakukan dengan menjaga perselisihan di Dunia Ketiga agar tetap bersifat lokal, terpisah dengan

mencegah agar situasi Perang Dingin tidak meluas ke kawasan mereka. Diplomasi ini menggabungkan elemen-elemen diplomasi publik dan diplomasi diam-diam. Jadi negara-negara ketiga menggunakan PBB sebagai penyeimbang hubungan internasional yang efektif dalam Perang Dingin. Keberhasilannya bergantung pada motivasi negara-negara besar untuk menghindari konfrontasi dan keyakinan mereka bahwa PBB akan berfungsi lebih netral untuk mencegah keterlibatan superpowers dalam konflik di Dunia Ketiga. Diplomasi ini bisa berfungsi secara efektif apabila negara adikuasa mengizinkan negara-negara Dunia Ketiga melakukan hal itu, walaupun dalam kenyataan negara-negara Non-Blok merupakan suatu kekuatan besar di PBB. Sekjen PBB pegang peranan penting dalam diplomasi preventif terutama dalam pembentukan pasukan perdamaian PBB. Pasukan Perdamaian PBB beroperasi dalam dua kondisi. Negara yang akan ditempati pasukan PBB harus memberi persetujuan. Pasukan PBB tak boleh ikut campur konflik internal murni dan tak boleh membantu salah satu pihak; Dengan demikian, sarana utama Diplomasi Preventif adalah "kehadiran PBB" dalam konflik periferal dan PBB sebagai penjaga perdamaian dengan pasukan perdamaianya.

- 6. Diplomasi Sumber Daya.** Sumber daya bahan-bahan mentah penting dan langka (minyak bumi, besi, baja, batubara, uranium, dll.) punya peranan besar dalam perkembangan industri, ekonomi, politik suatu negara. Bahan-bahan itu mendukung kekuatan negara namun tidak merata di setiap negara. Usaha-usaha untuk penguasaan bahan-bahan mentah tersebut sering menimbulkan konflik. Usaha ini menimbulkan tipe "diplomasi sumber daya" yaitu: "usaha/diplomasi yang dilakukan oleh negara-negara untuk memperoleh, menggunakan dan mempertahankan bahan-bahan mentah yang langka dan penting bagi keuntungan negara. Negara-negara yang memiliki sumber daya strategis tersebut bisa memperoleh keuntungan apabila mereka membentuk front atau organisasi bersama. Contoh: OPEC. Contoh Kasus: Tahun 1919 PM Clemenceu (Perancis)

menyatakan, siapa menguasai minyak akan menguasai power. Akhir PD-II pertarungan diplomatik penguasaan minyak terjadi antara Inggris, Perancis, AS, Uni Soviet, dll untuk memperebutkan wilayah Timur Tengah, khususnya Iran. Tahun 1973, selama Perang Yom Kippur antara Arab- Israel, minyak pegang peranan penting. Embargo minyak dilakukan oleh OPEC terhadap negara-negara Barat pendukung Israel. Akibatnya: krisis minyak, harga minyak naik; negara- negara OPEC meningkat GNP-nya; negara-negara berkembang memiliki posisi menentukan dalam politik internasional. Diplomasi minyak telah menjadi proses diplomasi baru, karena hingga kini minyak bumi masih merupakan sumber energi utama dunia dan memainkan peranan vital dalam diplomasi internasional. Arab Spring, Konflik di benua Afrika tidak terlepas dari Diplomasi SD.

5.13 Perang

1. (Pengertian Arti Luas)/ Menurut batasan Encyclopedia Americana *War is hostile contentions by means of arms forces carried on between nations, states or rulers or between parties in the same nations or states*; (Perang adalah satu pertentangan dengan menggunakan angkatan bersenjata yang dijalankan antara bangsa-bangsa, negara-negara atau penguasa yang ada dalam bangsa atau negara yang sama). *War is the employments of arms forces against foreign powers or against opposing parties in the stale*. (Perang adalah penggunaan angkatan bersenjata melawan kekuasaan asing atau melawan golongan-golongan yang menentang dalam negara). Dari kedua definisi tersebut tampak jelas bahwa unsur-unsur perang adalah adanya pertentangan dan penggunaan AB.
2. (Pengertian Arti Sempit) Prof. Quincy Wright: "A Study of War", *War is the legal condition with equally permits two or more hostile groups, carry on a conflict by arms forces*; (Perang adalah suatu kondisi yang sah yang memperbolehkan dua atau lebih kelompok yang bertentangan, melaksanakan pertentangannya dengan menggunakan AB). Karl von Clausewitz, "On War": *War is only*

apart of political interpost thereof by means in independence therein itself. (Perang hanya merupakan bagian dari hubungan politik, karena itu tidak berdiri sendiri); *War is nothing but a continuation of political with force with admixture of other means.* (Perang tak lain adalah suatu kelanjutan dari hubungan politik dengan cara kekerasan dan dengan campuran/kombinasi cara lain)

3. Diplomasi Sebagai Pencegah Perang (Diplomasi Dalam Pengendalian Persenjataan). Dalam pengertian sehari-hari istilah perlucutan senjata (*disarmament*) cukup inklusif. Istilah tersebut bisa mengartikan segala sesuatu mulai dari pernyataan tidak sah untuk semua arsenal dan pembangunan militer.
4. Larangan terhadap senjata-senjata tersebut demi kepentingan Diplomasi SD.
5. kemanusiaan dan mencegah perang, sampai pada pengimplementasian perjanjian-perjanjian tertentu yang dirancang untuk mencegah kecelakaan yang bisa menimbulkan pecahnya peperangan.
6. Untuk menjernihkan permasalahan tersebut perlu dibedakan antara "perlucutan senjata" (*disarmament*) dan "pengendalian senjata" (*arms control*), serta kedua kategori dalam pengendalian senjata;
7. "Perlucutan senjata", secara absolut menghendaki pemusnahan persenjataan secara global dan pembubaran seluruh angkatan bersenjata.
8. "Pengendalian senjata", merupakan konsep yang relatif menghendaki pembatasan terhadap jenis-jenis senjata tertentu atau pengurangan tingkat persenjataan;
9. Kesempatan untuk mencapai perlucutan senjata sangat kecil, sehingga para pendukungnya sering dianggap sebagai "kaum Utopian" (penghayal) dan propagandis.
10. Pengendalian senjata sering menjadi tujuan politik suatu negara dan merupakan subjek yang perlu dipertimbangkan secara serius.

11. Pengendalian senjata dapat dibagi dalam dua kategori yaitu: Pengurangan senjata (*arms reduction*), dan Pembatasan senjata (*arms limitation*).
12. "Pengurangan senjata" (perlucutan senjata parsial) mengimplikasikan suatu kesepakatan bersama mengenai tingkat persenjataan bagi negara-negara yang terlibat.
13. "Pembatasan senjata", mencakup berbagai jenis persetujuan internasional yang didesain untuk membatasi peperangan dan untuk mencegah pecahnya perang yang disebabkan oleh kecelakaan atau kelalaian. Semua perundingan tentang pengendalian senjata dalam arti pembatasan dan pengurangan persenjataan dilakukan antara blok Barat dan Blok Timur melalui berbagai tahap dan periode yang cukup lama.

5.14 Diplomasi Sebagai Pencegah Perang (Kasus Di Indonesia)

1. Perundingan Hooge Veluwe

- a. Sir Archibald Clark Kerr, diplomat Inggris mengundang Indonesia dan Belanda berunding di Hooge Veluwe.
- b. Perundingan Hooge Veluwe di kota Negeri Belanda tgl 14-21 April 1946, merupakan lanjutan pembicaraan-2 atas persetujuan yang telah disepakati delegasi Indonesia dan Belanda antara Sjahrir dan Van Mook.
- c. Selain Van Mook, ikut serta Dr. Indenburg (Sekretaris Kabinet), Sultan Hamid (Sultan Pontianak), dan Sario Santoso (Kolonel KNIL).
- d. Selain Sjahrir, dari pihak Republik Indonesia ikut serta Menteri Kehakiman Mr. Suwandi, Menteri Dalam Negeri Dr. Sudarsono, dan Sekretaris Kabinet Mr. A.G. Pringgodigdo.
- e. Dengan pesawat yang sama juga berangkat Sir Archibald Clark Keer beserta stafnya ke Hooge Veluwe.
- f. Pemberangkatan para delegasi Indonesia tanggal 4 April 1946 dengan menggunakan pesawat terbang Maskapai Penerbangan KLM, Belanda..
- g. Dalam perundingan Hooge Veluwe ini pihak-2 yang berunding: Delegasi Belanda terdiri dari:

- 1) Perdana Menteri Prof. Ir. Dr. W. Schermerhorn,
 - 2) Menteri Daerah-daerah Seberang Lautan Prof. Dr. J.H. Logemann,
 - 3) Menteri Luar Negeri Dr. J.H. Van Roijen,
 - 4) Letnan Gubernur Jenderal Dr. H.J. Van Mook,
 - 5) Prof. Baron van Asbeck,
 - 6) Sultan Hamid II,
 - 7) dan Letnan Kolonel Surio Santoso. Delegasi Republik Indonesia terdiri dari:
 - 8) Menteri Kehakiman Mr. Suwandi,
 - 9) Menteri Dalam Negeri Dr. Sudarsono,
 - 10) dan Sekretaris Kabinet Mr. A.G. Pringgodigdo.
 - 11) Pihak perantara Sir Archibald Clark Keer beserta stafnya
- h.** Perundingan Hooge Veluwe gagal, karena delegasi Belanda tidak berpijak pada kesepakatan tanggal 27 Maret 1946 yang telah disetujui bersama oleh Sjahrir-Van Mook. Kepada delegasi Indonesia ditawarkan "**protokol**" bukan "**perjanjian**".
- 1) Alasannya, Belanda tidak mengakui Republik Indonesia. Protokol yang ditawarkan isinya juga menyimpang dari kesepakatan 17 Maret 1946.
 - 2) Protokol hanya mencantumkan suatu Federasi Persemakmuran Indonesia, pengakuan Pemerintah Belanda atas de facto Republik Indonesia atas **Jawa** (bukan Pulau Jawa dan Sumatera).
 - 3) Kegagalan perundingan "Hooge Veluwe" ini lebih banyak disebabkan oleh pihak Belanda yang tidak dengan sungguh- sungguh menyelesaikan sengketa dengan Indonesia. Yang menarik bahwa Belanda mampu membuat perpecahan di antara orang Indonesia dengan ikut sertanya dua orang Indonesia dalam delegasi Belanda.
- i.** Pada tanggal 2 Mei 1946 Van Mook kembali membawa usul pemerintah Belanda terdiri dari tiga pokok pikiran yaitu:
- 1) Pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia

sebagai bagian dari persemakmuran (*gemeenebest*) Indonesia yang berbentuk federasi (serikat).

- 2) Persemakmuran Indonesia Serikat di satu pihak dengan Nederland, Suriname, dan Curacao di lain pihak akan merupakan bagian-2 dari kerajaan Belanda.
- 3) Pemerintah Belanda akan mengakui *de facto* kekuasaan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera dikurangi dengan daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Inggris dan Belanda (Marwati Djoened Poesponegoro, 1984:127).
- 4) Pihak Indonesia menolak usul baru Van Mook dan selanjutnya justru mengajukan usul baru terhadap Belanda yang isinya:
 - a) Republik Indonesia berkuasa *de facto* atas Jawa, Madura, Sumatera, ditambah dengan daerah-daerah yang dikuasai oleh tentara Inggris dan Belanda.
 - b) Republik Indonesia menolak ikatan kenegaraan (dalam hal ini *gemeenebest*, *rijkverband*, koloni, *trusteeship territory* atau federasi ala Vietnam) dan menghendaki penghentian pengiriman pasukan Belanda ke Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia tidak akan menambah pasukannya.
 - c) Pemerintah Indonesia menolak suatu periode peralihan (*over-gangs-periode*) dibawah kedaulatan Belanda (Mawarti Djoened Poesponegoro, 1984:127).

2. Perundingan Linggarjati.

- a. Gagalnya perundingan di Hoogwe Veluwe, kemudian diselenggarakan kembali perundingan di Linggarjati, Jawa Barat. Perjanjian Linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia utk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Perundingan Linggarjati terlaksana pada 11 - 15 November 1946 di Linggarjati, dekat Cirebon. Dalam

perundingan ini, dihadiri oleh perwakilan dari Indonesia dan Belanda. Delegasi Belanda dipimpin oleh **Prof. Scermerhorn**, dengan anggotanya: Max Van Poll, F. de Baer, dan H.J. Van Mook. Delegasi Indonesia dipimpin oleh **Sutan Syahrir** dengan anggotanya ialah: Mr. Moh. Roem, Mr. Susanto Tirtoprojo, dan A.K. Gani. Penengah dan pemimpin sidang adalah Lord Killearn, dengan saksi-saksi lainnya yakni Amir Syarifudin, dr. Leimena, dr. Sudarsono, dan Ali Budiarjo. Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta juga hadir di dalam perundingan Linggarjati itu. Pada tanggal 15 November 1946, hasil perundingan diumumkan dan disetujui oleh kedua belah pihak. Secara resmi, naskah hasil perundingan ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947.

- b. Pokok-pokok hasil perundingan sbb:
- 1) Belanda mengakui de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura.
 - 2) Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat pada tanggal 1 Januari 1949.
 - 3) Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam menyelenggarakan berdirinya negara Indonesia Serikat.
 - 4) Pembentukan RIS akan diadakan sebelum tanggal 1 Januari 1949.
 - 5) RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai Ketua
 - 6) Isi dari perundingan Linggarjati secara lengkap terdiri dari 17 pasal dan 1 pasal penutup.
- c. Terjadi pro dan kontra mengenai perjanjian Linggarjati tetapi akhirnya Indonesia menandatangani perjanjian ini pada 25 Maret 1947 dengan alasan :
- 1) Adanya keyakinan bahwa jalan damai merupakan jalan yang paling baik dan aman untuk mencapai tujuan Bangsa Indonesia.

- 2) Cara damai akan mendatangkan simpati dan dukungan internasional yang harus diperhitungkan oleh lawan.
 - 3) Keadaan militer Indonesia yang masih lemah jika menyetujui perundingan memungkinkan Indonesia memperoleh kesempatan untuk memperkuat militer.
 - 4) Jalan diplomasi dipandang sebagai jalan untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan dan penegakan Negara RI yang berdaulat.
- d. Dampak Perundingan Secara Umum:
- 1) Hasil perundingan tetap memberikan kesempatan untuk Belanda membangun kedaulatannya di Indonesia.
 - 2) Belanda terpaksa untuk mengakui kedaulatan wilayah Indonesia (pengakuan de facto dari Belanda).
 - 3) Negara asing lainnya yang berangsur-angsur mengakui kekuasaan RI.
 - 4) Meskipun kesepakatan pembentukan RIS yang membuat Indonesia harus menjadi bagian persemakmuran kerajaan Belanda, tetap memberikan angin segar kepada Indonesia yang menginginkan kedaulatan.
 - 5) Perundingan Linggarjati ini membuat Indonesia terhindar dari banyaknya korban jiwa yang jatuh jika dibanding dengan melakukan peperangan.
- e. Dampak Negatif Perundingan
- 1) Terjadi gejolak dalam tubuh pemerintahan Indonesia, beberapa partai seperti Masyumi, PNI, dan pengikut Tan Malaka begitu keras menentang perjanjian Linggarjati. Walaupun,
 - 2) KNIP tidak segera mengesahkan perundingan Linggarjati ini karena dianggap terlalu menguntungkan pihak Belanda. KNIP akhirnya mengesahkan perjanjian Linggarjati tgl 25 Maret 1947 setelah Hatta mengancam Soekarno dan ia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil Presiden Indonesia. Dampak yang lebih terasa adalah adanya **Agresi Militer**

Belanda-I terhadap Indonesia. Diakibatkan karena Belanda menganggap Indonesia tidak patuh terhadap perjanjian Linggarjati dimana Indonesia mengadakan hubungan diplomatik dengan negara lain, padahal itu bukan wewenangnya. Tgl 20 Juli 1947 Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. **Agresi Militer Belanda I** pun dilakukan keesokan harinya pada tanggal 21 Juli 1947 dimana Belanda melancarkan serangan ke daerah Jawa dan Sumatera.

- f. Pelanggaran Terhadap Perjanjian Linggarjati (Agresi Militer Belanda-I).
- 1) Pada tanggal 15 Juli 1947, van Mook mengeluarkan ultimatum supaya RI menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasi. Pimpinan RI menolak permintaan Belanda ini.
 - 2) "**Operatie Product**" (**Operasi Produk**) atau yang dikenal di Indonesia dengan nama **Agresi Militer Belanda I** adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Rep. Indonesia yang dilaksanakan dari tgl. 27 Juli s.d 5 Agustus 1947.
 - 3) Sebagai kedok untuk dunia internasional, Belanda menamakan agresi militer ini sebagai **Aksi Polisionil**, dan menyatakan tindakan ini sebagai urusan dalam negeri. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil Perundingan Linggarjati.
 - 4) Letnan Gubernur Jenderal Belanda, Dr. H.J. van Mook menyampaikan pidato radio dimana dia menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Linggarjati. Pada saat itu jumlah tentara Belanda telah mencapai lebih dari 100 ribu orang, dengan persenjataan yang modern, termasuk persenjataan berat yang dihibahkan oleh tentara Inggris dan tentara Australia. Tujuan utama agresi Belanda adalah merebut

daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu **Sumatera Timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur**. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah perkebunan tembakau, di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara, dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah di mana terdapat perkebunan tebu dan pabrik-pabrik gula dan ladang minyak. Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah-daerah di wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan, perkebunan dan pertambangan. Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik Indonesia dengan simbol Palang Merah membawa obat-obatan dari Singapura, sumbangan Palang Merah Malaya ditembak jatuh oleh Belanda. Gugur akibat serangan Belanda tsb, Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisucipto, Komodor Muda Udara dr. Abdulrahman Saleh dan Perwira Muda Udara I Adisumarmo Wiryokusumo.

- 5) Republik Indonesia secara resmi mengadukan agresi militer Belanda ke PBB, karena agresi militer tersebut dinilai telah melanggar suatu perjanjian Internasional, yaitu Perjanjian Linggarjati.
- g. Reaksi Dunia terhadap Agresi Militer Belanda-I.
 - 1) Belanda tidak memperhitungkan reaksi keras dari dunia internasional, termasuk Inggris, yang tidak lagi menyetujui penyelesaian secara militer.
 - 2) Atas permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947 masalah agresi militer yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda **Dewan Keamanan PBB (DK PPB)**, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjata dihentikan.
 - 3) DK PBB de facto mengakui eksistensi Republik

Indonesia. Hal ini terbukti dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947, DK PBB secara resmi menggunakan nama **INDONESIA, dan bukan *Netherlands Indies***.

- 4) Sejak resolusi pertama, yaitu resolusi No. 27 tanggal 1 Agustus 1947, resolusi No. 30 dan 31 tanggal 25 Agustus 1947, resolusi No. 36 tanggal 1 November 1947, serta resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949, DK PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan Belanda sebagai ***The Indonesian Question***.
- 5) Atas tekanan DK PBB, tgl 15 Agustus 1947 Belanda akhirnya menyatakan akan menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran. Pada 17 Agustus 1947 Pem. Rep. Indonesia dan Pemerintah Belanda menerima Resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata.
- 6) Pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya hanyalah sebagai *Committee of Good Offices for Indonesia* (Komite Jasa Baik Untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN), karena beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland dan Amerika Serikat menunjuk Dr. Frank Graham. Menjadi cikal bakal **Perundingan Renville** Pada tanggal 18 September 1947.

3. Perundingan Renville

- a. Australia dan Belgia kemudian menentukan anggota KTN Ketiga, yaitu Amerika Serikat. Tugas Pokok KTN adalah mencari penyelesaian damai terhadap masalah perselisihan antara indonesia dan belanda. KTN menawarkan perundingan kepada kedua negara. Amerika Serikat mengusulkan tempat pelaksanaan perundingan yang diluar

wilayah pendudukan Belanda maupun wilayah Republik Indonesia. Tempat yang dimaksud adalah sebuah **kapal AS bernama Renville**, yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Perundingan itu terkenal dengan sebutan “**Perundingan Renville**”. Dalam perundingan itu Delegasi Indonesia dipimpin oleh **Amir Syarifuddin**, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh **Abdullah Wijoyoatmojo**. Perundingan berlangsung alot karena baik Indonesia maupun Belanda cenderung berpegang teguh pd pendirian masing- masing. Pd tgl 17 Januari 1948, akhirnya hasil perundingan Renville disepakati dan ditandatangani.

- b. Hasil Perundingan Renville, meliputi:
 - 1) Penghentian tembak-menembak.
 - 2) Daerah-daerah di belakang garis van Mook hrs dikosongkan dari pasukan RI -Belanda bebas membentuk negara-2 federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui plebisit terlebih dahulu.
 - 3) Dalam Uni Indonesia-Belanda, Negara Indonesia Serikat akan sederajat dengan Kerajaan Belanda.
 - 4) Akibat perundingan Renville, wilayah Indonesia yang diakui menjadi semakin sempit.
 - 5) Hasil Perundingan Renville mengundang reaksi keras dari kalangan partai politik, **hasil perundingan itu memperlihatkan kekalahan perjuangan diplomasi.**
- c. Agresi Militer Belanda-II. Seperti kejadian sebelumnya, hasil Perundingan Renville mengalami kemacetan. Upaya jalan keluar yang ditawarkan oleh KTN selalu mentah kembali karena tidak adanya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda. Indonesia melalui Hatta tetap tegas mempertahankan kedaulatan Indonesia, sementara Belanda terus berupaya mencari cara menjatuhkan wibawa Indonesia. Saat ketegangan semakin memuncak Indonesia dan Belanda mengirimkan nota kepada KTN. Nota itu sama-sama berisi tuduhan terhadap pihak lawan yang tidak menghormati hasil Perundingan Renville. Menjelang tengah

malam tgl 18 Desember 1948, Wali Tinggi Kota Mahkota Belanda Dr. Bell mengumumkan bahwa ***Belanda tidak terikat lagi pada hasil Perundingan Renville***. Tgl 19-12-1948 dini hari, pesawat terbang Belanda membombardir Maguwo (sekarang bandara Adisucipto) dan sejumlah bangunan penting di Yogyakarta. **Peristiwa tersebut mengawali Agresi Militer Belanda II.**

- d. Pemboman dilanjutkan dengan penerjunan Paratroops. Dalam waktu singkat, Yogyakarta, ibukota RI ketika itu, dapat dikuasai. Tujuan Belanda mengadakan Agresi Militer II adalah ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan melakukan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai Ibukota Indonesia pada saat itu. Pihak Belanda sengaja membuat kondisi pusat wilayah Indonesia tidak aman dengan demikian diharapkan akhirnya bangsa Indonesia menyerah dan bersedia menuruti ultimatum yang diajukan oleh pihak Belanda. Keampuhan Strategi Diplomasi Dengan melancarkan agresi militernya yang kedua,
- e. **Belanda ingin menunjukkan kepada dunia bahwa RI beserta TNI-nya secara de facto tidak ada lagi.** Presiden Soekarno dan WkI Presiden Moh. Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibukota, walaupun mereka tahu bahwa dengan demikian mereka akan ditawan oleh musuh. Alasannya, agar mereka dapat melakukan kegiatan diplomasi dengan pihak Belanda. Disamping itu, Belanda tidak mungkin menjalankan serangan secara terus-menerus karena Presiden Panglima Tertinggi Angkatan Perang Indonesia dan wakil presiden menteri pertahanan sudah berada di tangan mereka. Beberapa bulan sebelum melakukan serangan terhadap kota Yogyakarta, Jenderal Sudirman menderita sakit paru-paru yang sangat parah sehingga harus dirawat di rumah sakit dan kemudian dirawat di rumah. Ia berpesan jika Belanda menyerang kembali, maka ia akan memegang kembali pimpinan

Angkatan Perang dan memimpin prajurit-nya melakukan perlawanan gerilya.

- f. Adanya Agresi Militer Belanda II terhadap Indonesia mengakibatkan dihancurkannya beberapa bangunan penting di Yogyakarta, bahkan Yogyakarta sebagai ibukota Indonesia saat itu dikuasai oleh Belanda. Presiden dan Wakil Presiden beserta sejumlah pejabat pemerintah Indonesia berhasil ditawan kemudian diasingkan oleh pihak Belanda. Tujuan Belanda yang ingin menghancurkan kedaulatan Indonesia dan menguasai kembali wilayah Indonesia dengan serangan militer terhadap beberapa daerah penting di Yogyakarta sebagai Ibukota Indonesia dapat digagalkan oleh perjuangan diplomasi. Para pejuang diplomasi antara lain Palar, Sujatmoko, Sumitro dan Sudarmo yang berkeliling di luar negeri. Menunjukkan kepada Dunia Internasional bahwa Agresi Militer Belanda merupakan bentuk tindakan melanggar perjanjian damai (Hasil perundingan Renville) Meyakinkan dunia bahwa RI cinta damai, terbukti dari sikap, mentaati hasil perundingan Renville dan penghargaan terhadap KTN. Membuktikan bahwa RI masih berdaulat dengan fakta masih berlangsungnya pemerintahan melalui Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
- g. Dalam waktu satu bulan, pasukan TNI berhasil melakukan konsolidasi dan mulai memberikan pukulan secara teratur kepada musuh. Seluruh Jawa dan Sumatra menjadi satu daerah gerilya yang menyeluruh. Tekanan terhadap pasukan Belanda ditingkatkan, penghadangan terhadap konvoi perbekalan tentara Belanda berhasil dilakukan. Serangan Umum yang dilaksanakan terhadap kota-kota yang diduduki Belanda mulai dilaksanakan oleh pasukan TNI. Serangan yang paling terkenal adalah **Serangan Umum 1 Maret 1949** terhadap kota Yogyakarta dbp. Komandan Brigade X Letnan Kolonel Soeharto. Pasukan ini berhasil **menduduki kota Yogyakarta selama enam jam**.
- h. Presiden Soekarno mengintruksikan kepada Menteri

Kemakmuran Syafruddin Prawiranegara (yang kebetulan berada di Sumatera) untuk membentuk pemerintahan darurat, jika pemerintah RI Yogyakarta tidak dapat berfungsi lagi. Syafruddin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat. Selama Agresi Militer II, Belanda terus menerus memprogandakan bahwa pemerintah di Indonesia sudah tidak ada lagi. Propaganda dapat digagalkan oleh PDRI bahkan berhasil menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan dalam tubuh RI masih berlangsung.

- i. Pada tanggal 23 Desember 1948, PDRI mampu memberikan instruksi lewat radio kepada Wakil RI di PBB yang mengundang simpati internasional. Kerja keras perjuangan diplomasi mampu mengundang simpati internasional terhadap Indonesia. Amerika Serikat mendesak Belanda untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah RI. DK PBB mendesak Belanda untuk menghentikan operasi militer dan membebaskan para pemimpin Indonesia. Desakan gencar dunia internasional akhirnya membuat Belanda mengakhiri aksi militernya kedua.

4. Perundingan Roem-Roijen.

- a. Untuk menjamin terlaksanakannya penghentian Agresi Militer Belanda II, PBB membentuk **United Nations Commission for Indonesia (UNCI)** atau komisi PBB untuk Indonesia. UNCI dipimpin oleh Merle Cochran (Amerika Serikat) dibantu Critchley (Australia) dan Harremans (Belgia). Hasil kerja UNCI diantaranya mengadakan Perjanjian Roem- Royen antara Indonesia Belanda. Pd 14 April 1949 dimulai **Perundingan Roem-Roijen** di Hotel Des Indes, Jakarta. Delegasi Indonesia dpp. Moh. Roem, dengan anggotanya Ali Sastro Amijoyo, Dr. Leimena, Ir. Juanda, Prof. Supomo, dan Latuharhary. Yang bertindak sebagai penasihat adalah Sutan Syahrir, Ir. Laok, dan Moh Natsir Delegasi Belanda diketuai oleh Dr. J.H. Van Royen dengan

anggota Bloom, Jacob, dr. Van, dr Vede, Dr. P.J Koets, Van Hoogstratendan, dan Dr Gieben. Tokoh UNCI yang ikut berperan dlm perundingan adalah Merle Cohran dari Amerika Serikat. Hasil perundingan Roem-Roijen akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta.

- b. Hasil perundingan Roem-Roijen menurut Pernyataan Indonesia:
 - 1) Perintah kepada TNI untuk menghentikan perang Gerilya.
 - 2) Bekerja sama mengendalikan perdamaian, ketertiban dan keamanan.
 - 3) Turut serta dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag untuk mempercepat pengakuan kedaulatan kepada Negara Indonesia Serikat secara lengkap tanpa syarat.
- c. Hasil Perundingan menurut Pernyataan Belanda:
 - 1) Menyetujui pemulihan pemerintahan RI di Yogyakarta.
 - 2) Menjamin penghentian operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik.
 - 3) Menyetujui RI sebagai negara bagian dalam negara Indonesia Serikat.
 - 4) Berusaha sungguh-sungguh menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB). PDRI tidak menyetujui hasil perundingan Roem-Roijen yang cenderung melemahkan wibawa Indonesia.

5. Konferensi Meja Bundar (KMB)

- a. Pada tanggal. 23 Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar dimulai di Den Haag, Belanda sebagai kelanjutan hasil Perundingan Roem-Roijen.. Konferensi ini berlangsung hingga tanggal 2 November 1949. Delegasi Indonesia terdiri dari Drs. Hatta (Ketua), Nir. Moh. Roem, Prof Dr. Mr. Supomo, Dr. J. Leitnena, Mr. Ali Sastroamicijojo, Ir. Djuanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang dan Mr. Muwardi. Delegasi Belanda dpp.

oleh Mr. van Maarseveen, Delegasi (Bijeenkomst voor Federaal Overleg) BFO diketuai Sultan Hamid II dari Pontianak. UNCI diwakili Chritchley. Konferensi dilakukan untuk mengakhiri perselisihan Indonesia. Belanda dengan jalan melaksanakan perjanjian-perjanjian yang telah diadakan antara Republik Indonesia dengan Belanda, terutama mengenai pembentukan Negara Serikat.

b. Hasil Perundingan:

- 1) Indonesia menjadi negara Serikat dengan nama : Republik Indonesia Serikat.
- 2) RIS dan Kerajaan Belanda merupakan UNI, UNI Indonesia- Belanda itu dikepalai oleh Ratu Kerajaan Belanda.
- 3) Penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada Indonesia akan dilakukan selambat-lambatnya pada akhir tahun 1949.
- 4) Semua hutang bekas Hindia-Belanda akan dipikul RIS.
- 5) TNI menjadi inti tentera RIS dan berangsur-angsur akan mengambil-alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah RIS.
- 6) Kedudukan Irian Barat akan ditentukan selamalamanya 1 tahun sesudah penyerahan kedaulatan.

c. Kerajaan Nederland menjerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut, dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan atas dasar ketentuan-kedaulatan pada Konstitusinya, rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Keradjaan Nederland. edaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. KMB berlangsung dalam suasana yang alot karena beberapa masalah antara lain soal Uni Indonesia-Belanda dan utang. Dengan tercapainya kesepakatan Meja Bundar, maka kedudukan Indonesia telah diakui sebagai Negara yang

berdaulat penuh walaupun Irian Barat masih belum termasuk di dalamnya. Salah satu keputusan terpenting dari KMB bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Penandatanganan naskah itu sendiri merupakan puncak dari diplomasi Indonesia di forum internasional untuk mempertahankan kemerdekaan. Penandatanganan akta penyerahan kedaulatan dilakukan di ruang takhta Amsterdam, oleh Ratu Juliana bersama Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan A.M.J.A. Sasseu, dan Drs. Moh. Hatta. Pada saat yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda, A.H.S. Lovink dalam suatu upacara di Istana Merdeka menandatangani naskah penyerahan kedaulatan.

6. Perjuangan Pembebasan Irian Barat

- a. Salah satu keputusan dalam KMB (27 Desember 1949) Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya, kecuali wilayah Irian Barat yang rencananya akan dikembalikan setahun kemudian. Setelah pengakuan kedaulatan, Belanda tidak juga menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Dalam upaya membebaskan wilayah Irian Barat dari cengkeraman Belanda Pemerintah RI pertama mengambil langkah diplomasi dilakukan secara bilateral baik dengan Pemerintah Belanda maupun dengan dunia Internasional. Perundingan (Diplomasi) dengan pemerintah Belanda terjadi pertama kali pada masa Kabinet Natsir tahun 1950 tetapi gagal, bahkan pada tahun 1952 secara sepihak Belanda memasukkan Irian Barat dalam wilayah kerajaan Belanda. Upaya diplomasi internasional dilakukan oleh Kabinet Sastroamijoyo yaitu dengan membawa masalah Irian Barat ke forum PBB, tapi tidak membawa hasil. Pada masa Kabinet Burhanuddin, Belanda menanggapi bahwa masalah Irian Barat merupakan masalah antara Indonesia - Belanda dan mengajukan usul yang berisi tentang penempatan Irian Barat di bawah Uni Indonesia - Belanda.

- b. Karena Belanda tidak pernah Menunjukkan etiked baik dalam menyelesaikan masalah Irian Barat maka pemerintah RI mengambil langkah-langkah sbb:
- 1) Hubungan Indonesia-Belanda diubah dari United statusnya menjadi hubungan biasa.
 - 2) Pada tanggal 3 Mei 1956 melakukan pembatalan hasil-hasil KMB.
 - 3) Pada tanggal 17 Agustus 1956 membentuk Provinsi Irian Barat yang berkedudukan di Saosiu dan menunjuk Sultan Tidore, Zaenal Abidin Syah sebagai gubernurnya.
 - 4) Pada tanggal 18 November 1957 diadakan Rapat Umum Pembebasan Irian Barat.
 - 5) Pada tanggal 5 Desember 1957 melarang semua film yang berbahasa Belanda, kapal terbang Belanda juga dilarang mendarat dan terbang di wilayah Republik Indonesia.
 - 6) Pada tanggal 5 Desember 1958 melakukan penghentian semua kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. Dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1958 dilakukan pengambilalihan modal Belanda di Indonesia.
 - 7) Pada tanggal 19 Februari 1958 dibentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat
 - 8) Pada tanggal 17 Agustus 1960 Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.
 - 9) Menasionalisasi 700 perusahaan milik Belanda di Indonesia. Sementara itu pemerintah Belanda meningkatkan kekuatan militernya dengan mengirimkan Kapal Induk Karel Doorman ke Irian Barat. Situasi semakin memanas dan pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 1961 kembali dibicarakan masalah Irian Barat kepada Indonesia dengan perantara PBB. Pemerintah berkesimpulan Belanda tidak ingin menyerahkan Irian Barat pada Indonesia, sehingga tidak ada jalan lain dan harus diselesaikan dengan kekerasan

senjata.

- c. Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno di Jogjakarta menyampaikan suatu Komando dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan **Tri Komando Rakyat (Trikor)** yang isinya dapat diuraikan sebagai berikut :
- 1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Kolonial Belanda.
 - 2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia.
 - 3) Bersiap-siap untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia.
- d. Realisasi pertama dari Tri Kora adalah pembentukan Komando Operasi yang diberi nama Komando Mandala pembebasan Irian Barat pada tanggal 2 Januari 1962 dan Mayjend. Soeharto ditunjuk sebagai komandannya dengan tugas antara lain sebagai berikut :
- 1) Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan Operasi Militer guna mengembalikan wilayah Irian Barat ke dalam kesatuan RI. **Operasi militer itu dinamakan "Operasi Jaya Wijaya"**.
 - 2) Eksploitasi, dimulai awal tahun 1963 dengan mengadakan serangan terbuka guna menguasai pos-pos musuh yang penting.
 - 3) Konsolidasi, dilakukan pada tahun 1964 dengan mendudukkan kekuasaan RI secara mutlak di Irian Barat.

RANGKUMAN

1. Diplomasi artinya perundingan atau perjanjian yang dibuat untuk disepakati. Hakikat diplomasi adalah seni atau praktik bernegosiasi yang biasanya dilakukan oleh seorang diplomat untuk mendapatkan keuntungan dalam rangka mencapai tujuan suatu negara.
2. Aktifitas diplomasi biasanya terkait dengan hubungan internasional, atau hubungan antar negara dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam kancah internasional.
3. Terdapat beberapa teori dalam hubungan internasional, antara lain meliputi: realism, liberalism, constructivism, dan feminism.
4. Terdapat beberapa pola hubungan internasional, meliputi: pola kerjasama, pola konflik, pola kompetisi, dan pola akomodasi.
5. Tujuan nasional suatu negara dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu tujuan vital dan tujuan variabel.
6. Perspektif makna diplomasi disampaikan oleh para ahli, meliputi: Sir Ernest Satow, Harold Nicholson, KM Panikkar, Svarlien, Ivo D. Duchacek, Karl Von Clausewitz, Hans J. Morgenthau, SL Roy.
7. Perang dingin lebih berbahaya dari perang panas. Perang dingin bisa diselesaikan melalui media diplomasi.
8. Détente adalah pengurangan hubungan ketegangan/permusuhan antara dua super powers.
9. Terdapat beberapa tipe diplomasi yang banyak dilaksanakan, meliputi: diplomasi komersial, diplomasi demokratis, diplomasi melalui konferensi, diplomasi diam-diam, diplomasi preventif, dan diplomasi sumber daya.

BAGIAN 6
STRATEGI PERANG
SEMESTA



Pada bagian 6 tentang Strategi Perang Semesta, disajikan sub pembahasan, meliputi: definisi strategi, perang semesta, perang gerilya, strategi militer, doktrin pertahanan, implikasi strategis perubahan teknologi militer, pelajaran yang bisa dipetik, peperangan tak terbatas, bentuk-bentuk perang, terminologi perang semesta, penyelenggaraan perang semesta, dan penyiapan perang semesta. Strategi perang semesta diperlukan untuk memenangkan peperangan.

6.1 Definisi Strategi

Kata strategi yang berasal dari bahasa Yunani *strategia* yang digunakan pada zaman dahulu untuk seni atau kemampuan yang dimiliki oleh strategos (*general*). General sendiri dapat diartikan sebagai seseorang yang menjalankan strategi (Heuser, 2010). Salah satu tulisan Latin terkenal tentang strategi militer adalah "*Strategemata*" oleh Frontius yang menunjukkan kompilasi dari strategema atau *tricks of war* (Horwath, 2006:). Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan, dalam pengembangannya konsep mengenai strategi harus terus memiliki perkembangan dan setiap orang mempunyai pendapat atau definisi yang berbeda mengenai strategi.

Definisi strategi secara umum menurut Gray (1999 dalam Baylis 2007) adalah kegiatan yang berhubungan dengan militer dan menggunakan kekuatan untuk mendapatkan tujuan politik tertentu. Pengertian strategi juga dikemukakan oleh banyak *scholars*, diantaranya oleh Moltke (dalam Baylis, 2007) yang menyatakan bahwa strategi adalah adaptasi praktis dari penyelesaian umum untuk mencapai tujuan dalam perang. Sejalan dengan Moltke, Liddell Hart (dalam Baylis, 2007) menyatakan bahwa strategi adalah seni untuk mendistribusikan dan menerapkan cara militer untuk memenuhi tujuan akhir kebijakan. Sementara itu, Andre Beaufre (dalam Baylis,

2007) menyatakan bahwa strategi adalah seni dialektika dari kekuatan atau dua keinginan yang berlawanan yang menggunakan kekuatan untuk mencapai keinginan mereka.

Tiga deskripsi yang dikemukakan sebelumnya memiliki definisi yang berhubungan dekat dengan penggunaan militer untuk tujuan perang (Baylis: 2007). Hal ini menggambarkan asal Secara sederhana, Mahnken (2007) menyatakan bahwa strategi adalah tentang bagaimana memenangkan perang. Meskipun demikian, pada dasarnya penggunaan kata strategi tidak hanya terbatas pada permasalahan perang dan militer. Gray (1999 dalam Baylis, 2007) mendefinisikan strategi sebagai teori, praktik, dan ancaman penggunaan dari kekuatan yang terorganisasi untuk tujuan politik.

Strategi militer merupakan *art* dan *science* untuk membina, menggelar dan menggunakan kekuatan militer. Secara luas, strategi adalah perencanaan, koordinasi, dan pengarahan umum operasi-operasi militer untuk memenuhi tujuan politik dan militer secara keseluruhan. Taktik mengimplementasikan strategi melalui keputusan jangka pendek atas pergerakan pasukan dan penggunaan senjata di medan tempur. Teroris militer besar Carl von Clausewitz mengemukakannya dengan cara lain: “Taktik adalah seni menggunakan pasukan dalam pertempuran, strategi adalah seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan.”

Strategi dan taktik dipandang secara berbeda dalam hampir setiap era sejarah. Perubahan makna kedua istilah ini pada dasarnya adalah perubahan cakupan, seiring berubahnya sifat perang dan masyarakat serta teknologi. Strategi, misalnya, secara harfiah berarti “seni umum” (dari bahasa Yunani *strategos*) dan mulanya menandakan perencanaan kampanye militer murni. Jadi sampai abad 17 dan 18 strategi mencakup soal-soal seperti benteng pertahanan, manuver, dan pasokan. Namun pada abad 19 dan 20, dengan naiknya ideologi-ideologi massa, banyaknya tentara wamil, aliansi global, dan perubahan teknologi yang pesat, strategi militer jadi sulit dibedakan dari kebijakan nasional atau “grand strategy”, yakni perencanaan dan pemanfaatan seluruh sumberdaya masyarakat militer, teknologi,

ekonomi, dan politik. Perubahan cakupan dan makna taktik sebagian besar diakibatkan oleh perubahan teknologi.

Pada kenyataannya taktik selalu sulit dan semakin sulit untuk dibedakan dari strategi sebab keduanya saling bergantung, Bahkan pada abad 20, taktik diistilahkan sebagai strategi operasional. Strategi dibatasi oleh taktik apa saja yang memungkinkan jika ditilik dari ukuran, pelatihan, dan moril pasukan, tipe dan jumlah senjata yang tersedia, daerah, cuaca, serta kualitas dan lokasi pasukan musuh, taktik yang dipakai tergantung pada pertimbangan strategis. Akar strategi dan taktik secara historis berpangkal dari peperangan manusia dan perkembangan pemerintah dan kekaisaran skala besar. Formasi perisai infantri tumpang-tindih taktis yang rapat, disebut phalanx, eksis dalam bentuk awal di Sumeria kuno (sekitar 3000 SM). Perkembangan strategi dan taktik sejajar dengan pertumbuhan, persebaran, dan benturan peradaban-peradaban; penemuan dan perbaikan teknologi dan evolusi kekuasaan, ideologi, dan nasionalisme negara modern.

Dalam Buku Doktrin Pertahanan negara , Dephan RI 2008 Prinsip- prinsip fundamental pertahanan negara yang diyakini kebenarannya, digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam mengembangkan konsep pertahanan sesuai tuntutan tugas pertahanan dalam dinamika perubahan serta dikemas dalam ningkai kepentingan nasional. Pada masa damai Doktrin Pertahanan Negara digunakan sebagai penuntun dan pedoman bagi penyelenggara pertahanan negara dalam menyiapkan kekuatan dan pertahanan dalam kerangka kekuatan untuk daya tangkal yang mampu mencegah setiap hakikat ancaman serta kesiapsiagaan dalam meniadakan ancaman baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Pada keadaan perang Doktrin Pertahanan Negara memberi tuntutan dan pedoman dalam mendayagunakan segenap kekuatan nasional dalam upaya pertahanan guna menyelamatkan negara dan bangsa dari ancaman yang dihadapi.

6.2 Perang Semesta

Perang Semesta adalah sama dengan *Total War*. Apakah perang selalu ditandai dengan pertempuran yang massif dan besar besaran? Bagaimana dengan perang yang dilakukan bersama-sama rakyat yang juga ikut berperang? Melibatkan seluruh kekuatan rakyat dalam menghadapi agresi dan Rakyatnya dipersenjatai. Rakyat sipil (non-kombatan) menjadi kekuatan bersenjata (kombatan) pada saat perang. Sistem berperang ini kerap pula dipertanyakan apakah total war itu sama dengan Perang Gerilya?

Tentang Total War, para ahli berpendapat adalah perang di mana seorang pejuang mengerahkan populasinya untuk produksi perang. Kata total mengacu semata-mata pada tingkat mobilisasi, bukan pada tingkat kehancuran. Kamus Amerika-Inggris mendefinisikan: "perang total" sebagai "Perang yang tidak dibatasi dalam hal senjata yang digunakan, wilayah atau kombatan yang terlibat, atau tujuan yang dikejar, terutama perang di mana hukum perang diabaikan."

Pada pertengahan abad ke-19, para sarjana mengidentifikasi "perang total" sebagai kelas perang yang terpisah. Dalam perang total, pada tingkat yang tidak dapat diterapkan pada konflik yang kurang total, perbedaan antara kombatan dan non-kombatan berkurang dan bahkan kadang-kadang menghilang sepenuhnya karena pihak yang berseberangan dapat mempertimbangkan hampir setiap sumber daya manusia, bahkan non-kombatan, sebagai bagian dari konflik. Upaya perang menggunakan konsep modern dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Konflik militer di mana para peserta memobilisasi semua sumber daya sipil dan militer mereka untuk mendapatkan kemenangan lengkap.
2. Perang di mana seorang belligerent terlibat dalam mobilisasi lengkap dari semua sumber daya yang tersedia dan populasi
3. Konsep modern total war ditelusuri ke Carl Von Clausewitz, yang menekankan pentingnya menghancurkan pasukan musuh dalam pertempuran dan menjelaskan perang seperti yang terus meningkat dalam kekerasan dalam kekerasan menuju keutuhan

teoritis yang mutlak.

4. Karya klasik abad ke-20 adalah perang total Erich Ludendorff (1935).
5. Perang dunia I dan II biasanya dianggap sebagai *total wars*.

6.3 Perang Gerilya

Perang Gerilya adalah Perang si kecil/si lemah melawan si besar/si kuat. Perang Gerilya tidak dapat secara sendiri membawa kemenangan terakhir, perang gerilya hanya untuk memeras darah musuh. Kemenangan terakhir hanyalah dapat dengan tentara yang teratur dalam perang biasa, karena hanya tentara demikianlah yang dapat melakukan *offensif* yang dapat menaklukkan musuh. Perang Gerilya biasanya adalah perang ideologi. Perang Gerilya adalah perang rakyat semesta. Akan tetapi Perang gerilya tidak berarti bahwa seluruh rakyat bertempur, perang gerilya adalah perang rakyat semesta, perang militer, politik, sosial-ekonomi dan psikologis. Agar diperoleh keterangan lebih lengkap tentang perang gerilya, baca *Pokok – pokok perang gerilya.*” AH Nasution (1918 – 2000).

6.4 Strategi Militer

Strategi militer adalah serangkaian ide yang diterapkan oleh organisasi militer untuk mengejar tujuan strategis yang diinginkan. Strategi militer berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan kampanye, pergerakan dan disposisi pasukan, dan penipuan musuh. Doktrin militer adalah ekspresi bagaimana cara angkatan militer menyediakan kampanye, pengoperasian utama, pertempuran, dan keterlibatan. Ini adalah panduan untuk tindakan, lebih dari keras dan peraturan cepat. Doctrine menyediakan bingkai referensi umum di seluruh militer. Itu membantu mengoperasikan operasi, memfasilitas kesadaran dengan menyediakan cara umum mencapai tugas militer. Teori, sejarah, eksperimen, dan praktek doktrin merupakan formulasi dari strategi militer. Tujuannya adalah untuk mendapat inisiatif dan berpikir kreatif

6.5 Doktrin Pertahanan

Doktrin merupakan pelajaran dan pengalaman berharga dari peperangan sebelumnya yang dilakukan oleh bangsa sendiri atau bangsa lain, merefleksikan keadaan perang dan konflik di masa kini serta merupakan antisipasi dari perkembangan intelektual dan teknologi di masa yang akan datang. TNI saat ini masih inferior menghadapi ancaman potensial terbesar dan masih harus menyandarkan diri pada strategi perang asimetris. Doktrin sishanta saat ini yang lebih cenderung memancing musuh masuk kedalam wilayah NKRI dan menghancurkannya di dalam NKRI dengan strategi perang berlarut.

Strategi pertahanan nasional diarahkan untuk mencapai Tiga tujuan fundamental yaitu perlindungan teritorial, Kedaulatan dan keselamatan bangsa. Strategi pertahanan harus memperhatikan perubahan-perubahan dunia internasional, terutama perubahan sifat perang, sifat dan bentuk ancaman dalam dunia yang digerakkan oleh perkembangan pesat di bidang teknologi dan komunikasi.

Faktor perubahan-perubahan dunia internasional, terutama perubahan sifat perang, sifat dan bentuk ancaman dalam dunia yang digerakkan oleh perkembangan pesat di bidang teknologi dan komunikasi. Perang teritorial dengan melakukan pendudukan atas wilayah musuh menjadi tidak populer dan mahal baik secara finansial dan moral. Sifat dan bentuk ancaman menjadi makin kompleks terutama dengan memperhatikan posisi geografis Indonesia.

Bagaimana dengan sistem pertahanan Indonesia yang didasarkan atas doktrin pertahanan semesta (sishanta) dengan paradigma taktik perang gerilya? Perang modern tidak lagi didominasi perang teritorial yang dilakukan dengan konsep-konsep perlawanan bersenjata secara gerilya, melainkan merupakan perang yang menekankan penghancuran infrastruktur vital atau center of gravity. Tidak bisa diatasi dengan mengandalkan cara pikir konvensional.

Kemajuan teknologi informasi dan persenjataan, misalnya munculnya rudal-rudal balistik dan rma, telah mengaburkan batas-batas teritorial, sifat perang menjadi lebih cepat, negara makin rawan

terhadap serangan preemptif, dan menuntut pengembangan kekuatan mobile dan efektif.

6.6 Implikasi Strategis Perubahan Teknologi Militer

Xu Jin, jurnal Cina tentang politik internasional, vol. 1, 2006. Bahwa sejak 1970-an, teknologi informasi telah muncul sebagai komponen kunci dalam peperangan. Revolusi dalam urusan militer, mengubah paradigma pertempuran dari perang mekanis menjadi informasi berbasis kematian senjata dapat dinilai dari potensi, jangkauan, dan akurasinya yang merusak. Peralatan ini di antaranya termasuk komputer, komunikasi, panduan presisi, penginderaan jauh, survei, dirgantara, pemosisian global, kamufase, laser dan teknologi penglihatan malam hari. Semua jenis keakuratan dan keefektifan senjata yang dipandu telah meningkat secara signifikan sejak perang dunia II. Begitu juga efektivitas biaya dari senjata yang dipandu dengan presisi. Senjata baru dan sangat dahsyat untuk menimbun limbah, dan menimbulkan korban maksimum, seluas wilayah masing-masing. Putaran terbaru dari kemajuan militer revolusioner didasarkan pada teknologi informasi dan telah menghasilkan sistem baru yang kuat, terutama persenjataan yang dipandu dengan presisi.

Selama perang dunia II, dibutuhkan rata-rata 800 putaran artileri untuk menghancurkan satu tank. Tetapi artileri yang dipandu dengan laser tembaga saat ini, menetralkan tangki yang sama dapat dicapai hanya dengan tiga putaran. Dalam perang Vietnam, dibutuhkan ratusan pesawat tempur dan ribuan bom untuk menghancurkan satu jembatan.

Namun dalam perang iraq pertama, untuk menghancurkan target hanya diperlukan satu pesawat pembom siluman f-117a untuk menjatuhkan bom tunggal yang dipandu laser ke lubang udara bangunan dan menghancurkan seluruh struktur. Persenjataan presisi juga secara drastis mengurangi korban di medan perang, karena teknologi baru memungkinkan perang untuk diperjuangkan dari pandangan musuh.

Teknologi baru memungkinkan perang untuk diperjuangkan dari pandangan musuh. Pengerahan pasukan besar-besaran telah

beralih ke sistem c4isr yang meluncurkan serangan dari luar jangkauan yang terlihat. Peperangan tanpa kontak dan presisi telah secara signifikan menurunkan jumlah tentara dan korban sipil. Kombinasi persenjataan berpemandu presisi dan C4ISR juga telah meningkatkan efisiensi operasional dengan meningkatkan fleksibilitas senjata, meningkatkan kesadaran medan perang dan mengurangi waktu reaksi. Ini memungkinkan pasukan untuk mengumpulkan dan mengerahkan detasemen besar dalam waktu singkat. Gaya perang yang serba cepat ini menghancurkan sejumlah besar target musuh dengan melumpuhkan kapasitas serangan dan pertahanan mereka secara efektif.

Teknologi informasi secara nyata meningkatkan kemampuan kamuflase dan penipuan, kemampuan komando dan kontrol, mobilitas udara, dan ketepatan serangan jarak jauh. Ini memungkinkan penyerang sepenuhnya untuk mengeksploitasi elemen kejutan dengan mengarahkan kekuatan penuh kekuatannya ke area yang paling sensitif. Menyesuaikan strategi sesuai dengan teknologi militer yang tersedia adalah tindakan yang paling masuk akal.

6.7 Pelajaran yang bisa dipetik

Apakah itu instruksi peretas, ledakan besar di pusat perdagangan dunia, atau serangan bom oleh bin sarat, semua ini jauh melebihi frekuensi bandwidth yang dipahami oleh militer Amerika ... Ini karena mereka tidak pernah mempertimbangkan dan bahkan menolak untuk mempertimbangkan cara yang bertentangan dengan tradisi dan untuk memilih tindakan operasi selain cara militer. Jika alat perang bukan lagi tank dan artileri, melainkan virus komputer dan robot mikro, maka kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa bangsa adalah satu-satunya kelompok bersenjata atau bahwa tentara adalah satu-satunya yang memiliki alat perang.

Futuris AS, Alvin Tofler dan Heidi Toffler, "perang dan anti perang" adalah Konsep "peperangan tidak terbatas" yang berkaitan dengan doktrin peperangan di masa depan. Tesis perang tidak terbatas ini ialah hasil kemajuan pembangunan kemajuan teknologi. Capaian ini mendorong munculnya globalisme, difusi kekuasaan di luar negara-bangsa, ditambah dengan peningkatan kemampuan senjata modern, semuanya bergabung untuk menciptakan konteks baru bagi konflik.

6.8 Dean cheng “peperangan tak terbatas”

Pejuang non-profesional dan aktor non-negara merupakan ancaman yang lebih besar bagi negara-negara berdaulat, menjadikan para pejuang dan aktor ini musuh yang lebih serius bagi setiap pasukan profesional. Bentuk Warfair Yang Tidak Dikembangkan:

- “PERANG DAGANG” berarti menggunakan langkah-langkah perdagangan untuk mengobarkan perang non-militer.
- “PERANGKAT FINANSIAL” berarti memasuki dan menumbangkan pasar saham dan perbankan serta memanipulasi nilai mata uang yang ditargetkan.
- “PERANGKAT TEROR BARU” berarti operasi teroris menggunakan teknologi terbaru untuk menyerang umat manusia secara keseluruhan.
- “PERANGKAT EKOLOGIS” berarti menggunakan teknologi modern untuk mempengaruhi kondisi alami sungai, lautan, kerak bumi, bumi, lapisan es kutub, udara yang bersirkulasi di atmosfer, dan lapisan ozon.
- “PERANGKAT RENANG” artinya menyabot ekonomi negara saingan dengan membanjiri pasarnya dengan barang ilegal, dan membahayakan ekonomi lokal dengan membanjiri pasar dengan produk bajakan.
- “PERANGKAT BUDAYA” berarti memengaruhi bias budaya negara yang disasar dengan memaksakan sudut pandang budaya Anda sendiri.

- "PEPERANGAN OBAT" berarti membanjiri obat-obatan terlarang di perbatasan nasional dan menghancurkan struktur masyarakat melalui penggunaannya.
- "PEPERANGAN MEDIA" berarti memanipulasi media asing, baik dengan kompromi atau intimidasi terhadap jurnalis atau mendapatkan akses ke siaran radio negara lain dan memaksakan perspektif nasional Anda sendiri.
- "PERANGKAT TEKNOLOGI" berarti mendapatkan kontrol atau memiliki keunggulan dalam teknologi vital tertentu yang dapat digunakan dalam kedamaian dan masa perang.
- "PEPERANGAN SUMBER DAYA" berarti mendapatkan kendali atas sumber daya alam yang langka dan mampu mengendalikan atau memanipulasi akses dan nilai pasar mereka.
- "PEPERANGAN PSIKOLOGI" berarti memaksakan kepentingan nasional seseorang dengan mendominasi persepsi negara lawan atas kekuatan dan kelemahannya sendiri.
- "JARINGAN JARINGAN" berarti mendominasi atau menumbangkan sistem informasi transnasional.
- "HUKUM INTERNASIONAL" berarti bergabung dengan organisasi internasional atau multinasional untuk menumbangkan kebijakan mereka dan interpretasi dari putusan hukum.
- "PEPERANGAN LINGKUNGAN" berarti melemahkan atau menaklukkan negara saingan dengan menghina atau mengubah lingkungan alaminya.
- "PEPERANGAN MEMBANTU EKONOMI" berarti mengendalikan negara yang ditargetkan melalui ketergantungan bantuan.
- Transisi "negara bangsa" ke globalisasi telah menggantikan cara militer dengan cara diplomatik, informasi, dan ekonomi. Di medan perang tanpa batas, tidak mungkin lagi mengandalkan kekuatan militer dan senjata saja untuk mencapai keamanan nasional dalam arti strategis yang lebih

besar. Untuk itu, berbagai bentuk dan metode melakukan peperangan. Apa lagi di era integrasi global dan teknologi.

Suatu negara harus melakukan peperangan dengan semua elemen kekuatan nasional, menyerupai sesuatu yang lebih dekat dengan model Clausewitzian tentang perang "total". Bagaimana suatu negara mengatur, melatih, dan melengkapi semua elemen kekuatan nasional untuk melaksanakan berbagai bentuk dan metode juga harus dipastikan secara runut atau sistimatis.

Musuh potensial adalah selalu berpikir, bidang teori militer selalu mengubah, dan menjamin keamanan nasional kami selalu menjadi proses yang sesungguhnya. Mengorientasikan kembali doktrin militer mereka dari memerangi perang rakyat di bawah kondisi modern ke pertempuran dan memenangkan perang teknologi tinggi melawan musuh sebagai lawan modern. Cara militer akan selalu menentukan dalam konflik di masa depan.

Kesenjangan senjata dan peralatan adalah masalah Negara terhadap kekuatan pertahanan negaranya. Angkatan Darat belajar bahwa itu harus lebih digital, fleksibel, dan lebih kecil. Angkatan Udara yang dibutuhkan untuk mengerahkan lebih cepat dan dapat memanfaatkan ruang. Angkatan Laut yang dibutuhkan untuk beralih dari kekuatan laut ke peran memasok layanan lain.

Militer akan menggunakan teknologi dan senjata untuk meraih kemenangan, sambil menjaga korban seminimal mungkin. Ini disebut misi kemanusiaan dalam misi militer. Namun tetap berfokus pada transformasi militer dari yang padat karya menjadi yang intensif teknologi, sebagai berikut ini:

- Meningkatkan pengembangan persenjataan dan peralatan baru dan berteknologi tinggi.
- Meningkatkan pelatihan militer ke tingkat yang lebih tinggi, c. membangun kemampuan operasional bersama.
- Meningkatkan sistem kepemimpinan dan komando mereka.
- Menyelaraskan struktur organisasi institusi pendidikan militer RMA di seluruh dunia mendapatkan momentum.

6.9 Bentuk Bentuk Perang

Bentuk-bentuk perang sedang mengalami perubahan dari mekanisasi ke informasi. Konfrontasi antara sistem akan menjadi fitur prinsip konfrontasi di masa depan di medan perang. Metode "Gaya Koktail" menggabungkan berbagai bentuk peperangan. Negara yang menyerang secara diam-diam memikul modal dalam jumlah besar tanpa disadari oleh negara musuh dan melancarkan serangan diam-diam terhadap pasar keuangannya.

Setelah menyebabkan krisis keuangan, negara itu mengubur virus komputer dan detasemen hacker dalam sistem komputer lawan, sementara pada saat yang sama melakukan serangan jaringan terhadap musuh sehingga listrik, sipil, pengiriman lalu lintas, transaksi keuangan, komunikasi telepon, dan massa jaringan media lumpuh total. Tindakan ini menyebabkan negara musuh jatuh ke dalam kepanikan sosial, kerusuhan jalanan, dan krisis politik. Akhirnya, sarana militer digunakan secara bertahap sampai musuh dipaksa untuk menandatangani perjanjian damai yang tidak terhormat.

Delapan Prinsip-Prinsip Perangkat Tanpa Batas **ARAH OMNI** Pengamatan dan desain 360 derajat yang menggabungkan penggunaan semua faktor terkait. Pertimbangan menyeluruh dari semua faktor yang terkait dengan perang dan ketika mengamati medan perang, merancang rencana, menggunakan langkah-langkah, dan menggabungkan penggunaan semua sumber daya perang untuk memiliki bidang visi tanpa titik buta. Peperangan dapat berupa militer, semi-militer, atau non-militer.

1. Tidak ada perbedaan yang dibuat antara kombatan dan non-kombatan.
2. **SYNCHRONY** Melakukan tindakan dalam ruang yang berbeda dalam periode waktu yang sama. Mencapai tujuan dengan cepat dalam kondisi terjadinya simultan, tindakan simultan, dan penyelesaian simultan. Menggantikan gagasan lama tentang pentahapan gaya secara berurutan dalam suatu operasi.
3. **TINDAKAN-TINDAKAN YANG TIDAK TERBATASNYA** Tren mengarah pada penggunaan tindakan yang tidak terbatas, tetapi

terbatas pada pemenuhan tujuan yang terbatas. Apakah gagasan bahwa sarana apa pun yang diperlukan harus digunakan untuk memperoleh tujuan yang terbatas. Tidak ada batasan tentang apa yang bisa dilakukan oleh langkah-langkah ini - karenanya ide perang tidak dibatasi. Memahami dan menggunakan prinsip asimetri dengan benar memungkinkan kita untuk selalu menemukan dan mengeksploitasi titik lunak musuh.

4. **ASIMETRI** Carilah titik-titik aksi dalam arah yang berlawanan dari kontur keseimbangan simetri. Berarti bahwa titik lunak musuh dapat dieksploitasi dengan lebih baik dengan mengarahkan kekuatan dan teknik asimetris pada titik-titik ini daripada terlibat dalam respons cermin dengan kekuatan konvensional.
5. **LIMITED OBJECTIVES** Mengatur kompas untuk membimbing tindakan dalam kisaran yang dapat diterima untuk tindakan. Terbatas sehubungan dengan tindakan yang digunakan. Tujuan harus selalu lebih kecil daripada ukuran. Berarti tindakan, upaya, dan sumber daya, harus lebih besar daripada persyaratan tujuan yang ingin dicari atau tindakan itu akan gagal.
6. **KONSUMSI MINIMAL** Gunakan sumber daya tempur paling sedikit untuk mencapai tujuan. Prinsip ekonomi kekuatan. Semua jenis sumber daya harus dipertimbangkan.
7. **KOORDINASI MULTIDIMENSI** Mengkoordinasikan dan mengalokasikan semua kekuatan yang dapat dimobilisasi di bidang militer dan non-militer yang mencakup tujuan. Meliputi beberapa bidang dan beberapa bidang.
8. **PENYESUAIAN DAN PENGENDALIAN SELURUH PROSES** perang, dari awal, melalui kemajuannya, hingga kesimpulannya, terus memperoleh informasi, menyesuaikan tindakan, dan mengendalikan situasi. Ini adalah pendekatan sistem untuk peperangan yang memungkinkan penyesuaian sistem melalui semacam umpan balik. Sebuah premi ditempatkan pada intuisi (seni) daripada deduksi matematis (sains). Cara yang digunakan di masa damai dapat digunakan dalam perang. Tingkat taktis berarti dapat digunakan secara efektif di tingkat strategis.

9. METODE KOMBINASI

- a. **SUPRA-NASIONAL:** Menggabungkan organisasi nasional, internasional, dan non-negara untuk manfaat suatu negara.
- b. **SUPRA-DOMAIN:** Menggabungkan medan perang. Sarana kombinasi Supra-domain dianggap sebagai penghubung antara kombinasi Supra-nasional dan kombinasi Supra-means, dan berkaitan dengan pemilihan domain mana yang akan menjadi medan perang utama dan akan memberikan kemungkinan terbesar untuk mencapai kemenangan.
- c. **SUPRA-MEANS:** Menggabungkan semua sarana yang tersedia (militer dan non-militer) untuk melakukan operasi. Kombinasi supra-cara menggabungkan cara-cara militer dengan cara diplomatik, ekonomi, keuangan, teknologi, budaya, dan hukum dan ilegal lainnya. Kombinasi Supra-sarana dipertimbangkan dalam kaitannya dengan tujuan.
- d. **SUPRA-TIER:** Menggabungkan semua tingkat konflik ke dalam setiap kampanye. Empat tingkat perang yang berbeda dan fokus yang sesuai di setiap tingkat: Perang Besar - Kebijakan Perang; Perang - Strategi; Kampanye - Seni Operasional; dan Pertempuran - Taktik. Mereka menganggap tingkat Perang Besar, dalam hal skala, termasuk tindakan perang militer dan non-militer. Sasaran kombinasi Supratier adalah menggunakan kombinasi keempat level:

- Mengadaptasi filosofi pendekatan tidak langsung.
- Selalu ada "Aturan Kemenangan".
- Kemenangan selalu menjadi milik pihak yang memahami dan menggunakan aturan dengan benar.
- Menggunakan pendekatan tidak langsung untuk mencapai kemenangan

Aturan-aturan ini dapat digunakan dalam berbagai bentuk (sarana, taktik, senjata, titik serang, peluang pertempuran, penyebaran kekuatan yang tidak merata, atau strategi) untuk mencapai keuntungan.

6.10 Terminologi Perang Semesta Atau Pertahanan Semesta

Terminologi Perang Semesta atau Pertahanan Semesta, terdapat dalam UUD 1945 pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:

Ayat (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

Ayat (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA

Pasal 1 berbunyi:

Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Pasal 6 berbunyi:

Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

6.11 Penyelenggaraan Perang Semesta

Untuk memahami Perang Semesta terlebih dahulu menyamakan persepsi tentang pengertian perang sebagai sebuah “konflik berskala besar antar (beberapa) Negara atau didalam suatu Negara, yang terkait dengan masalah kedaulatan dan atau wilayah suatu Negara. Perang semesta bukan perang habis-habisan. Perang semesta juga tidak hanya dilakukan manakala kekuatan militer musuh telah berada di wilayah daratan. Perang semesta dapat diselenggarakan jauh sebelum terjadinya perang terbuka yang dilakukan dengan cara-cara militer, bahkan, penyelenggaraan perang semesta dalam bentuk baru yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *smart power*.

Justru ditujukan untuk mencegah terjadinya perang yang menggunakan cara-cara militer. Apabila upaya mencegah perang dengan cara-cara militer tidak berhasil dan musuh tetap melakukan agresi militer ke dalam wilayah Indonesia maka perang semesta dalam arti “perang habis-habisan” dengan mengerahkan seluruh kekuatan. Jalan pikiran ini tidak berarti seluruh rakyat harus dipersenjatai dan diperankan sebagai kombatan. Perlawanan segenap bangsa Indonesia dalam perang semesta akan lebih efektif bila setiap komponen bangsa berperang sesuai dengan profesinya masing-masing. Pengertian ini tidak menghapus definisi “perang semesta ialah perang semua melawan semua”.

Cara-cara militer bukan satu-satunya pilihan yang pertama dan utama dalam mempertahankan negara dari agresi musuh. Sinergi lapis pertahanan militer dengan lapis pertahanan nir-militer perang semesta adalah perang yang sangat kompleks. Bukan domainnya militer tetapi negara untuk penanganan konflik yang terkait dengan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Upaya penanganan ini tidak hanya dilakukan dengan mengerahkan rakyat sebanyak-banyaknya untuk bertempur perang semesta tidak sama dengan mengerahkan rakyat untuk bertempur.

6.12 Penyiapan Perang Semesta

We Must Be Prepared..... It Is Good To Be Patient It Is Good To Be Circumspect, It Is Good To Be Peace Loving But It Is Not Enough We Must Be Strong, We Must Be Self-Reliant (Sir Winston S . Churchill (1874-1965). Perang semesta melibatkan beragam komponen bangsa dan berlangsung sangat lama, dalam hitungan dekade. Perang tidak boleh terjadi secara spontan karena perang tidak dapat dimenangkan hanya mengandalkan nasib baik. Berdasarkan Pasal 2 UURI No 3/ 2002 Tentang Pertahanan Negara ditegaskan bahwa hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sedangkan pada Pasal 7 UURI No 3/ 2002 tentang Pertahanan Negara, disebutkan bahwa:

- (1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan Negara.
- (2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
- (3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa

Sistem pertahanan negara Indonesia adalah bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumberdaya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (pasal 1 (2)). Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh Komponen Cadangan dan Komponen pendukung. (pasal 7 (2)).

RANGKUMAN

1. Perang gerilya merupakan perang rakyat semesta dalam rangka melawan musuh yang memiliki kekuatan lebih besar dan kuat.
2. Strategi militer adalah serangkaian ide yang diterapkan oleh organisasi militer untuk mengejar tujuan strategis yang diinginkan.
3. Doktrin pertahanan yang digunakan Indonesia adalah doktrin pertahanan semesta yang lebih cenderung memancing musuh masuk kedalam wilayah NKRI dan menghancurkannya didalam NKRI dengan strategi perang berlarut.
4. Pelajaran yang bisa dipetik dari fenomena globalisasi adalah bahwa peperangan tidak terbatas pada penggunaan alat perang seperti tank dan artileri saja, melainkan virus komputer dan robot merupakan hasil dari pembangunan kemajuan teknologi yang mampu menciptakan konflik baru.
5. Peperangan tak terbatas pada peperangan secara militer saja, namun bisa berbentuk lainnya, seperti perang dagang, perangkat finansial, perangkat teror baru, perangkat ekologis, perangkat renang, perangkat budaya, peperangan obat, peperangan media, perangkat teknologi, peperangan sumber daya, peperangan psikologi, jaringan, peperangan lingkungan, dan peperangan ekonomi.
6. Bentuk-bentuk peperangan selalu mengalami perubahan. Peperangan dapat berbentuk militer, semi militer atau non militer. Sebelum mengerahkan kekuatan militer ditempuh cara cara lain seperti menyerang sistem komputer, menyerang jaringan listrik sehingga aktifitas sosial menjadi lumpuh total dan menyebabkan kepanikan dan krisis politik. Baru setelah itu digencarkan serangan militer.
7. Terminologi perang semesta diatur dalam UUD 1945 yang diperkuat dengan UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
8. Penyelenggaraan perang semesta diatur dalam UU No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
9. Perang semesta memerlukan penyiapan yang matang, dan tidak boleh terjadi secara spontan.

BAGIAN 7
MOBILISASI
KEKUATAN NASIONAL
DALAM PERANG

MOBILISASI KEKUATAN NASIONAL DALAM PERANG SEMESTA

Pada bagian 7 tentang mobilisasi kekuatan nasional dalam perang semesta, disampaikan pembahasan tentang definisi mobilisasi, mobilisasi dan darurat militer. Mobilisasi dimaksudkan untuk mengerahkan secara serentak sumber daya nasional beserta perangkat pendukungnya yang telah disiapkan untuk menghadapi segala kemungkinan ancaman yang ada.

7.1 Definisi Mobilisasi

Mobilisasi adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Mobilisasi diselenggarakan dengan tujuan untuk menanggulangi setiap ancaman yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perang merupakan jalan terakhir dan hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan serta kepentingan nasional sedapat mungkin diusahakan agar wilayah nasional tidak menjadi ajang perang. Pelaksanaannya meliputi tindakan untuk menghadapi serangan musuh dari luar negeri, tindakan untuk menanggulangi ancaman terhadap keamanan dalam negeri dan tindakan untuk menjaga agar kehidupan rakyat tetap berjalan secara normal dan sejauh mungkin dapat melindungi jiwa dan harta benda rakyat dari akibat bencana perang.

Oleh karena itu, mobilisasi meliputi kegiatan untuk melakukan perlawanan rakyat bersenjata dan perlawanan rakyat tidak

bersenjata yang kedua-duanya tetap berada dalam satu kesatuan komando sehingga tujuan mobilisasi terwujud secara efektif dan efisien. Kesejahteraan dan keamanan merupakan dua aspek yang saling mendukung dalam pembangunan nasional. Dalam keadaan damai pembangunan kesejahteraan mendapatkan prioritas, sedangkan apabila keadaan intensitas ancaman meningkat dan membahayakan kehidupan negara dan bangsa maka pembangunan kekuatan pertahanan dan keamanan akan lebih mendapat prioritas. Upaya penyelarasan kekuatan pertahanan keamanan negara dengan intensitas ancaman sesuai dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta diselenggarakan dengan mobilisasi dan demobilisasi.

Mobilisasi dimaksudkan untuk menanggulangi ancaman, sedangkan demobilisasi digunakan bagi pemulihan fungsi dan tugas umum pemerintahan, kehidupan kemasyarakatan, dengan tetap terpeliharanya kemampuan dan kekuatan pertahanan keamanan negara. Dengan demikian, mobilisasi dan demobilisasi mengandung makna upaya bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan, melindungi segenap hak dan kewajiban setiap warga negara dalam usaha bela negara sesuai dengan amanat yang terkandung dalam

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan mobilisasi dan demobilisasi dilaksanakan berdasarkan asas kesemestaan, asas manfaat, asas kebersamaan, asas legalitas, asas selektivitas, asas efektivitas, asas efisiensi, dan asas kejuangan. Mobilisasi hanya dilakukan bila negara dinyatakan dalam keadaan bahaya dan pada saat mobilisasi berlangsung ada tiga macam hukum yang berlaku, yaitu hukum umum yang berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hukum yang didasari oleh Undang-undang Keadaan Bahaya sehingga beberapa pejabat tertentu mempunyai wewenang khusus sesuai dengan Undang-undang Keadaan Bahaya serta hukum militer bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan mobil-mobil yang melaksanakan tugas sebagai anggota perlawanan rakyat bersenjata. Untuk mencapai tujuan mobilisasi dilaksanakan upaya melipatgandakan kekuatan dan kemampuan pertahanan keamanan negara. Pasal 42 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa mobilisasi dan demobilisasi harus diatur dengan undang-undang. Mobilisasi dapat dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah negara sekalipun pernyataan keadaan bahaya hanya berlaku di sebagian wilayah negara karena ancaman terhadap sebagian wilayah negara juga merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah negara. Mobilisasi dapat dinyatakan bersamaan dengan atau sesudah pernyataan keadaan bahaya. Keadaan bahaya dapat merupakan tingkatan keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer, atau keadaan perang. Tidak setiap keadaan bahaya diikuti dengan mobilisasi.

7.2 Mobilisasi dan Darurat Militer

Pernyataan mobilisasi dilakukan hanya dalam keadaan darurat militer atau keadaan perang. Beberapa pertanyaan penting yang perlu diperhatikan dalam mobilisasi ketika situasi dan kondisi dalam keadaan perang, sebagai berikut:

1. Mengapa kita perlu mengukur kekuatan nasional?
2. Seberapa pentingkah kekuatan nasional untuk keamanan nasional?
3. Bagaimana kita mengukur kekuatan nasional?
4. Mengapa sulit untuk membuat konsep kekuatan nasional dalam konteks keamanan nasional?
5. Kekuatan nasional suatu negara terlihat mengesankan dibandingkan dengan kekuatan nasional negara lain. Terus ?
6. Apa yang mereka katakan tentang pengukuran nasional?

Beberapa hal prinsip yang perlu diperhatikan menurut para ahli tentang mobilisasi, meliputi:

1. *The George Ways of The Ways of Power* mungkin luar biasa karena tidak mencoba definisi sistematis dari sumber atau manifestasi dari kekuatan nasional.
2. Kenneth Waltz tampaknya menghadapi jalan tengah: ia berpendapat bahwa kekuatan "didefinisikan dalam hal distribusi kemampuan" tetapi tidak menentukan terlalu jelas komponen apa yang membentuk setiap titik data dalam distribusi

seharusnya, kecuali bahwa mereka harus mencakup "semua hal berikut ini: dan kekuatan militer," ukuran sumber daya wilayah populasi yang memiliki kemampuan ekonomi, stabilitas dan kompetensi politik.

3. Hans Morgenthau mungkin adalah yang paling sistematis dari semua ahli teori modern dalam hal ini, dan pendekatannya telah diikuti oleh banyak ahli teori lain sejak karyanya *Politics Among Nations* pertama kali diterbitkan pada tahun 1948. Morgenthau secara sistematis mencakup dan menilai geografi, sumber daya alam (terutama makanan dan bahan mentah), kapasitas industri, kesiapan militer (terutama teknologi, kepemimpinan, dan kuantitas dan kualitas angkatan bersenjata), populasi (terutama distribusi dan tren), karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi dan pemerintahan. Dia memperingatkan, antara lain, upaya untuk menghubungkan "faktor tunggal [yang] lebih penting" dalam pengukuran kekuasaan.
4. Pendekatan variabel tunggal. Berfokus pada kemampuan militer kasar sebagai wakil mereka untuk kekuatannasional: Siapamereka? Ini sClaude dan KarlDeutsch.
5. Norman Alcock dan Alan Newcombe telah menggunakan pengeluaran militer.
6. George Modelski dan William Thompson, misalnya, telah menggunakan kekuatan militer khusus: ukuran kekuatan angkatan laut sebagai indikator kekuatan nasional yang dapat diproyeksikan dalam studi sejarah mereka tentang "siklus panjang" dalam politik internasional.
7. Menggunakan indikator ekonomi pendapatan nasional. Klaus Knorr, Kingsley Davis A.F.K., Organski Charles, dan Roland McKean telag menggunakan indeks varian yaitu output atau GNP suatu negara.
8. Bruce Russett menyimpulkan bahwa total konsumsi bahan bakar dan energi listrik adalah ukuran variabel tunggal terbaik dari daya nasional.
9. Logika. Mengapa mereka memilih untuk menggunakan hanya satu variable untuk mengukur kekuatan nasional ? Logikanya

apa? Anda setuju/puas mengukur kekuatan nasional hanya dengan variabel tunggal, atau anda memiliki perspektif lain untuk mengukur kekuatan nasional ?

10. Pendekatan Multivariabel. Ukuran multivariabel paling awal dan mungkin paling berpengaruh diajukan pada 1956 oleh Klaus Knorr dalam karya klasiknya, *The War Potential of Nations*. Berusaha untuk memastikan kemampuan suatu negara "untuk menyediakan jumlah tenaga dan pasokan militer dalam hal perang, Knorr tertarik pada berbagai faktor yang dapat dirangkum berdasarkan kategori: kapasitas ekonomi, kompetensi administratif, dan motivasi untuk perang.
11. Klaus Knorr. Meskipun mengidentifikasi banyak bahan penting di bawah masing- masing kategori ini, Knorr tidak memberikan "model" apa pun untuk menyarankan bagaimana faktor-faktor ini dapat digabungkan. Meskipun demikian, karyanya bersifat mani karena memberikan dasar di mana beberapa ahli teori nantinya akan mengembangkan solusi alternatif.
12. Clifford German's formula. Indeks multivariabel nonlinier kompleks yang berupaya mengidentifikasi variabel diskrit dan menentukan keterkaitannya datang pada tahun 1960 dengan karya Clifford German, yang menghasilkan indeks kekuatan dunia yang mengambil bentuk berikut:
$$G = \text{national power} = N(L + P + I + M),$$
 - N is nuclear capability,
 - L is land,
 - P is population,
 - I is the industrial base, and M is military size
13. Wayne Ferris, yang menyusun indeks pada tahun 1973 yang berusaha "memberikan skor pada kemampuan hampir semua negara bagian dalam sistem relatif terhadap hampir semua negara bagian lainnya
14. Ferris fokus pada enam variabel:
 - Luas lahan,
 - Total populasi,
 - Pendapatan pemerintah,

- Pengeluaran pertahanan,
 - Nilai perdagangan internasional, dan
 - Ukuran angkatan bersenjata dalam upaya menghasilkan perbandingan historis kekuatan internasional untuk sejumlah negara.
15. Clifford German & Wilhelm F. Clifford German. Clifford German mengembangkan indeks yang terdiri dari dua puluh variabel dan terkenal dengan kompleksitas perhitungannya. Ini terutama digunakan untuk indeks dan perhitungan sederhana, karena ada korelasi tinggi antara indeks Jerman dan indeks lain serta PDB / GNP.
 16. Wilhem. Formula rumusnya untuk mengukur kekuatan nasional dikumpulkan dari variabel:
 - total populasi,
 - produksi baja dan
 - produksi energi
 17. David J. Singer. Memperkenalkan Indikator Komposit Kemampuan Nasional CINC. CINC terdiri dari tiga dimensi: atribut yang dapat digunakan untuk mempengaruhi keadaan lain dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Kemampuan jangka pendek tercermin dari kekuatan militer (pengeluaran militer, personel militer), Kemampuan jangka menengah oleh aktivitas industri (produksi besi dan baja, konsumsi energi), dan Kemampuan jangka panjang oleh faktor-faktor demografis (total populasi, populasi perkotaan). CINC masih merupakan salah satu metode yang paling dikenal dan paling diterima untuk mengukur kemampuan nasional.
 18. A.F.K. Organski and Jacek Kugler 1980. Dia menyarankan menggunakan GNP untuk mengukur kemampuan nasional. Mereka mengatakan bahwa kekurangan utama dari semua indeks kekuasaan adalah, bagaimanapun, kurangnya dimensi politik, yaitu, kemampuan pemerintah untuk secara efektif memobilisasi kemampuan yang diukur oleh indeks. Karena itu mereka menggabungkan: rasio pajak riil, kapasitas pajak, dan bantuan asing.

19. Institusi dan universitas akademik Cina. Mereka mengembangkan berbagai indeks daya untuk mengukur CNP (zonghe guoli) sejak 1984. Niat CNP adalah untuk mengukur kekuatan nasional suatu negara secara komprehensif dan dari semua sudut. Mereka mengatakan, "Militer mungkin tidak lagi menggambarkan faktor penting kekuatan." Elemen-elemen seperti ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin menjadi penting. Pendekatan mereka: secara kualitatif, dalam diskusi tentang kekuatan dan kelemahan negara "dan" secara kuantitatif melalui penggunaan formula yang menggambarkan nilai numerik CNP.
20. Institut Ekonomi dan Politik Dunia Tiongkok (IWEPT). Berdasarkan pilihan mereka pada delapan area utama CNP adalah sebagai berikut:
 - a. Kekuatan Material (faktor konkret seperti ekonomi, urusan militer, dll.) dan
 - b. Kekuatan roh (faktor tidak berwujud, seperti hubungan internasional, politik, dll.) harus dimasukkan.. CNP tidak hanya ditandai oleh "kekuatan aktual"; oleh karena itu, "kekuatan potensial" memainkan peran kontribusi (misalnya, temuan penelitian ilmiah dan teknologi, sumber daya alam).
21. Kerangka Kerja Indeks Indeks Akademi Militer Ilmu Militer- Contoh untuk subsistem indeks kekuatan material adalah subsistem kekuatan politik, yang terdiri dari indikator berikut: tujuan strategi nasional, stabilitas politik, tingkat kebijakan, kepemimpinan negara, organisasi, dan kemampuan pengambilan keputusan, kekuatan perwujudan nasional.
22. Peran komunitas intelijen. Bagi komunitas intelijen, mengembangkan hierarki universal dari kemampuan kekuatan nasional adalah upaya yang menarik, tetapi yang jelas memiliki kepentingan sekunder. Tujuan utama harus menilai kemampuan daya dari beberapa negara kritis, satu per satu. Negara-negara ini harus diselidiki "secara intensif" untuk menilai tingkat dan kedalaman kemampuan mereka, dan investigasi tersebut harus

dilanjutkan sesuai dengan beberapa "templat" standar sehingga memungkinkan perbandingan perkembangan diakronis dan perbandingan sinoptik di antara negara-negara kecil. kelompok teman sebaya.

23. Produk antar tindakan. Kekuatan nasional pada akhirnya merupakan produk dari interaksi dua komponen terdiri dari:
- Kemampuan suatu negara untuk mendominasi siklus inovasi ekonomi pada titik waktu tertentu dan, setelahnya,
 - Untuk memanfaatkan buah dari dominasi ini untuk menghasilkan kemampuan militer yang efektif. Kemampuan-kemampuan tersebut pada gilirannya memperkuat keunggulan ekonomi yang ada sambil menghasilkan tatanan politik yang stabil, yang meskipun dipertahankan terutama untuk keuntungan strategis negara itu sendiri, juga memberikan manfaat bagi sistem internasional secara keseluruhan.

RANGKUMAN

1. Mobilisasi merupakan tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional yang telah dibina dan dipersiapkan sebagai komponen kekuatan pertahanan keamanan negara untuk digunakan secara tepat, terpadu, dan terarah bagi penanggulangan setiap ancaman, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Mobilisasi diselenggarakan dengan tujuan untuk menanggulangi setiap ancaman yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Darurat militer merupakan kondisi atau situasi dalam keadaan perang. Mobilisasi diperlukan untuk penyiapan perang, agar mampu memenangkan peperangan dengan penerapan strategi yang telah dipersiapkan secara matang.

BAGIAN 8
INTEGRASI TUJUAN
POLITIK DENGAN
MILITER



INTEGRASI TUJUAN POLITIK DENGAN MILITER

Pada bagian 8 tentang integrasi tujuan politik dengan militer, disajikan sub pembahasan tentang integrasi nasional, aspek politik dan sosial, kekuatan politik sebagai unsur kekuatan nasional, elemen politik kekuasaan nasional, dan kebijakan luar negeri. Pengerahan kekuatan militer selalu diselaraskan dengan kepentingan dan tujuan politik. Integrasi nasional merupakan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk identitas nasional.

8.1 Integrasi Nasional

Pengertian Integrasi Nasional, Ketika kita berbicara tentang persatuan dalam suatu negara, pasti tidak bisa terlepas dengan istilah integrasi nasional. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara integrasi nasional menjadi suatu hal yang penting, terlebih di Indonesia yang mempunyai beragam suku dan latar belakang masyarakat yang berbeda. Integrasi nasional harus diterapkan dengan baik di Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu juga menjaga nilai persatuan dan kesatuan bangsa melalui empat pilar yaitu Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan UUD 1945. Istilah ini harus dikoreksi dengan sebutan teoretis yang tepat yakni empat konsensus dasar nasional.

Pemahaman dan implementasi integrasi nasional di atas, jika dirujuk dengan Prof. Dr. Mr. Soepomo, disebut paham Negara integralistik. Menurut Prof. Soepomo bahwa teori integralistiknya itu memuat 6 (enam) substansi penting yakni:

1. Negara merupakan susunan masyarakat yang bersifat erat serta integral atau menyeluruh antar semua golongan.

2. Seluruh anggota masyarakat merupakan satu kesatuan utuh yang bersifat organis.
3. Kepentingan yang berkaitan dengan satu kesatuan atau persatuan masyarakat menjadi hal yang diutamakan.
4. Negara tidak memihak golongan tertentu. Negara tidak mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan masyarakat. Negara mengutamakan keselamatan dan kehidupan bangsa sebagai bentuk satu kesatuan yang harus diutamakan.
5. Negara dan rakyat saling bersatu membentuk persatuan.
6. Negara mengatasi (memiliki posisi lebih tinggi) dibandingkan dengan seluruh golongan dalam berbagai bidang.

Melalui studi pustaka diketahui bahwa paham integralistik Prof. Soepomo tersebut dipengaruhi oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Meskipun demikian tidak berarti bahwa substansi teoretis integralistik itu dari Barat sebagaimana diuraikan oleh Spinoza, Muller, dan Hegel yang masyhur itu. Hal ini dapat ditampilkan faktor penguat argumentatif dari Clifford Geertz yang menjadi judul buku karyanya *The Old Society New State* atau Negara Baru Masyarakat Tua. Masyarakat Nusantara Modern bermula dari Kerajaan Kutai, Mataram Kuno, Sriwijaya, dan Majapahit, saat ini masih ada Kesultanan Yogyakarta sebagai bukti sejarahnya. Dari data sejarah Kerajaan di Nusantara itu, diketahui persis bahwa paham integralistik sudah menjadi budaya bagi bangsa di Nusantara. Nah, ketika Bangsa Nusantara merdeka dari jajahan Belanda, maka pilihan agar menjadi Negara Integralistik sesuai penjelasan teoretis integralistik Prof. Soepomo, menjadi sangat mudah diterima oleh bangsa Indonesia.

Secara umum integrasi nasional secara politis adalah penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sementara itu, secara antropologis, integrasi nasional adalah proses penyesuaian antara unsur- unsur kebudayaan yang beranekaragam untuk mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Integrasi nasional juga dapat diartikan sebagai suatu usaha maupun proses yang memiliki tujuan untuk mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga dapat

tercapai keserasian dan keselarasan secara nasional. Dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional merupakan bentuk persatuan dan kesatuan antara beragam kelompok sosial dan budaya dalam suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan keserasian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Proses integrasi tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan suatu proses yang panjang dalam waktu yang cukup lama, dan berikut ini macam-macam integrasi yaitu diantaranya Integrasi Kebudayaan, integrasi sosial dan integrasi nasional. Integrasi kebudayaan adalah penyuaian diantara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Integrasi sosial merupakan penyuaian diantara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi bagi masyarakat tersebut. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian diantara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan dimasyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tersebut.

Integrasi Politik menunjukkan pada sebuah 'proses kepada' atau sebuah 'produk akhir' penyatuan politik ditingkat global atau regional diantara unit-unit nasional yang terpisah. Integrasi Politik merupakan penyatuan kelompok yang berbeda, masyarakat maupun wilayah, kedalam suatu organisasi politik yang bisa bekerja atau bertahan hidup. Dalam proses Integrasi geo politik di Indonesia mulai menonjol pada awal abad 16 dan dalam proses integrasi bangsa Indonesia tersebut banyak faktor yang berperan antara lain pelayaran dan perdagangan antar pulau serta adanya bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan.

Integrasi Politik menunjuk pada sebuah 'proses kepada' atau sebuah 'produk akhir' penyatuan politik di tingkat global atau regional diantara unit-unit nasional yang terpisah. Menurut pandangan Nazaruddin Sjamsuddin (1989) tentang integrasi politik menekankan pada aspek integrasi sebagai proses.

Integrasi politik mengandung bobot politik karenanya prosesnya bersifat politik pula. Ronald L. Watts : "integrasi politik

adalah penyatuan kelompok yang berbeda, masyarakat maupun wilayah, kedalaman suatu organisasi politik yang bisa bekerja ataupun bertahan hidup". "Proses integrasi politik di Indonesia menurut A. Sartono Kartodirjo dapat dibagi dalam 2 jenis, yaitu : pertama, integrasi geopolitik yang dimulai sejak jaman prasejarah sampai awal abad 20; dan kedua, proses integrasi politik kaum elite sejak awal abad 20 sampai jaman Hindia Belanda berakhir". Dalam proses integrasi geopolitik di Indonesia mulai menonjol pada awal abad 16 dan dalam proses integrasi bangsa Indonesia tersebut banyak faktor yang berperan antara lain pelayaran dan perdagangan antar pulau serta adanya bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan. Para pedagang-pedagang Islam menjadi motor penggerak terjadinya proses integrasi, hal ini karena dalam ajaran Islam tidak membedakan manusia baik berdasarkan kasta, agama, suku/etnis atau golongan.

Pokok-Pokok Perang Semesta Atau Pertahanan Semesta UUD 1945 Pasal 30 Ayat (2) Dan (3)

- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara:

Pasal 1

Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

Pasal 2

Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara:

Pasal 6

Pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Pasal 7

- (1) Pertahanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan Negara.
- (2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai Komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.
- (3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

8.2 Aspek Politik Dan Sosial

1. Pemerintah

Pemerintah terutama bisa dilihat dari definisi, fungsi, dan bentuknya. Selanjutnya dideskripsikan satu persatu. Menurut definis Britanica bahwa *government* “*is the political system by which a country or community is administered and regulated*”. Sedangkan fungsi pemerintah dikutipkan dari www.study.com bahwa *A government structure impacts almost every aspect of a person's life. For example, the U.S. government plays a large role in the country because its functions greatly affect citizens' human rights, their daily lives, and economic activities. Because of the way the government in the United States is structured, both state and local governments play a role in these functions as well. The preamble to the U.S. Constitution outlines the main principles at work throughout the document and establishes the basic ideas and beliefs that the document emphasizes throughout.* Di samping fungsi itu, pemerintah juga memiliki bentuk. Ada banyak bentuk pemerintahan. Tapi di sini diambilkan bentuk kesatuan atau Unitarian seperti yang berlaku di Amerika Serikat (AS). *This is the first principle found in the Constitution's preamble. Its goal is to unite the country, which was particularly important as the Constitution was designed to move the nation away from the idea of individual states that only united in times of crisis to a unified nation. Forming a more perfect union can be found through laws that protect the entire country, a uniform currency, and also the interstate road system in the United States. This allows for patriotism to develop in a nation.* Bentuk pemerintahan Indonesia ialah demokrasi langsung sesuai konstitusinya sebagai Negara Republik. Bukan individualistis seperti di AS dan Negara Negara Barat lainnya.

Pemerintah adalah kelompok manusia yg memutuskan bagaimana negara akan berfungsi dlm momen tertentu. Struktur hukum menetapkan kekuasaan dan batasan yang berakibat masuknya suatu negara dalam perang. Suatu perang tidak akan dimulai hingga beberapa pemerintah memulai secara sengaja atau terjebak ke dalamnya. Pemerintah menerapkan kewenangannya ke dalam untuk mengkoordinasikan bermacam elemen dari

masyarakatnya dan ke luar untuk menyesuaikan masyarakatnya dengan perubahan kondisi.

2. Negara

Menurut Prof. Dr. Miriam Budiardjo dalam bukunya berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik menulis bahwa Negara ialah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara mempunyai kedaulatan untuk membuat dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Negara memiliki monopoli untuk membunuh manusia dan melindungi masyarakatnya dari pembunuhan baik di dalam wilayah yurisdiksi maupun di luar wilayahnya. Setiap negara mempunyai hak yang sama, penerapan hak ini yang sering menimbulkan konflik. Namun konflik seperti ini adalah konflik yang sah menurut hukum internasional dan politik antar bangsa tentu saja. Dengan kekuasaan absolutnya itu, Negara dibentuk untuk membawa semua rakyatnya untuk mencapai tujuan Negara yakni memelihara dan menjamin hak asasi manusia (HAM) sebagai berikut ini:

- a. Hak hidup/nyawa (*leven*).
- b. Hak badan (*lijf*).
- c. Hak atas harta benda (*vermogen*).
- d. Hak atas kehormatan (*eer*).
- e. Hak kemerdekaan (*vrijheid*).

Kemudian oleh Roosevelt *vrijheid* (*freedom*= kemerdekaan) dibaginya menjadi sebagai berikut:

- a. Freedom from want;
- b. Freedom from fear;
- c. Freedom of speech;
- d. Freedom of religion;
- e. Freedom of doing mistake (tambahan oleh Gandhi).
- f. Tambahan lainnya datang dari Soekarno: *Freedom to be free*.

Pada zaman modern ini lazimnya tujuan Negara itu menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. Untuk mendapatkan penjelasan lebih dalam tentang tujuan Negara, silahkan baca buku Ilmu Negara karya Prof. Dr. C.S.T. Kansil, SH dan Christine, S.T. Kansil,

SH., MH.

3. Konstitusi Politik

Constitutionalism menentukan bahwa lingkup dari kekuatan politik dibatasi oleh hukum, kecuali utk negara. Ini tidak berlaku untuk *absolutism*. *Constitutionalism* lebih berpihak kepada perdamaian dibandingkan *absolutism*. Negara kesatuan cenderung lebih efisien dalam menyiapkan dan melaksanakan perang dibandingkan dengan negara federal. Pemisahan kekuasaan politik dalam negara mengurangi efektifitas persiapan dan pelaksanaan perang. Negara demokrasi relatif lebih jarang terlibat perang dibandingkan negara dengan sistem aristokrasi, oligarki, dan autokrasi.

4. Aspek Sosial

- a. Umur. Terdapat bukti bahwa keinginan utk berperang dari suatu negara berubah seiring dg umurnya. Di negara-2 muda, jumlah orang muda lebih besar dp orang-2 tua. Ini meningkatkan tendensi petualangan dan keinginan berperang. Komposisi budaya. Keberagaman budaya dlm suatu negara cenderung terlibat dlm perang dua jenis:
 - 1) revolusi sipil dari minoritas dlm menolak tekanan atau untuk melakukan perang kemerdekaan nasional, dan
 - 2) imperialistik untuk meluaskan imperiumnya atau untuk mengalihkan perhatian dari masalah domestik.
- b. *Progressiveness*. Negara negara yang progresif dan dinamis, yang terus berupaya untuk menggugah masyarakatnya untuk menyadari nilai nilai nasionalnya dan merealisasikan nilai nilai tersebut, adalah lebih menyukai perang dibandingkan dg negara negara yang tradisional dan statis.
- c. *Integration*. Budaya yang muda dan homogen, perencanaan ekonomi nasional, dan dinamisme adalah ciri ciri yang sering membuat perang dan ciri ciri di mana masyarakat totalitarian bangga. Totalitarianisme sering membuat perang. Negara negara liberal lebih sulit untuk memobilisasi sumber dayanya, sehingga kurang suka terhadap perang.

8.3 Kekuatan Politik Sebagai Unsur Kekuatan Nasional

1. Definisi umum tentang politik, meliputi:
 - Politik adalah latihan kekuasaan
 - Politik adalah alokasi nilai publik
 - Politik adalah resolusi konflik
 - Politik adalah persaingan di antara individu, kelompok, atau negara yang mengejar kepentingan mereka (Danziger, James N. *Understanding the Political World*. NY: Addison-Wesley, 1991)
4. Politik (Kata benda). Aktivitas yang terkait dengan tata kelola suatu negara atau wilayah. Kegiatan pemerintah terkait hubungan politik antar negara.
5. Politik sering dipahami sebagai: seni dan ilmu pemerintah, sebagai urusan negara. Jadi, untuk memahami politik, itu harus diperiksa sebagai bagian dari keseluruhan jalinan hubungan sosial - kerja sama dan konflik antara individu, kelompok, kelas.
6. Bentuk dasar sistem politik.
 - **Anarkisme** (Diperintah oleh siapa pun)
 - **Demokrasi** (Diperintah oleh pemilihan umum)
 - **Monarki** (Diperintah oleh satu orang). Monarki adalah salah satu sistem politik tertua yang diketahui, dari struktur suku dengan satu orang penguasa absolut.
 - **Technocracy** (Diperintah oleh para ahli).
 - **Republik** (Diperintah oleh non-raja) Republik republik pertama yang tercatat adalah di India pada abad ke-6 SM.
 - **Kesultanan** (Diperintah oleh satu orang dan Allah) struktur politik Islam yang menggabungkan aspek monarki dan teokrasi).
 - **Teokrasi** (Diperintah oleh Allah dan wakil-wakilnya) dan agama-agama lain juga; juga dapat memaksa orang yang tidak beragama untuk bertobat dalam jenis apa pun dalam sistem ini).
 - **Demokrasi parlementer** (Diperintah oleh suara rakyat melalui parlemen).
 - **Feodalisme** (Diperintah oleh tuan / raja).

- **Fasisme** (Diperintah oleh seorang pemimpin)
- **Oligarki** (Diperintah oleh beberapa orang)
- **Pemerintahan militer** (Diperintah oleh militer)
- **Aristokrasi** (Diperintah oleh para bangsawan)
- **Plutokrasi** (Diperintah oleh uang)
- **Komunisme** (Diperintah oleh pekerja)
- **Sosialisme** (Diperintah oleh kesetaraan).

8.4 Elemen Politik Kekuasaan Nasional

Elemen-Elemen politik kekuasaan nasional menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci, banyak di antaranya terkait dengan elemen psikologis. Apa bentuk pemerintahan? Bagaimana sikap populasi terhadapnya? Seberapa kuat yang orang-orang inginkan? Seberapa kuat dan efisien? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan statistik sederhana, namun mereka mungkin sangat penting dalam penilaian kekuatan nasional. Jika pemerintah tidak memadai dan tidak dapat membawa potensi kekuatan bangsa untuk menanggung masalah, maka kekuasaan itu mungkin juga tidak ada. Bentuk-bentuk pemerintahan aktual, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya sendiri, memainkan peran dalam penerapan kekuasaan nasional. Sistem otoriter membatasi kebebasan dan inisiatif individu dalam tingkat yang berbeda-beda, tetapi memungkinkan perumusan strategi negara yang sangat terorganisir. Sistem demokrasi memerlukan pembentukan kebijakan dengan membangun konsensus dan persuasi dalam masyarakat yang terbuka dan majemuk.

Sangat sulit bagi demokrasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan strategi negara jangka panjang atau mengubah arah kebijakan. Tingkat perkembangan politik dalam suatu negara juga penting. Perkembangan ini melibatkan kemampuan, dan terutama efisiensi dan efektifitas, dari pemerintah nasional dalam menggunakan sumber daya manusia dan materialnya dalam mengejar kepentingan nasional. Keterampilan administratif dan manajemen sangat penting jika suatu negara ingin mewujudkan potensi kekuatan penuhnya.

8.5 Kebijakan Luar Negeri

Setiap negara memiliki tujuan nasional yang dicapai dengan mengelola sumber daya potensial yang terletak di dalam negeri maupun di luar negeri. Mengelola potensi pemenuhan kebutuhan nasional dari luar negeri. Perumusan Kebijakan Luar Negeri didasarkan pada perubahan situasi domestik dan internasional. Kebijakan Luar Negeri secara substansial dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Kebijakan Luar Negeri pada dasarnya merupakan cerminan dari keadaan internal dan perkembangan. Proses pembuatan Kebijakan Luar Negeri terkait erat dengan politik dalam negeri. Kebijakan Luar Negeri adalah instrumen yang dimiliki oleh pemerintah negara yang berdaulat untuk mencapai tujuannasional.

RANGKUMAN

1. Integrasi nasional merupakan modal dasar persatuan bangsa, yang didalamnya meskipun terdiri dari banyak suku bangsa yang beragam budaya namun tetap dalam satu wawasan kebangsaan dan satu ideologi.
2. Terdapat tiga aspek politik yang berperan dalam membangun tatanan suatu bangsa, yaitu: pemerintah, negara, dan konstitusi politik. Sedangkan aspek sosialnya, meliputi: umur suatu negara, *progresiveness*, dan *integration*.
3. Kekuatan politik dianggap sebagai unsur kekuatan nasional, mengingat fungsi politik adalah sebagai latihan kekuasaan, alokasi nilai publik, dan sebagai resolusi konflik. Ketika kekuatan politik dalam kondisi stabil maka negara memiliki unsur kekuatan nasional yang kokoh.
4. Elemen-Elemen politik kekuasaan nasional menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci di antaranya terkait dengan elemen psikologis. Apa bentuk pemerintahan? Bagaimana sikap populasi terhadapnya? Seberapa kuat yang orang-orang inginkan? Seberapa kuat dan efisien?
5. Kebijakan luar negeri merupakan salah satu instrumen yang dipergunakan oleh pemerintah negara guna mencapai tujuan nasional.

BAGIAN 9
PERANG SIPIL DAN
INTERVENSI MASALAH
KEMANUSIAAN



PERANG SIPIL DAN INTERVENSI MASALAH KEMANUSIAAN

Pada Bagian 9 tentang Perang Sipil dan Intervensi Masalah Kemanusiaan, disajikan sub pembahasan tentang pentingnya intervensi kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan ditempuh sebagai salah satu jalan dalam rangka mencegah atau menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering kali dilanggar oleh pelaku-pelaku peperangan. Didalam peperangan pelaku-pelaku peperangan biasanya bisa bersifat dan berlaku kejam tanpa memperhatikan hak asasi manusia. Ketentuan dalam hukum humaniter cenderung diabaikan.

9.1 Intervensi Kemanusiaan

Istilah Intervensi mempunyai batasan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara, kelompok dalam suatu negara, atau suatu organisasi internasional yang mencampuri secara paksa urusan dalam negeri negara lain. Intervensi adalah campur tangan dari suatu negara terhadap masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk memelihara atau mengubah situasi yang ada. Negara yang berdaulat dapat mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional lainnya, maupun mengatur segala sesuatu yang ada atau terjadi diluar wilayah negara itu tetapi sepanjang ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Hal ini didasari oleh piagam PBB pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa hubungan antar negara berdasarkan persamaan derajat dan bebas.

Intervensi kemanusiaan secara umum adalah upaya untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dengan kekuatan-kekuatan tertentu (diplomatik dan militer) disuatu negara, baik atau tanpa persetujuan negara itu (Negara yang

mengalami konflik internal). Ketika terjadi suatu masalah kemanusiaan di suatu negara yang bersifat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka masyarakat internasional dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan intervensi.

Pengaturan tentang intervensi kemanusiaan belum diatur secara tegas dalam hukum internasional. Akan tetapi, menurut piagam PBB pasal 24 tentang tugas dan fungsi dewan keamanan PBB, maka PBB melalui dewan keamanan berhak menjalankan kewajibannya terkait adanya ancaman terhadap keamanan internasional, atau pelanggaran perdamaian dan keamanan, dan agresi sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip PBB dan dengan sebisa mungkin mengurangi penggunaan kekuatan bersenjata, hal ini sesuai dengan pasal 26 Piagam PBB.

Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB tidak melanggar kebebasan politik sebuah negara. Tindakan tersebut hanya bertujuan untuk memulihkan hal asasi manusia pada suatu negara yang mengalami konflik. Setiap negara dan penduduknya tetap memiliki kebebasan berpolitik atas asumsi ini intervensi kemanusiaan tidak melanggar piagam PBB. Intervensi atas dasar kemanusiaan yang dikenal sebagai *Humanitarian Intervention* ini dilakukan secara kolektif berdasarkan mandat PBB dan bertujuan untuk mengatasi masalah kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan pasal 50 Piagam PBB yang mengatur salah satu bentuk intervensi. Dimana intervensi ini dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada.

Perang sipil atau perang saudara adalah suatu jenis perang dimana bukan dua atau lebih negara yang menjadi kubu yang berlawanan namun beberapa faksi (saudara) didalam sebuah entitas politik. Dalam bahasa Inggris perang saudara ini disebut civil war yang secara harfiah artinya adalah perang warga sipil atau perang madani. Tidak jarang sebuah perang saudara merupakan tanda awal perpecahan sebuah entitas politik. Perang saudara amerika dikenal sebagai perang antar negara bagian. Perang Saudara Amerika adalah menjadi salah satu perang pertama yang menunjukkan perang industri persenjataan dalam sejarah manusia. Pembuatan rel kereta,

kapal-kapal uap, produksi senjata secara massal, dan berbagai macam alat militer lainnya dilakukan di mana-mana. Praktik perang total yang dikembangkan oleh Sherman di Georgia dan perang parit di sekitar Petersburg menjadi salah satu taktik yang digunakan dalam Perang Dunia I di Eropa.

RANGKUMAN

1. Dalam perang sipil dapat dipastikan banyak menimbulkan korban, baik korban yang luka maupun yang gugur dalam peperangan. Korban-korban peperangan tersebut menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan dan menimbulkan masalah kemanusiaan. Seringkali terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Intervensi kemanusiaan diperlukan untuk mencegah atau menghentikan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

BAGIAN 10
KEMENANGAN DALAM
PERANG SEMESTA

KEMENANGAN DALAM PERANG SEMESTA

Pada bagian 10 tentang kemenangan dalam perang semesta ini, disajikan sub pembahasan mengenai: ciri-ciri perang semesta, merunut sejarah perang semesta, Indonesian Total War. Dalam sejarah perang semesta pasca kemerdekaan di Indonesia selalu mengalami kemenangan-kemenangan. Hal ini membuktikan bahwa perang semesta cukup efektif dalam menghadapi invansi dari negara lain.

10.1 Ciri Perang Semesta

Perang semesta adalah perang yang mungkin termasuk melibatkan semua sumber daya dan infrastruktur yang terkait dengan sipil sebagai target militer, dan menerima korban sipil yang signifikan sebagai kerusakan tambahan. Semesta kata mengacu semata-mata pada kisaran target dan sarana yang dapat diterima, bukan pada tingkat kerusakan. Kamus Amerika-Inggris mendefinisikan "perang semesta" sebagai "Sebuah perang yang tidak terbatas dalam hal senjata yang digunakan, wilayah atau kombatan yang terlibat, atau tujuan yang dikejar, terutama di mana hukum perang diabaikan."

Para sarjana mengidentifikasi "perang semesta" sebagai kelas terpisah dari peperangan. Dalam suatu perang semesta, sampai pada tingkat yang tidak dapat diaplikasikan pada konflik-konflik yang kurang total, diferensiasi antara kombatan dan non-kombatan berkurang dan bahkan kadang-kadang hilang sama sekali karena pihak-pihak yang berseberangan dapat mempertimbangkan hampir setiap sumber daya manusia, bahkan yang non-kombatan, meskipun demikian bagian dari upaya perang. Tindakan tertentu terlepas dari legitimasi atau tidak sah dapat menjadi ciri perang semesta, meliputi:

1. Tidak memberikan seperempat (yaitu, tidak mengambil

tahanan), seperti dengan Perintah Komando Hitler selama Perang Dunia II.

2. Pengeboman strategis, seperti dengan pemboman strategis target musuh selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II
3. blokade, seperti dengan blokade Sekutu Jerman selama Perang Dunia I
4. Kebijakan bumi hangus, seperti dengan March General William T. Sherman ke Laut selama Perang Saudara Amerika
5. Menekan gerakan perlawanan, menghancurkan seluruh wilayah pemukiman manusia, dan / atau dengan sengaja membunuh atau mengeksekusi penduduk sipil dalam hukuman kolektif dan pembalasan atas setiap kegiatan perlawanan yang dicurigai atau aktual, seperti The Rape of Belgium selama Perang Dunia I
6. Perdagangan merampok atau peperangan kapal selam tanpa batas, seperti dengan kampanye Jerman U-Boat selama Perang Dunia I melawan musuh dan kapal dagang netral;
7. penggunaan warga sipil dan tawanan perang sebagai kerja paksa untuk operasi militer, seperti halnya Jepang dan Jerman menggunakan secara besar-besaran buruh kerja paksa dari negara lain selama Perang Dunia II (lihat Perbudakan di Jepang dan Kerja paksa di bawah pemerintahan Jerman selama Perang Dunia II).

Kita dapat menelusuri kembali ungkapan tersebut ke dalam publikasi pada tahun 1935 dalam memoir Perang Dunia I dari Genral Jerman Erich Ludendorff, *Der Totale Krieg* ("The Total War"). Beberapa penulis memperluas konsep kembali sejauh karya klasik Carl von Clausewitz, *On War*, sebagai "absoluter Krieg"; namun, penulis yang berbeda menafsirkan bagian yang relevan dengan cara yang berbeda. Perang total juga menggambarkan "guerre à outrance" Prancis selama Perang Perancis-Prusia.

Selama Perang Sipil Amerika, Union General William Tecumseh Sherman menyatakan bahwa untuk memenangkan dan mengakhiri perang dengan kemungkinan korban paling sedikit, ia harus mengobarkan "perang keras" (sinonim untuk perang semesta) melawan tidak hanya pejuang musuh tetapi juga musuh sipil di rumah

front yang terlibat dalam produksi senjata dan makanan untuk upaya perang Konfederasi.

Dengan menghancurkan infrastruktur yang penting bagi upaya perang Konfederasi dan menyerang pukulan serius pada moral sipil, ia berpikir bahwa itu akan sangat merusak kemampuan Konfederasi untuk melanjutkan perlawanan dan dengan demikian akan mengubah populasinya melawan kepemimpinan mereka.

Dalam suratnya kepada Kepala Stafnya, Union General Henry Halleck pada 24 Desember 1864 menggambarkan bahwa Persatuan itu "tidak hanya memerangi tentara musuh, tetapi orang-orang yang bermusuhan, dan harus membuat tua dan muda, kaya dan miskin, merasakan tangan keras dari perang, serta pasukan terorganisir mereka, "membela Marching Sherman ke Laut, operasi yang menyebabkan kerusakan infrastruktur di Georgia.

Angkatan Udara Amerika Jenderal Curtis LeMay memperbarui konsep untuk usia nuklir. Pada tahun 1949, ia pertama kali mengusulkan bahwa perang total di era nuklir akan terdiri dari pengiriman seluruh persenjataan nuklir dalam satu pukulan besar, sampai sejauh "membunuh satu bangsa".

10.2 Merunut Sejarah Perang Semesta

6. Sejarah Awal

Memanfaatkan segala cara yang tersedia untuk menghancurkan musuh dan kepentingan mereka adalah strategi yang jelas dan bahkan bentuk perang paling primitif memberikan bukti akan hal itu. Lihat bagian Warfare Inter-tribal. Peruntuhan Zaman Perunggu Akhir menyaksikan invasi metedis dan penghancuran kota-kota, populasi, kekayaan, dan sarana produksi oleh kelompok-kelompok suku yang bersaing, negara-negara bagian, dan kerajaan-kerajaan di Mediterania timur. Meskipun kota telah dipecat sebelumnya, sifat dan skala sistematis dari kampanye ini menonjol. Selama Abad Pertengahan, kehancuran di bawah Kekaisaran Mongol pada abad ke-13 secara efektif merupakan contoh perang semesta. Pasukan militer Genghis Khan membantai seluruh populasi dan menghancurkan setiap kota yang melawan. Sebagai negara agresor, bangsa Mongol

kuno, tidak kurang dari Nazi modern, melakukan perang total melawan musuh dengan mengatur semua sumber daya yang tersedia, termasuk personel militer, pekerja nonkombatan, intelijen, transportasi, uang, dan ketentuan.

7. 18th and 19th centuries ethnic war

Konflik antara Pawnees dan Sioux dan Cheyennes. Kedua belah pihak mengarahkan tindakan mereka tidak hanya terhadap pejuang-pejuang tetapi terhadap orang-orang secara keseluruhan. Nonkombatan adalah target yang sah. Memang, pengambilan kulit kepala seorang wanita atau anak dianggap terhormat karena itu menandakan bahwa pemungut kulit kepala telah berani memasuki jantung wilayah musuh. "

8. Perang Revolusi Prancis dan Perang Napoleon

Perang Revolusi Perancis memperkenalkan beberapa konsep perang total pertama, seperti wajib militer. Republik yang baru berdiri itu sendiri terancam oleh koalisi kuat negara-negara Eropa. Keputusan berikut dari Konvensi Nasional pada 23 Agustus 1793 menunjukkan luasnya upaya perang Prancis, ketika pasukan garis depan Prancis tumbuh hingga sekitar 800.000. Dengan total 1,5 juta di semua layanan — pertama kalinya sebuah pasukan yang melebihi jutaan manusia telah dimobilisasi dalam sejarah Barat.

Peperangan bergabung menjadi Perang Napoleon Kekaisaran Perancis Pertama dari c1803. Selama dua dekade mendatang peperangan hampir konstan, diperkirakan bahwa di suatu tempat di sekitar lima juta orang meninggal — mungkin sekitar separuh dari mereka warga sipil — dan Prancis sendiri menghitung hampir satu juta (dengan beberapa sumber lebih dari satu juta) kematian.

9. Pemberontakan Taiping

Pemberontakan Taiping (1850–1864) adalah salah satu perang paling mematikan dalam sejarah, dan perang total pertama di Cina modern. Sekitar 20 juta orang meninggal, banyak karena penyakit dan kelaparan. Ini mengikuti pemisahan Kerajaan Surgawi Taiping dari Kekaisaran Qing. Hampir setiap warga Kerajaan Surgawi diberikan pelatihan militer dan wajib militer ke tentara untuk melawan pasukan Imperial.

10. Perang sipil Amerika

Selama Perang Sipil Amerika, penggerebekan Union Army General Philip Sheridan di Lembah Shenandoah, yang dimulai pada 21 September 1864 dan berlanjut selama dua minggu, dianggap "perang semesta". Tujuannya adalah untuk menghilangkan makanan dan persediaan yang penting bagi operasi militer Korea Selatan, serta untuk menghantam semangat sipil Selatan. Sheridan mengambil kesempatan ketika dia menyadari kekuatan lawan telah menjadi terlalu lemah untuk melawan pasukannya. Union Army General William Tecumseh Sherman 'March to the Sea' pada bulan November dan Desember 1864 menghancurkan sumber daya yang diperlukan untuk Selatan untuk berperang. Jenderal Ulysses S. Grant dan Presiden Abraham Lincoln awalnya menentang rencana tersebut sampai Sherman meyakinkan mereka akan pentingnya [13]. Ini adalah contoh pertama dari kekuatan industri besar yang terlibat dalam strategi perang total secara eksplisit, dan akan melambangkan strategi yang digunakan dalam konflik abad ke-20.

11. Perang dunia I

Hampir seluruh Eropa dimobilisasi untuk mengobarkan Perang Dunia I. Para pemuda dikeluarkan dari pekerjaan produksi untuk bertugas dalam peran militer, dan digantikan pada lini produksi oleh para wanita. Penjataan terjadi di bagian depan rumah. Bulgaria pergi sejauh untuk memobilisasi seperempat dari penduduknya atau 800.000 orang, bagian yang lebih besar dari penduduknya daripada negara lain selama perang. Salah satu fitur dari Perang Semesta di Inggris adalah penggunaan poster propaganda pemerintah untuk mengalihkan semua perhatian pada perang di depan rumah. Poster digunakan untuk mempengaruhi opini publik tentang apa yang harus dimakan dan pekerjaan apa yang harus diambil, dan untuk mengubah sikap dukungan terhadap upaya perang. Bahkan Music Hall digunakan sebagai propaganda, dengan lagu-lagu propaganda yang ditujukan untuk rekrutmen. Ketika para pemuda meninggalkan peternakan untuk produksi makanan domestik, di Inggris dan Jerman jatuh. Di Inggris, tanggapannya adalah untuk mengimpor lebih banyak makanan, yang dilakukan meskipun pengenalan perang kapal selam

tidak terbatas di Jerman, dan untuk memperkenalkan penjatahan. Blokade Angkatan Laut Kerajaan pelabuhan Jerman mencegah Jerman dari mengimpor makanan dan mempercepat kapitulasi Jerman dengan menciptakan krisis pangan di Jerman.

12. Perang dunia II

Perang Dunia Kedua dapat dianggap sebagai perang semesta modernitas klasik. Tingkat mobilisasi sumber daya nasional di semua sisi konflik, ruang pertempuran yang diperebutkan, skala tentara, angkatan laut, dan angkatan udara yang dibangkitkan melalui wajib militer, penargetan aktif non-pejuang (dan properti non-tempur), pengabaian umum atas kerusakan agunan, dan tujuan yang tidak terbatas dari pihak yang berperang menandai perang semesta pada skala benua yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi.

8. Shōwa Japan

Selama bagian pertama dari era Shōwa, pemerintah Kekaisaran Jepang meluncurkan serangkaian kebijakan untuk mempromosikan upaya perang total melawan Cina atau kekuatan barat dan meningkatkan produksi industri. Di antaranya adalah Gerakan Mobilisasi Spiritual Nasional, Asosiasi Bantuan Aturan Kekaisaran. Undang-Undang Mobilisasi Nasional memiliki lima puluh klausa, yang menyediakan kontrol pemerintah atas organisasi sipil (termasuk serikat buruh), nasionalisasi industri strategis, kontrol harga dan penjatahan, dan menasionalisasi media berita. Undang-undang memberi pemerintah wewenang untuk menggunakan anggaran tidak terbatas untuk mensubsidi produksi perang, dan memberi kompensasi kepada produsen atas kerugian yang disebabkan oleh mobilisasi perang. Delapan belas dari lima puluh artikel menguraikan hukuman bagi pelanggar. Untuk meningkatkan produksinya, Shōwa Jepang menggunakan jutaan pekerja budak dan menekan lebih dari 18 juta orang di Asia Timur ke dalam kerja paksa.

9. United Kingdom

Sebelum permulaan Perang Dunia Kedua, Kerajaan Inggris menarik pengalaman Perang Dunia Pertama untuk mempersiapkan undang-undang yang akan memungkinkan mobilisasi langsung

ekonomi untuk perang, jika permusuhan di masa depan akan pecah. Penjatahan sebagian besar barang dan jasa diperkenalkan, tidak hanya untuk konsumen tetapi juga untuk produsen. Ini berarti bahwa pabrik yang membuat produk yang tidak relevan dengan upaya perang memiliki tugas yang lebih tepat. Semua lampu buatan dikenakan pemadaman hukum. Tidak hanya laki-laki wajib militer ke dalam angkatan bersenjata dari awal perang (sesuatu yang belum terjadi sampai pertengahan Perang Dunia I), tetapi para wanita juga wajib militer sebagai Land Girls untuk membantu petani dan Bevin Boys wajib militer untuk bekerja tambang batubara. Korban besar diharapkan dalam serangan bom, sehingga anak-anak dievakuasi dari London dan kota-kota lain secara besar-besaran ke pedesaan untuk wajib bertengkar di rumah tangga. Dalam jangka panjang ini adalah salah satu konsekuensi sosial yang paling mendalam dan tahan lama dari seluruh perang untuk Inggris. Ini karena ia mencampurkan anak-anak dengan orang dewasa dari kelas lain. Ini adalah alat yang sangat kuat tetapi lebih lanjut tidak berperikemanusiaan perang terutama ketika menyarankan strategi yang kontra intuitif. Contoh di mana analisis statistik memengaruhi taktik secara langsung termasuk pekerjaan yang dilakukan oleh tim Patrick Blackett tentang ukuran dan kecepatan konvoi yang optimal serta pengenalan aliran bomber oleh Royal Air Force untuk melawan pertahanan petarung malam dari Garis Kammhuber.

10. Germany

Sebaliknya, Jerman memulai perang di bawah konsep Blitzkrieg. Secara resmi, itu tidak menerima bahwa itu dalam perang semesta sampai pidato Sportpalast Joseph Goebbels 18 Februari 1943. Itu karena ekonomi Jerman melalui sebagian besar perang secara substansial kurang dikuasai bahwa itu tahan banting di bawah serangan udara. Konsumsi sipil tinggi selama tahun-tahun awal perang dan inventaris baik dalam industri dan dalam kepemilikan konsumen tinggi. Ini membantu melindungi ekonomi dari efek pengeboman.

11. Soviet Union

Uni Soviet adalah ekonomi komando yang telah memiliki sistem

ekonomi dan hukum yang memungkinkan ekonomi dan masyarakat untuk diarahkan ke dalam perang semesta. Transportasi pabrik-pabrik dan seluruh angkatan kerja di sebelah timur Ural ketika Jerman maju melintasi Uni Soviet pada tahun 1941 adalah suatu prestasi perencanaan yang mengesankan. Hanya pabrik-pabrik yang berguna untuk produksi perang yang dipindahkan karena komitmen perang total dari pemerintah Soviet. Front Timur Teater Eropa Perang Dunia II meliputi konflik di Eropa tengah dan timur mulai 22 Juni 1941 hingga 9 Mei 1945. Ini adalah teater perang terbesar dalam sejarah dalam hal jumlah tentara, peralatan dan korban jiwa dan terkenal karena keagasannya yang belum pernah terjadi sebelumnya, kehancuran, dan kehilangan nyawa yang luar biasa. Pertempuran melibatkan jutaan pasukan Jerman dan Soviet di sepanjang ratusan kilometer panjang yang luas. Sejauh ini merupakan teater tunggal paling mematikan dari Perang Dunia Para sarjana sekarang percaya bahwa paling banyak 27 juta warga Soviet meninggal selama perang, termasuk sekitar 8,7 juta tentara yang gugur dalam pertempuran melawan tentara Hitler atau meninggal di kamp-kamp POW. Jutaan warga sipil meninggal karena kelaparan, pemaparan, kekejaman, dan pembantaian. Poros kehilangan lebih dari 5 juta tentara di timur serta ribuan warga sipil. Selama Pertempuran Stalingrad, tank T-34 yang baru dibangun didorong — tidak dicat karena kekurangan cat — dari lantai pabrik langsung ke depan. Ini menjadi simbol komitmen Uni Soviet terhadap Perang Patriotik Besar dan menunjukkan kebijakan perang total pemerintah. Untuk mendorong orang-orang Soviet untuk bekerja lebih keras, pemerintah komunis, yang dikendalikan oleh Stalin, mendorong kecintaan orang-orang terhadap Tanah Air dan bahkan mengizinkan pembukaan kembali Gereja Ortodoks Rusia sebagaimana diduga hal ini akan membantu upaya perang.

12. Postwar Era

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, tidak ada negara industri yang berperang besar dan menentukan. Ini mungkin karena ketersediaan senjata nuklir, yang kekuatan destruktif dan penyebarannya yang cepat membuat mobilisasi penuh sumber daya suatu negara seperti di Perang Dunia II tidak diperlukan. Senjata

semacam itu dikembangkan dan dipelihara dengan anggaran pertahanan masa damai yang relatif sederhana. Pada akhir tahun 1950-an, ideologi dari Perang Dingin antara Dunia Barat dan Uni Soviet telah menghasilkan ribuan senjata nuklir yang diarahkan oleh masing-masing pihak di sisi lain. Secara strategis, keseimbangan kekuatan destruktif yang sama yang dimiliki oleh masing-masing situasi sampingan kemudian dikenal sebagai Perusakan Saling Bertanggung (MAD), mengingat bahwa serangan nuklir oleh satu kekuatan super akan menghasilkan serangan balik nuklir oleh yang lain. Ini akan menghasilkan ratusan juta kematian di dunia di mana, dalam kata-kata yang secara luas dikaitkan dengan Nikita Khrushchev, "Orang yang hidup akan iri pada orang mati". Selama Perang Dingin, kedua negara adidaya itu berusaha menghindari konflik terbuka antara pasukan mereka masing-masing, karena kedua belah pihak mengakui bahwa bentrokan semacam itu dapat dengan mudah meningkat, dan dengan cepat melibatkan senjata nuklir. Sebaliknya, negara adidaya saling bertempur melalui keterlibatan mereka dalam perang proksi, penumpukan militer, dan kebuntuan diplomatik. Dalam kasus perang proksi, masing-masing negara adidaya mendukung sekutunya masing-masing dalam konflik dengan kekuatan yang selaras dengan negara adidaya lainnya, seperti dalam Perang Vietnam dan invasi Soviet ke Afghanistan.

10.3 Indonesian Total War

1. Perang kemerdekaan Indonesia

Revolusi Nasional Indonesia atau Perang Kemerdekaan Indonesia adalah konflik bersenjata dan perjuangan diplomatik antara Indonesia dan Kekaisaran Belanda, dan revolusi sosial internal. Itu terjadi antara deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia pada akhir tahun 1949. Gerakan kemerdekaan Indonesia dimulai pada bulan Mei 1908, yang diperingati sebagai Tahun Kebangkitan Bangsa (Tahun Kebangkitan Nasional). Perjuangan tersebut berlangsung selama lebih dari empat tahun dan terlibat konflik bersenjata sporadis tetapi berdarah, pergolakan politik dan komunal Indonesia internal, dan dua

intervensi diplomatik internasional utama. Pasukan Belanda tidak mampu menang atas Indonesia. Meskipun pasukan Belanda dapat mengontrol kota-kota dan kota-kota di jantung Republik di Jawa dan Sumatra, mereka tidak bisa mengendalikan desa dan desa. Dengan demikian, Republik Indonesia pada akhirnya menang banyak melalui diplomasi internasional seperti yang dilakukan melalui tekad Indonesia dalam konflik bersenjata di Jawa dan pulau-pulau lainnya. Revolusi menghancurkan pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang telah memerintah dari sisi lain dunia. Ini juga secara signifikan mengubah kasta rasial, serta mengurangi kekuatan banyak penguasa lokal (raja).

2. Pertempuran Surabaya

Pertempuran Surabaya adalah pertempuran tunggal terbesar dari revolusi dan menjadi simbol nasional perlawanan Indonesia. Kelompok Pemuda di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, menyita senjata dan amunisi dari Jepang dan mendirikan dua organisasi baru; Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Dewan Keamanan Rakyat (BKR). Pada saat pasukan Sekutu tiba pada akhir Oktober 1945, pijakan pemuda di kota Surabaya digambarkan sebagai "benteng bersatu yang kuat. Pada bulan September dan Oktober 1945, orang-orang Eropa dan Eurasia yang pro-Belanda diserang dan dibunuh oleh massa Indonesia. Pertempuran sengit meletus ketika 6.000 tentara India Inggris mendarat di kota. Sukarno dan Hatta menegosiasikan gencatan senjata antara Partai Republik dan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Mallaby. Menyusul pembunuhan Mallaby pada 30 Oktober. Inggris mengirim lebih banyak pasukan ke kota itu mulai 10 November di bawah naungan serangan udara. Meskipun pasukan Eropa sebagian besar merebut kota itu dalam tiga hari, kaum Republikan yang bersenjata lemah berjuang sampai 29 November dan ribuan orang tewas ketika penduduk lari ke pedesaan. Meskipun kekalahan militer yang diderita oleh Partai Republik dan hilangnya tenaga kerja dan persenjataan yang akan sangat menghambat pasukan Republik untuk sisa revolusi, pertempuran dan pertahanan yang dipasang oleh Indonesia menggembleg bangsa untuk mendukung kemerdekaan dan membantu mengumpulkan

perhatian internasional.

3. Diplomasi dan serangan militer

a. Perjanjian Linggarjati

- 1) Perjanjian Linggarjati, yang diperantarai oleh Inggris dan berakhir pada November 1946, melihat Belanda mengakui Republik sebagai otoritas de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatra. Kedua pihak menyetujui pembentukan Indonesia Serikat pada tanggal 1 Januari 1949, sebuah negara federal semi-otonom dengan raja Belanda di kepalanya.
- 2) Jawa dan Sumatra yang dikuasai Republik akan menjadi salah satu negara bagiannya, di samping daerah-daerah yang secara umum di bawah pengaruh Belanda yang lebih kuat, termasuk Kalimantan bagian selatan, dan "Timur Besar", yang terdiri dari Sulawesi, Maluku, Kepulauan Sunda Kecil, dan Barat Baru. Guinea.
- 3) Komite Nasional Pusat Indonesia (KNIP) tidak meratifikasi perjanjian tersebut sampai Februari 1947, dan baik Republik maupun Belanda tidak puas dengan itu. Pada 25 Maret 1947, majelis rendah parlemen Belanda meratifikasi versi perjanjian yang dipreteli, yang tidak diterima oleh Republik.
- 4) Kedua belah pihak segera menuduh yang lain melanggar perjanjian Produk Operasi Perang Kemerdekaan I. Pada tengah malam tanggal 20 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan militer besar yang disebut Operatie Product, dengan maksud menaklukkan Republik.
- 5) Mengklaim pelanggaran Perjanjian Linggarjati, Belanda menggambarkan kampanye itu sebagai tindakan polisional ("aksi polisi") untuk memulihkan hukum dan ketertiban.
- 6) Ini digunakan untuk tugas KNIL. Namun, pada saat itu sebagian besar pasukan Belanda di Indonesia adalah milik Angkatan Darat Kerajaan Belanda. Segera setelah berakhirnya Perang Dunia II, 25.000 sukarelawan (di antaranya 5.000 marinir) telah dikirim ke luar negeri. Mereka kemudian diikuti oleh sejumlah besar wajib militer

dari Belanda. Dalam serangan, pasukan Belanda mengusir pasukan Republik keluar dari beberapa bagian Sumatra, dan Jawa Timur dan Barat. Partai Republik terbatas di wilayah Yogyakarta Jawa. Untuk mempertahankan kekuatan mereka di Jawa, sekarang berjumlah 100.000 tentara, Belanda menguasai perkebunan Sumatera yang menguntungkan, dan instalasi minyak dan batu bara, dan di Jawa, mengendalikan semua pelabuhan perairan dalam.

- 7) Reaksi internasional terhadap tindakan Belanda itu negatif. Negara tetangga Australia dan India yang baru merdeka sangat aktif dalam mendukung tujuan Republik di PBB, seperti Uni Soviet dan, yang paling signifikan, Amerika Serikat. Kapal-kapal Belanda terus diboikot dari pemuatan dan pembongkaran oleh para pekerja pasisir Australia, blokade yang dimulai pada September 1945. Dewan Keamanan PBB menjadi terlibat langsung dalam konflik, mendirikan Komite Kantor Baik untuk mensponsori negosiasi lebih lanjut, membuat posisi diplomatik Belanda sangat sulit. Gencatan senjata, yang diserukan oleh resolusi PBB, diperintahkan oleh Belanda dan Sukarno pada tanggal 4 Agustus 1947. Selama aksi militer, pada 9 Desember 1947 pasukan Belanda membunuh banyak warga sipil di desa Rawagede (sekarang Balongsari di Karawang, Jawa Barat).

b. Perjanjian Renville

- 1) Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menengahi Perjanjian Renville dalam upaya untuk memperbaiki Perjanjian Linggarjati yang runtuh. Kesepakatan itu diratifikasi pada Januari 1948 dan diakui gencatan senjata di sepanjang apa yang disebut 'garis Van Mook'; garis buatan yang menghubungkan posisi Belanda yang paling maju. Banyak posisi Republik, bagaimanapun, masih ditahan di belakang garis Belanda. Kesepakatan itu juga mewajibkan referendum diadakan pada masa depan politik dari wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Kewajaran yang jelas dari Partai

Republik mengumpulkan banyak itikad baik Amerika yang penting.

- 2) Upaya diplomatik antara Belanda dan Republik berlanjut sepanjang 1948 dan 1949. Tekanan politik, baik domestik maupun internasional, menghambat upaya Belanda dalam perumusan tujuan. Demikian pula para pemimpin Republik menghadapi kesulitan besar dalam membujuk orang-orang mereka untuk menerima konsesi diplomatik. Pada bulan Juli 1948 negosiasi sedang dalam kebuntuan dan Belanda mendorong secara sepihak ke arah konsep nasional federal Van Mook. Negara-negara federal baru Sumatra Selatan dan Jawa Timur diciptakan, meskipun tidak memiliki basis dukungan yang layak. Belanda membentuk *Bijeenkomst voor Federaal Overleg* (BFO) (atau Majelis Permusyawaratan Federal), sebuah badan yang terdiri dari pimpinan negara-negara bagian, dan didakwa dengan pembentukan Indonesia Serikat dan pemerintah sementara pada akhir tahun 1948. Namun, rencana-rencana Belanda tidak memiliki tempat bagi Republik kecuali mereka menerima peran kecil yang sudah ditetapkan untuk itu. Rencana kemudian termasuk Jawa dan Sumatra tetapi menjatuhkan semua menyebutkan Republik. Titik pelekatan utama dalam negosiasi adalah keseimbangan kekuasaan antara Perwakilan Tinggi Belanda dan pasukan Republik. Ketidakpercayaan antara Belanda dan Republik menghambat perundingan. Republik takut akan serangan besar Belanda yang kedua, sementara Belanda berkeberatan untuk melanjutkan kegiatan Republik di sisi Belanda dari garis Renville.
- 3) Pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi (35.000 orang) Tentara Republik, yang dipimpin oleh Nasution, bergerak dari Jawa Barat ke Jawa Tengah; relokasi itu dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan internal Republik yang melibatkan Divisi di daerah Surakarta.

Batalyon itu, bagaimanapun, bentrok dengan pasukan Belanda saat melintasi Gunung Slamet, dan Belanda percaya itu adalah bagian dari gerakan pasukan sistematis di sepanjang Jalur Renville. Ketakutan akan serbuan semacam itu benar-benar berhasil, bersama-sama dengan meredupnya Republik dari negara Pasundan yang didirikan Belanda dan laporan negatif, menyebabkan kepemimpinan Belanda semakin melihat dirinya sebagai kehilangan kontrol.

4. Strategi Dan Taktik Perang Kemerdekaan I Mulai Perang Semesta

- a. Setelah kekalahan TNI di Clash pertama (Juli 1947), sangat disadari bahwa TNI tidak dapat menandingi mobilitas Pasukan Belanda yang dilengkapi dengan gerakan bermotor bersama dengan tank, artileri dan pesawat sebagai dukungan udara dekat. Pejuang Indonesia harus meninggalkan taktik perang Linear konvensional. Konsep ini adalah awal dari implementasi taktik gerilya TNI, di mana TNI harus terserap ke medan dan bercampur dengan penduduk dan menciptakan apa yang disebut Wehrkreise (wilayah perang).
- b. Ketidakpercayaan antara Belanda dan Republik menghambat perundingan. Republik takut akan serangan besar Belanda yang kedua, sementara Belanda berkeberatan untuk melanjutkan kegiatan Republik di sisi Belanda dari garis Renville.
- c. Pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi (35.000 orang) Tentara Republik, yang dipimpin oleh Nasution, bergerak dari Jawa Barat ke Jawa Tengah; Relokasi ini dimaksudkan untuk mengurangi ketegangan internal Republik yang melibatkan Divisi di daerah Surakarta.
- d. Batalyon itu, bagaimanapun, bentrok dengan pasukan Belanda saat melintasi Gunung Slamet, dan Belanda percaya itu adalah bagian dari gerakan pasukan sistematis di sepanjang Jalur Renville. Ketakutan akan serbuan

semacam itu benar-benar berhasil, bersama-sama dengan meredupnya Republik dari negara Pasundan yang didirikan Belanda dan laporan negatif, menyebabkan kepemimpinan Belanda semakin melihat dirinya sebagai kehilangan kontrol. Operasi Crow of the Dutch (Operatie Kraai) dan Serangan Oemoem 1 Maret (1 Maret General Offensive) merupakan bagian dari Perang Kemerdekaan II.

- e. Belanda melancarkan serangan militer pada 19 Desember 1948 'Operatie Kraai' (Operasi Gagak) menaklukkan kota Yogyakarta, ibukota Republik sementara, kemudian semua kota besar Republik di Jawa dan Sumatra berada di tangan Belanda. Para pemimpin Republik diasingkan di Bangka. Pasukan Republik memimpin perang gerilya oleh Jenderal Sudirman. Pemerintah Republik yang darurat, PDRI didirikan di Sumatra Barat. Belanda menaklukkan kota-kota tetapi mereka tidak dapat mengendalikan desa-desa dan pedesaan. Pasukan Republik dan milisi yang dipimpin oleh Letnan Kolonel menyerang posisi Belanda di Yogyakarta pada 1 Maret 1949. Mereka merebut dan mengendalikan Yogyakarta selama enam jam yang diperingati sebagai "6 jam di Djokdja". Serangan serupa terhadap pasukan Belanda di Surakarta dipimpin oleh Letnan Kolonel Slamet Riyadi pada tanggal 7 Agustus tahun yang sama.

5. Dampak Perang Semesta Indonesia

- a. Tidak ada laporan akurat tentang berapa banyak orang Indonesia yang meninggal, mereka meninggal dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada orang Eropa. Perkiraan kematian orang Indonesia dalam pertempuran berkisar antara 45.000 hingga 100.000 dan korban sipil melebihi 25.000 dan mungkin setinggi 100.000.
- b. Sebanyak 1.200 tentara Inggris tewas atau hilang di Jawa dan Sumatra pada tahun 1945 dan 1946, kebanyakan dari mereka adalah tentara India. Lebih dari 5.000 tentara Belanda kehilangan nyawa mereka di Indonesia antara 1945 dan 1949. Banyak orang Jepang meninggal; di Bandung saja, 1.057

meninggal, hanya separuhnya mati dalam pertempuran yang sebenarnya, sisanya tewas dalam amukan oleh orang Indonesia. Puluhan ribu orang Cina dan Eurasia terbunuh atau kehilangan tempat tinggal, terlepas dari fakta bahwa banyak orang Cina mendukung revolusi. Tujuh juta orang mengungsi di Jawa dan Sumatra.

- c. Revolusi memiliki efek langsung pada kondisi ekonomi; kekurangan adalah hal yang umum, terutama makanan, pakaian dan bahan bakar. Sebenarnya ada dua ekonomi - Belanda dan Republik - yang keduanya harus membangun kembali secara bersamaan setelah Perang Dunia II dan bertahan dari gangguan revolusi. Republik harus mengatur semua kebutuhan hidup, mulai dari 'prangko, lencana tentara, dan tiket kereta api' sambil tunduk pada blokade perdagangan Belanda. Kebingungan dan gejolak inflasi yang berasal dari mata uang yang bersaing; Uang Jepang, Belanda baru, dan mata uang Republik semuanya digunakan, sering kali bersamaan.

6. Perang dan Menang

- a. Perang adalah tentang menang. Sun Tzu mengungkapkannya. "Kemenangan adalah objek utama dalam perang". Bahkan bertarung dalam situasi yang mustahil dilakukan dengan harapan kemenangan, jika hanya dengan mukjizat atau jika hanya didefinisikan sebagai yang bertahan dari kontes. Kenyataan bahwa perang adalah tentang menang bukan berarti kemenangan. Seseorang dapat memenangkan perang, terutama perang terbatas, tanpa mencapai kemenangan;
- b. Kekuatan militer secara sah dapat digunakan untuk memperoleh tujuan yang kurang dari kemenangan total atau untuk keuntungan politik langsung tanpa maksud menyelesaikan masalah yang mendasarinya.
- c. Intinya adalah perang adalah tentang politik, dan akibatnya kemenangan pada akhirnya adalah masalah politik.

7. Definisi Kemenangan

- a. Clausewitz: '... pentingnya kemenangan ditentukan oleh

kekuatan yang dengannya pengejaran langsung dilakukan. Dengan kata lain, pengejaran merupakan tindakan kedua dari kemenangan [pertempuran yang menentukan menjadi yang pertama] dan dalam banyak kasus lebih penting daripada yang pertama. Strategi pada titik ini lebih dekat ke taktik untuk menerima penugasan yang telah selesai dari itu; dan latihan pertama dari otoritasnya adalah untuk menuntut bahwa kemenangan itu harus benar-benar lengkap. 'Clausewitz:' ... penting kemenangan ditentukan oleh semangat Mengusulkan segera. Dengan kata lain, mengejar kemenangan dalam banyak kasus lebih penting yang pertama. Namun, pengiriman yang menentukan yang pertama. Strategi pada saat ini lebih dekat dengan taktik dalam mengatur tugas, dan dituntut untuk menuntut kemenangan yang paripurna'.

- b. Sun Tzu menghubungkan pengejaran 'tujuan' - kondisi kemenangan - dengan 'cara', 'berarti' artinya, strategi dan juga 'metode.' Dia berpendapat bahwa hanya dengan strategi mengambil 'keseluruhan', 'Akankah sang jenderal menemukan kemenangan penuh. Sun Tzu, menghubungkan antara "ENDS" —sebagai pilihan kemenangan — dengan "WAYS", "MEANS" yang disebut dengan STRATEGI dan Metode. Dia mengedit hanya dengan strategi dapat mencapai puncak secara keseluruhan.
- c. *Jomini too identifies the battle as the chief arbitrator of victory or defeat and in that sees the destruction of the enemy army as a means to the end of occupying the enemy capital (or threatening to), whereupon the enemy would have to make peace on the victors terms.* Jomini mengidentifikasi pertempuran sebagai seorang arbitrator kemenangan atau kekalahan bahwa kehancuran militer musuh sebagai suatu sarana akhir dari peperangan dan menduduki ibukota (atau mengancam), sehingga musuh harus mau memulai perdamaian dalam istilah kemenangan.
- d. *Lieutenant Colonel Antulio J. Echevarria, US Army, states: ...in the early days of the nation's existence, the American way of war*

centred on the desire to achieve a crushing' military victory either through a strategy of attrition or one of annihilation over an adversary. U.S. military men and political leaders typically saw the destruction of an opponent's armed might and the occupation of his capital as marking the end of war and the beginning of post-war negotiations. Letnan Kolonel Antulio J. Echevarria, US Army, menyatakan bahwa ...pada awal keberadaannya, cara Amerika berperang berpusat pada keinginan untuk menghancurkan 'militer musuh untuk mencapai kemenangan militer-baik melalui strategi pengurangan atau pemusnahan kekuatan musuh.

- e. Militer dan pemimpin politik biasanya melihat penghancuran kekuatan bersenjata lawan dan pendudukan ibukota sebagai tanda dari "akhir" perang dan dimulainya negosiasi pasca-perang.
- f. Apa itu Kemenangan dan Kemenangan? Kemenangan di dalamnya adalah "perang" pada tingkat yang paling dasar. Kemenangan dalam perang mungkin atau mungkin "tidak ada" dengan menggunakan obyektif seperti korban atau wilayah yang dirampas atau menggunakan negara lain. Dalam memenangkan perang, hal-hal materi-level pada tingkat tertentu dan selalu dalam hal efeknya pada persepsi-tapi yang lebih penting adalah persepsi akhir dari memori.
- g. Aspek yang kesulitan dalam masalah menang secara eksponensial karena memperkenalkan variabel bebas yang dinilainya diutamakan, untuk berapa banyak, dan berdasarkan kalkulator apa. Hasil dari setiap interaksi langsung dari dua kekuatan akan saling terkait dan saling tergantung, terutama yang terjadi di antara mereka, tetapi karena mereka adalah fakta-fakta yang dibuktikan, hasil yang berbeda untuk masing-masing pihak.
- h. Memenangkan perang (sebagai lawan dari pertempuran atau kampanye) adalah kondisi politik. Jika perang merupakan tindakan politik, kemenangan berada di tingkat tertinggi sejalan dengan definisi politik yang berada pada tingkat

tertinggi pula. Implikasinya adalah bahwa kemenangan taktis atau operasional tanpa hasil politik yang menguntungkan adalah “hampa”, itu hal yang wajar. Tapi mengetahui bahwa kemenangan strategis adalah kondisi politik bukanlah pemahaman yang cukup tentang kemenangan. Karena itu merupakan hasil dari persepsi atau penilaian, kemenangan sangat tergantung pada perspektif. Dalam arti militer, ini diterjemahkan menjadi peka terhadap tingkat perang. Hal ini dimungkinkan untuk memiliki kemenangan taktis yang mendobrak menjadi hasil operasional atau strategis.

- i. **Apakah hal di atas benar-benar suatu kemenangan (victory)?** Bagi pandangan seorang komandan taktis benar itu suatu kemenangan. Tetapi perspektif seorang panglima atau komandan yang bersifat strategis mungkin akan berbeda. Catatan: Pada Perang Teluk I, Saddam Hussein tetap mengklaim dirinya menang, walaupun di medan perang dia kehilangan banyak prajurit dan alutsista, namun dia tetap *survived* sebagai Presiden Iraq (itu adalah tujuan strateginya setelah diintervensi Koalisi). Secara strategi dia menang, sedikitnya dalam perspektifnya Saddam.

RANGKUMAN

1. Perang semesta melibatkan semua sumber daya dan infrastruktur yang terkait dengan sipil sebagai target militer. Terlepas dari ligitimasi atau tidak sah, terdapat ciri perang semesta, meliputi: tidak memberikan seperempat (tidak mengambil tahanan), pengeboman strategis, kebijakan bumi hangus, menekan gerakan perlawanan, perampasan atau perampokan, penggunaan warga sipil dan tawanan perang untuk operasi militer.
2. Beberapa contoh sejarah perang semesta, antara lain: kekaisaran Mongol pada abad ketigabelas membantai seluruh populasi manusia yang membangkang dalam suatu kota, 18th and 19th Centuries Ethnic War, perang revolusi Perancis dan perang Napoleon, pemberontakan Taiping, perang sipil Amerika, perang dunia I, perang dunia II, Showa Japan, United Kingdom, Germany, Soviet Union, Post War Era.
3. Contoh sejarah perang semesta di Indonesia, misalnya: perang kemerdekaan Indonesia, dan pertempuran Surabaya.

INDEKS

A

Agresi Militer Belanda I, 38, 39
Agresi Militer Belanda II, 40
Analytical Dimension of Total War, 23
Arthur Marwick, 21

B

British South East Asia Command (BSEAL), 37

C

Clausewitz, 20, 25
Collateral Damage, 9

D

Deklarasi St.Petersburg, 54
Detente, 73, 74
Diplomasi, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70
Diplomasi Komersial, 74
Diplomasi Demokratis, 74
Diplomasi Melalui Konferensi, 74
Diplomasi Diam-Diam, 76
Diplomasi Preventif, 77
Diplomasi Sumberdaya, 77
Doktrin Pertahanan, 105
Douglas Mc. Arthur, 35, 36, 37

E

Es Bjorn Rosenbland, 47

G

Guerre Totale, 18
General Erich Ludendorff, 19
Gerakan DI/TII 1949-1962, 39

Gil Elliot, 20

H

Hendry Dunant, 48

Hubungan Internasional, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70

I

Integrale, 18

Integritas Politik, 66

Integritas Wilayah, 66

J

Jus ad bellum, 48, 49, 50

Jus in bello, 48, 49, 50

James Turner Johnson, 19

Japan's World War II, 24

John Keegan, 19

J.F.C. Fuller, 23

Jean Pictet, 47

Jenderal Sudirman, 40, 41, 42, 43

K

Kejahatan Perang, 57

Konvensi Jenewa, 50, 51, 52

Konvensi Den Haag IV, 54

Konferensi Meja Bundar (KMB), 93

L

Lord Mounthbatten, 37

Ludendorff, 28

Leiter der politik, 28

Lieber Code, 53

M

Markusen and Kopf, 22

Mobilisasi, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127

Montesquieu, 18

Mr. Hugh S. Cumming, 37
Mochtar Kusuma Atmaja, 47

N

Nature Resources, 34
Nuclear War, 26, 27

P

Pemberontakan PKI Madiun 1948, 39
Pemberontakan Taiping, 154
Pembebasan Irian Barat, 94, 95
Perang, 78, 79, 80, 81, 82
Perang Absolut, 20
Perang Total, 8, 9, 10, 11, 12
Perang Gerilya, 104
Perundingan Roem Roijem, 91, 92
Perjanjian Linggarjati, 38, 39
Perjanjian Renville, 40, 88, 89, 90
Pola Kerjasama, 65
Pola Akomodasi, 65
Pola Konflik, 65
Pola Kompetisi, 66

R

Ratu Wilhelmina, 37
Republik Indonesia Serikat, 40
Richard Preston dan Sydney Wise, 20
Robert Jervis, 26, 27

S

Seche, 20
Serangan Umum 1 Maret 1949, 40
SR. Sianturi, 47
South West Pacific Area Command (SWPAL), 37
Smart Power, 115

Strategi, 100, 101, 102, 103

Strategi Militer, 104, 105

Superpowers, 27

T

Tanggungjawab Komando, 57

Teori Realism, 64

Teori Liberalism, 64

Teori Constructivism, 64

Teori Feminism, 64

Total War Aims, 8

Total Methods of Warfare, 8

Total Control, 8

Totaliterisme, 23

Trikora, 96

Tujuan Nasional, 66

Tujuan Vital, 66

W

Warga Sipil, 55, 56

Y

Yurisdiksi Internasional, 57

DAFTAR PUSTAKA

- Australaiaian Centre For Defence & Strategic Studies, *The Military Strategic Level*, 2007
- Australian Journal of Politics and History* 32 no. 1 (1986).
- Ann Stoler, *Capitalism and Confrontation in Sumatra's Plantation Belt, 1870–1979* (New Haven:Yale University Press, 1985), p103.; all cited in Vickers (2005), page 100 Friend (2003), page 35
- Amry Vandenbosch (1931). "Nationalism in Netherlands East India". *Pacific Affairs* (Pacific Affairs, University of British Columbia).
- Björn Müller-Wille. (2010). "From 'Total War' to 'Total Operations' – Contemporary Doctrine and Adherence to IHL". in S. Perrigo & J. Whitman (Vol. Ed.). *The Geneva Conventions Under Assault* (pp. 155—178). London and New York: Pluto Press.
- Chickering, R., 2003, *The Shadows Of Total War: Europe, East Asia, And The United States, 1919–1939*, Cambridge University Press, New York.
- Collin S. Gray, "Why Strategy is Difficult," *JFQ*, Summer 1994.
- Dietrich Schindler & Jiri Toman (Ed.). (2004). *The Laws of Armed Conflicts: A Collection of Conventions, Resolutions and Other Documents*. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
- Departemen Pertahanan Keamanan, Doktrin Teritorial Nusantara, Buku I & Buku II, 1979;
- Frederick, William H. (April 1982). "In Memoriam: Sutomo" (PDF). *Indonesia* (Cornell Modern Indonesia Project)
- George Mc.T Kahin (1980). "In Memoriam: Mohammad Hatta (1902–1980)". *Indonesia* (Southeast Asia Program Publications at Cornell University).

- Gray, C. S., 1999, *Modern Strategy*, Oxford University Press, Oxford.
- H.J Morgenthau, *Politik Antar Bangsa*, direvisi oleh Kenneth W. Thompson, ed. V, buku 1, Yayasan Obor Indonesia, 1990.
- Harry R. Yagger, *Strategic Theory for the 21st Century. The Little Book on Big Strategy*, 2006.
- Jason Campbel, et all, How to Measure the Success of War. Judging success and failure in counterinsurgency” *Policy Review*, October-November 2009
- Jack. C. Planodan Roy Olton, *International Relation Dictionary*. CLIO Press LTB, England, 1982,
- John A. Vasquez, *The War Puzzle Revisited*, 2009. Chapter 6.
Arshintana, et all, Strategi dan Kajian Strategi: Gambaran, Definisi dan arti penting , October 2016
- Kahin, George McT. (April 2000). "Sukarno's Proclamation of Indonesian Independence". *Indonesia* (Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project);
- Kirby, Woodburn S (1969). *War Against Japan, Volume 5: The Surrender of Japan*. HMSO.
- Liddle Hart, *Strategy*, 1967. Chapter XIX.
- MAJ. Keith E. Puls (Ed.). (2005). *Law of War*. Charlottesville, Virginia: International and Operational Law Department, The Judge Advocate General’s Legal Center and School.
- Mabes TNI-Sesko TNI, *Sejarah Operasi Pembebasan Irian Barat*, 2005.
Mohtar Masoe’d, *Ilmu Hubungan Internasional (Disiplin dan Metodologi)*. LP3ES Jakarta,
- Martin Griffiths and Tery O’Callaghan : *International Relations: The Key Concepts*, 2002.
- Marwick, A., et.al. (Eds), 2001, *Total War and Historical Change*:

Europe 1914-1955, Open University Press, Philadelphia.
Mabes TNI-Sesko TNI, *Teori Hubungan Internasional*, 2005.

Nyoman S. Pendit, *Bali Berjuang* (2nd edn Jakarta:Gunung Agung, 1979 [original edn 1954])

Pramoedya Anwar Toer, Koesalah Soebagyo Toer and Ediati Kamil
Kronik Revolusi Indonesia [Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia, vol. I (1945); vol. II (1946) 1999; vol. III (1947); vol.
IV (1948) 2003];

Robert Cribb, 'A revolution delayed: the Indonesian Republic and the
Netherlands Indies, August–November 1945',

Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan
Internasional*, Pustaka Pelajar, 2009.

Supriyatno, M., *Tentang Ilmu Pertahanan*, YPOI, 2014;

S.L. Roy, *Diplomasi*, PT Raja Grafindo Persada, 1995

Sutejo Atmowasito, *Diplomasi dan Perang*, Susreg XXXI-Sesko TNI,
2004.

Suryo Prabowo "Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta"
cetakan ke 2 Pusat Pengkajian Strategi Nasional (PPSN) 2012
hal. 58.

"The National Revolution, 1945–50". *Country Studies, Indonesia*. U.S.
Library of Congress.

Taylor, Jean Gelman (2003). *Indonesia: Peoples and History*. Yale
University Press.

Wells, D.A. (Ed), 1996, *An Encyclopedia of War and Ethics*, Greenwood
Press, Westport.

RIWAYAT HIDUP



Penulis yang memiliki nama lengkap Mayjen TNI Purn Dr. Ir. Arief Rachman, MM, MBA., dilahirkan di Baturaja pada 6 Agustus 1957 yang silam dari pasangan ayahanda Muhammad Dawam (alm) dengan Ibu Mastukah. Penulis merupakan lulusan Akmil 1980. Pendidikan umum yang pernah ditempuhnya, meliputi: S1 Teknik Industri (1998), S2 Magister Manajemen (2000 dan 2009), dan S3 Kajian Budaya Media UGM (2013).

Adapun pendidikan militer pengembangan umum yang pernah ditempuh selepas lulus Akmil di Magelang, antara lain: Suslapa II (1990), Seskoad (1995), Sus Athan (2000), Army War College Amerika Serikat (2004), Susdanrem (2005), Lemhannas (2007), IPCSS AS (2010), NIIR Clingendael Nederlands (2012), dan USARPAC AS (2013).

Sedangkan pendidikan militer pengembangan spesialis yang pernah diikutinya, meliputi: Susarcabif (1980), Susarpara (1981), Platoon Armed Wings Inggris (1980), Platoon Leader Course Inggris (1980), Sus Bahasa Inggris USA (1983), Tactical Intelligent Course USA (1983), American Languages Course (1985), Special Forces USA (1985), Ranger USA (1987), Air Borne USA (1987), Pathfinder USA (1987), Susbintal Fungsi Komando (1993), Intelligent Strategic (1999), Sus Bahasa Inggris (1999), Sus Komputer (1999), Sus Auditor (2005).

Penulis memiliki beragam penugasan yang pernah dilaluinya, meliputi: Timor Timur (1980, 1984), Opskam Aceh (1990), Opstam Papua (1990), Opster Papua (1994), Perbatasan Papua (1995), Pam Ibukota (1996), Bencana Alam Aceh (2004), Bencana Alam Yogyakarta (2006), Pengamanan Perbatasan NTT (2006), Pengamanan Pulau-Pulau Terdepan Wilayah NTT (2006), Bakti TNI Pembangunan Rumah Pengungsi korban Konflik Perbatasan Timor-Timur sebanyak 8000 rumah di NTT (2006-2007), Bencana Alam Bantul Yogyakarta (2006), Bencana Alam Manggarai NTT (2007), Bencana Alam Sumbar (2009), dan Bencana Alam Merapi Yogyakarta (2011).

Penugasan lain keluar negeri juga sangat beragam, diantaranya meliputi: penugasan ke Australia (1980); pendidikan di Inggris (1981) di USA (1983 sd 1987); OJT, Latma, dan Lomba menembak di Malaysia (1988, 1991, 1992), Unamic dan Untag PBB di Kamboja (1991, 1992, 1993), Untag di Korea Selatan (1997), Australia (1997, 1998), Philipina (1999); Pakistan, Srilanka, Afghanistan, Maladewa (2000-2003), Australia (2002), Afghanistan (2002, 2003), Srilanka (2003), Uzbekistan (2003), Libya (2003), USA (2004), Australia (2007), Timor Leste (2008), Malaysia (2008), Saudi Arabia (2008), China (2009), Malaysia (2010), USA (2010), Papua New Guinea (2013), Singapura (2013), Malaysia (2014), Saudi Arabia (2014), Oman (2014), Malaysia (2014), Thailand (2015), Malaysia (2015), Bangladesh (2015), India (2015), Pakistan (2015), Saudi Arabia (2015), Vietnam (2015), Kamboja (2015), Malaysia (2015), Jepang (2015), Brunai (2015), Bangladesh (2016), USA (2016), Saudi Arabia (2017), Srilanka (2017), India (2018), Turkiye (2019), Pakistan (2019), Uzbekistan (2019), Lebanon (2019), Jordan (2019), Palestina (2019), Mesir (2019).

Penulis juga mempunyai segudang pengalaman dalam penugasan jabatan penting di TNI AD, meliputi: Liaison Officer Kamboja (1991), Observer Kamboja (1991), Wadan Kontingen Garuda XIID (1993), Athan RI Islamabad Pakistan (2000), Kadep Ilpengtek Seskoad (2004), Kadep Jemen Seskoad (2004), Danrem 161/WS Dam IX/UDY (2006), Staf Khusus Panglima TNI (2009), PA Sahli Tk II Bidang Manusia (2010), Ses Unhan/Dosen Unhan (2012), Koorsahli Kasad (2012), Danseskoad (2013), Staf Khusus Kasad Bidang Kedaerahan (2014), Dosen Tetap Pascasarjana Unhan (2014), Duta Besar KBRI Kabul Afghanistan (2017).

Penulis memiliki banyak tanda jasa, meliputi: SL.CPAF, SL. Dwidya Sistha, SL. Kesetiaan VIII Tahun, SL. Kesetiaan XVI Tahun, SL. Kesetiaan XXIV Tahun, SL. PBB Unamic, SL. PBB Untag I, SL. PBB Untag II, SL. Raksaka Dharma I, SL. Raksaka Dharma II, SL. Raksaka Dharma III, SL. Seroja, SL. SNC Kamboja, SL. Srilanka, SL. Kesetiaan XXXII Tahun, Tanda Kehormatan Satria Lencana Dharma Bantala, Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Nararya, Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Pratama.

STRATEGI PERANG SEMESTA INDONESIA

Perang semesta sering disebut juga sebagai perang total. Definisi perang total (*total war*) itu sendiri kini masih menjadi istilah kontroversial yang diperdebatkan oleh para politisi, akademisi, pengamat bahkan perwira militer sampai dengan sekarang. Sejak dikonsepsikan oleh politisi Perancis selama Perang Dunia I saat krisis parah (1916- 1917), perang total telah menjadi istilah yang digunakan oleh sejarawan dan akademisi untuk melihat beragam elemen saat melihat perang di masa lalu.

Perang total adalah perang yang mencakup seluruh dan semua sumber daya dan infrastruktur yang terkait dengan sipil sebagai target militer, dan menerima korban sipil yang signifikan sebagai kerusakan kolateral (*collateral damage*). Kata “total” hanya mengacu pada kisaran target dan sarana yang dapat diterima, tidak sampai tingkat kerusakan. Kamus *American-English* mendefinisikan perang total sebagai perang yang tidak dibatasi dalam hal senjata yang digunakan, wilayah atau kombatan yang terlibat, atau tujuan yang dikejar, terutama yang didalamnya hukum perang diabaikan. Para sarjana mengidentifikasi perang total sebagai klas peperangan yang tersendiri.

Dalam konteks kekinian mengacu pada pengalaman sejarah bangsa Indonesia pada masa lalu yang pernah dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun, dan Jepang selama beberapa tahun, ternyata penerapan strategi perang semesta ini sangat efektif diterapkan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setiap ancaman yang muncul baik dari luar maupun dari dalam negeri, dapat dicegah melalui mobilisasi semua komponen bangsa yang turut serta dalam usaha bela negara.



Madza Media

- ✉ redaksi@madzamedia.co.id
- 🌐 www.madzamedia.co.id
- 📧 @madzamedia

